

# SOSIOLOGI AGRIBISNIS



**Kausar, Siti Masithoh, Sitti Nurani Sirajuddin; Ulfah Nurdiani ·  
Tintin Febrianti, Charles R. Ngangi , Irmayani, Rosnita, Jane S.  
Tambas, Asda Rauf, Endah Wahyuning Asih, Fitri Dian Perwitasari,  
Tatang Mulyana, Arissaryadin, Meki Herlon**

# SOSIOLOGI AGRIBISNIS

## **Penulis:**

Kausar

Siti Masithoh

Sitti Nurani Sirajuddin

Ulfah Nurdiani

Tintin Febrianti

Charles R. Ngangi

Irmayani

Rosnita

Jane S. Tambas

Asda Rauf

Endah Wahyuning Asih

Fitri Dian Perwitasari

Tatang Mulyana

Arissaryadin

Meki Herlon



**Azzia Karya Bersama**

# Sosiologi Agribisnis

## Penulis :

Kausar, Siti Masithoh, Sitti Nurani Sirajuddin, Ulfah Nurdiani,  
Tintin Febrianti, Charles R. Ngangi, Irmayani, Rosnita,  
Jane S. Tambas, Asda Rauf, Endah Wahyuning Asih, Fitri Dian  
Perwitasari, Tatang Mulyana, Arissaryadin, Meki Herlon

---

**Editor :** Dr. Mukhlis, A.Md., S.P., M.Si.

**Penyunting :** Sonya Scodia Wulandari, S.Tr.Ak., M.M

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Muhammad Hidayat, S.Ikom

---

## Diterbitkan oleh :

Azzia Karya Bersama

Anggota IKAPI No. 051/SBA/2024

Perumahan Griya Anak Air Permai Blok B19, Batipuh Panjang, Koto  
Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat

Email : [penerbitazzia@gmail.com](mailto:penerbitazzia@gmail.com)

Website : [www.azzia.id](http://www.azzia.id)

---

**ISBN : 978-623-10-3002-3**

---

Cetakan pertama, September 2024

---

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi dan mendistribusikan,  
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka Penulisan Buku dengan judul Sosiologi Agribisnis dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Konsep Dasar Sosiologi Agribisnis, Masyarakat Agribisnis, Interaksi dan Proses Sosial Masyarakat Agribisnis, Kelompok Sosial Masyarakat Agribisnis, Pelapisan Sosial dalam Masyarakat Agribisnis, Struktur Sosial Masyarakat Agribisnis, Mobilitas Sosial dalam Masyarakat Agribisnis, Desa dan Perkembangannya, Kota dan Perkembangannya, Dinamika Kelompok Agribisnis, Kepemimpinan dalam Masyarakat Agribisnis, Kelembagaan Agribisnis, Kemitraan Agribisnis, Komunikasi Sosial dan Penyebaran Inovasi Agribisnis, Perubahan Sosial pada Masyarakat Agribisnis.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, September 2024  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR SOSIOLOGI AGRIBISNIS.....</b>	<b>13</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Pengertian Sosiologi Agribisnis .....	2
1.3 Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan .....	6
1.4 Perbedaan dan Persamaan Sosiologi Agribisnis, Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan.....	7
1.5 Kontribusi Sosiologi Agribisnis .....	10
<b>BAB 2 MASYARAKAT AGRIBISNIS .....</b>	<b>13</b>
2.1 Definisi Masyarakat.....	13
2.2 Masyarakat sebagai Sistem Sosial.....	24
2.3 Masyarakat Agribisnis .....	25
2.4 Masyarakat Industrial .....	26
<b>BAB 3 INTERAKSI DAN PROSES SOSIAL MASYARAKAT AGRIBINIS .....</b>	<b>43</b>
3.1 Pendahuluan .....	43
3.2 Interaksi Sosial Masyarakat Agribisnis .....	44
3.3 Proses Sosial Masyarakat Agribisnis .....	51
<b>BAB 4 KELOMPOK SOSIAL DALAM AGRIBISNIS .....</b>	<b>55</b>
4.1 Definisi Kelompok Sosial.....	56
4.2 Jenis-Jenis Kelompok Sosial dalam Masyarakat Agribisnis .....	56
4.3 Ciri-ciri Kelompok Sosial.....	59
4.4 Fungsi dan Peran Kelompok Sosial dalam Masyarakat Agraris.....	59
4.5 Proses Pembentukan Kelompok.....	60
4.6 Manajemen Kelompok Sosial dalam Agribisnis .....	62

4.7 Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Kelompok Sosial dalam Agribisnis .....	63
<b>BAB 5 PELAPISAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT AGRIBISNIS .....</b>	<b>67</b>
5.1 Pengertian Pelapisan Sosial .....	67
5.2 Perspektif Teori Klasik dan Modern tentang Pelapisan Sosial .....	68
5.3 Dimensi Pelapisan Sosial Agribisnis .....	69
<b>BAB 6 STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT AGRIBISNIS</b>	<b>75</b>
6.1 Pengertian Struktur Sosial .....	75
6.2 Fungsi Struktur Sosial.....	77
6.3 Stratifikasi Sosial.....	79
6.4 Tipe Struktur Sosial.....	82
<b>BAB 7 MOBILITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT AGRIBISNIS .....</b>	<b>87</b>
7.1 Pengertian Mobilitas Sosial.....	87
7.2 Jenis-jenis Mobilitas Sosial .....	89
7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial .....	90
7.4 Dampak Mobilitas Sosial.....	94
7.5 Mobilitas Masyarakat dalam Agribisnis.....	95
<b>BAB 8 DESA DAN PERKEMBANGANNYA.....</b>	<b>101</b>
8.1 Konsep Desa.....	101
8.2 Pembangunan Dan Perkembangan Desa.....	107
8.3 Keuangan Desa .....	114
8.4 Indeks Pembangunan Desa (Ipd).....	119
8.5 Indek Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri .....	121
<b>BAB 9 KOTA DAN PERKEMBANGANNYA.....</b>	<b>129</b>
9.1 Pengertian Kota .....	129
9.2 Ciri-Ciri Kota.....	131
9.3 Tipe Kota .....	134
9.4 Fungsi Kota .....	136
9.5 Pembangunan Kota.....	138
9.6 Perkembangan Kota.....	140

9.7 Urbanisasi dan Dampaknya.....	142
<b>BAB 10 DINAMIKA KELOMPOK AGRIBISNIS .....</b>	<b>147</b>
10.1 Konsep Dasar Dinamika Kelompok Agribisnis.....	148
10.2 Lingkup Dinamika Kelompok Agribisnis .....	151
10.3 Penerapan Dinamika Kelompok Agribisnis.....	163
<b>BAB 11 KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT AGRIBISNIS.....</b>	<b>147</b>
11.1 Latar Belakang.....	148
11.2 Agribisnis .....	151
11.3 Masyarakat.....	163
11.4 Kepemimpinan .....	163
<b>BAB 12 KELEMBAGAAN AGRIBISNIS .....</b>	<b>189</b>
12.1 Pengertian Kelembagaan Agribisnis .....	189
12.2 Jenis kelembagaan.....	192
12.3 Peran kelembagaan.....	197
12.4 Kendala kelembagaan .....	198
12.5 Strategis kelembagaan.....	199
<b>BAB 13 KEMITRAAN AGRIBISNIS .....</b>	<b>209</b>
13.1 Pendahuluan.....	209
13.2 Definisi dan Karakter Kemitraan Agribisnis.....	210
13.3 Model Kemitraan Agribisnis .....	213
13.4 Kelembagaan Kemitraan Agribisnis.....	214
13.5 Kasus Kemitraan Agribisnis.....	216
13.6 Etika Kemitraan Agribisnis.....	219
<b>BAB 14 KOMUNIKASI SOSIAL DAN PENYEBARAN INOVASI AGRIBISNIS .....</b>	<b>223</b>
14.1 Pendahuluan.....	223
14.2 Ontologi Komunikasi Sosial dalam Agribisnis.....	224
14.3 Epistemologi Komunikasi Sosial dalam Agribisnis.....	225
14.4 Aksiologi Komunikasi Sosial dalam Agribisnis .....	227
14.5 Studi Kasus Penyebaran Inovasi Pertanian di NTB .....	229

<b>BAB 15 PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT AGRIBISNIS .....</b>	<b>233</b>
15.1 Apa itu Perubahan Sosial pada Masyarakat Agribisnis .....	233
15.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Sosial..	235
15.3 Bentuk Perubahan Sosial .....	240

**BIODATA PENULIS**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sumber pendapatan desa ..... 119

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Kluckhon Mengenai Lima Masalah Hidup yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia .....	23
Tabel 2 Perbedaan Pandangan Hidup Pada Masyarakat Desa dan Masyarakat Industri .....	32
Tabel 3 Perspektif desa lama dan desa baru.....	105
Tabel 4 Perbedaan dua pendekatan pembangunan pedesaan, paradidma lama dan paradigma baru.....	108
Tabel 5 Perbedaan konsep membangun desa dan desa membangun.....	112
Tabel 6 IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia, 2018.....	120



# BAB 1

## KONSEP DASAR SOSIOLOGI AGRIBISNIS

Kausar, S.Sos., M.Si

[kausar@lecturer.unri.ac.id](mailto:kausar@lecturer.unri.ac.id)

### 1.1 Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin hari semakin pesat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kebutuhan masyarakat akan adanya ilmu yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sangat diperlukan di era saat ini untuk memudahkan dalam memahami fenomena sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Kemunculan ilmu sosiologi agribisnis merupakan ilmu yang relatif baru apabila dibandingkan dengan ilmu sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian. Munculnya ilmu sosiologi agribisnis diharapkan dalam menjawab tantangan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan dan kondisi sosial yang ada di masyarakat agribisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Sosiologi agribisnis diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dalam masyarakat agribisnis. Sosiologi agribisnis berbeda dengan sosiologi pedesaan ataupun dengan sosiologi pertanian. Maka dengan adanya ilmu sosiologi agribisnis ini akan dapat membantu dalam memberikan kontribusi untuk mempelajari dan menganalisis lebih mendalam tentang kehidupan sosial dalam masyarakat agribisnis.

## 1.2 Pengertian Sosiologi Agribisnis

Sosiologi agribisnis merupakan gabungan dua ilmu, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu agribisnis. Sosiologi agribisnis merupakan cabang baru dari ilmu sosiologi. Kadang banyak pihak yang menyamakan antara sosiologi agribisnis dengan sosiologi pertanian atau dengan sosiologi pedesaan. Padahal ketiga ilmu sosiologi tersebut berbeda khususnya pada fokus objek kajian dan ruang lingkup ilmunya serta kontribusi dalam kehidupan masyarakat pertanian.

Sosiologi dilihat dari asal kata pertama sosiologi, berasal dari kata *socios* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti teman atau sahabat serta *logos* berarti ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani. Maka secara sederhana dari asal kata sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang teman atau masyarakat.

Beberapa ahli sosiologi memberikan kontribusi pemikiran dalam membuat definisi atau pengertian sosiologi. Setiap ahli memberikan definisi pengertian sosiologi berdasarkan penelitian dan pemahaman dalam melihat fenomena sosial dalam kehidupan Masyarakat. Soekanto (2017) dalam buku "Sosiologi Suatu Pengantar" menguraikan pendapat para ahli ilmu sosiologi tentang definisi sosiologi Berikut ini beberapa pendapat ahli sosiologi dalam mendefinisikan pengertian sosiologi.

### 1. Roucek dan Warren

Mendefinisikan sosiologi suatu ilmu pengetahuan sosial yang memfokus objek kajian tentang hubungan antara individu atau manusia dalam suatu kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat.

### 2. Pitirim Sorokin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ragam gejala-gejala sosial dalam masyarakat.

3. Auguste Comte

Merupakan salah seorang tokoh utama ahli sosiologi mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki sifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala sosial dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kepada pemikiran yang ilmiah dan rasional yang dilakukan suatu masyarakat.

4. Max Weber

Mendefinisikan sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menganalisis tindakan-tindakan sosial manusia dalam kehidupan masyarakat.

5. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi

Ilmu sosial yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, dan termasuk juga objek kajian tentang perubahan sosial dalam masyarakat.

Menurut Durkheim dalam Soenarto (2004) mengatakan bahwa sosiologi ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang berada diluar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Menurut Murdiyanto (2020) bahwa sosiologi ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dalam berbagai aspek.

Maka berdasarkan pandangan para ahli tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ilmu sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari interaksi sosial masyarakat, struktur sosial dan mempelajari dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian pengertian tentang ilmu agribisnis. Dilihat dari asal kata, maka agribisnis berasal gabungan dari dua kata,

yaitu “agri” dan “bisnis”. Agri secara harfiah berarti pertanian sedangkan bisnis berarti usaha mencari keuntungan. Maka agribisnis merupakan suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari gabungan ilmu pertanian dan ilmu bisnis. Agribisnis didefinisikan sebagai ilmu mempelajari bisnis atau usaha dalam bidang pertanian sebagai sistem kegiatan yang melibatkan tahap produksi, pengolahan dan distribusi serta pemasaran produk pertanian.

Seperti halnya dengan pengertian sosiologi banyak dikemukakan berbagai para ahli, demikian pula dengan pengertian agribisnis juga banyak dikemukakan para ahli dilihat dari berbagai sudut pandang berdasarkan penelitian, pengalaman dan pengetahuan dari para ahli tentang agribisnis.

1. E. Paul Roy mengatakan agribisnis adalah usaha bisnis dalam bidang pertanian yang mengikat semua kegiatan berhubungan dengan aktivitas seperti produksi, pengolahan dan distribusi produk pertanian yang dilakukan masyarakat.
2. Downey dan Erickson mengatakan agribisnis adalah suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan produk pertanian, seperti pengolahan masukan dan keluaran produksi, mata rantai produksi, pemasaran produk pertanian serta berhubungan dengan kelembagaan agribisnis pertanian.
3. Menurut Davis dan Goldberg (1957) mengatakan agribisnis penjumlahan total dari seluruh kegiatan yang menyangkut manufaktur dan distribusi dari sarana produksi pertanian.
4. Menurut Drillon (1971) mengatakan bahwa agribisnis tidak hanya meliputi aspek produksi namun juga mempelajari manajemen sumber daya pertanian dan pemasaran hasil pertanian

5. Arsyad mengatakan agribisnis adalah merupakan suatu kesatuan aktivitas manusia seperti mata rantai produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian.
6. Sjarkowi dan Sufri mengatakan bahwa agribisnis merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan aktivitas usaha bisnis produksi pertanian dan perusahaan pengolahan hasil pertanian yang dihasilkan masyarakat.

Menurut Krisnamurthi (2020) mengatakan bahwa agribisnis merupakan salah satu bisnis, sektor usaha, bahkan dinyatakan sebagai “megasektor” yang paling banyak menjadi perhatian. Definisi agribisnis menjelaskan bahwa agribisnis memiliki lingkup yang jauh lebih luas dari sekedar pengertian bertani, bercocok tanam, atau pertanian primer. Agribisnis adalah sejumlah usaha yang terangkai dalam suatu sistem dan terdiri atas beberapa subsistem.

Menurut Arsyad dalam Soekartawi (2010) mengatakan bahwa agribisnis tidak berhubungan dengan pemasaran pertanian saja dalam arti yang lebih luas agribisnis merupakan aktivitas pertanian secara komprehensif, termasuk berhubungan dengan pengolahan hasil pertanian dan produksi pertanian. Menurut Arifin dan Biba (2017) mengatakan bahwa dalam sistem agribisnis harus selalu berupaya memperbaharui siklus hidupnya dengan perbaikan dan inovasi. Tujuannya adalah mempertahankan sistem agribisnis dengan membentuk rantai siklus hidup system agribisnis agar mampu bertahan mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen dan menjadi agribisnis berkelanjutan.

Jadi sosiologi agribisnis gabungan dua ilmu, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu agribisnis. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu sosiologi agribisnis adalah ilmu yang mempelajari

kehidupan sosial masyarakat dalam bisnis di bidang pertanian, khususnya kehidupan sosial masyarakat yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran produk pertanian.

### **1.3 Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan**

Sosiologi pedesaan merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat dan struktur sosial masyarakat khusus di daerah pedesaan. Sosiologi pedesaan tidak hanya fokus pada aspek kehidupan sosial masyarakat pertanian saja, namun sosiologi pedesaan kajian lebih luas lagi mencakup kehidupan sosial masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sosiologi pedesaan juga melihat aspek lain dalam masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, organisasi sosial dan pola kehidupan masyarakat di pedesaan.

Selanjutnya sosiologi pertanian pengetahuan yang mempelajari kehidupan sosial dan hubungan sosial masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat. Sosiologi pertanian juga melihat aktivitas pertanian, bercocok tanam, pemanfaatan teknologi bertani dan interaksi sosial antara masyarakat pertanian dengan lingkungan sekitar. Ada beberapa objek fokus utama sosiologi pertanian, yaitu mempelajari perubahan sosial, kelembagaan sosial, dan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat pertanian.

Menurut Rahardjo (2017) sosiologi pertanian sebenarnya hampir sama dengan sosiologi pedesaan, tetapi hanya sejauh penduduk desa terutama hidup dari pertanian saja. Dalam masyarakat praindustri desa-desa umumnya sangat tergantung kepada sektor pertanian. Pada desa-desa dalam masyarakat industri modern atau sedang berkembang, sektor pertanian tidak menjadi dominan lagi.

Menurut Planck (1990) secara keilmuan sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan perlu dipisahkan. Objek sosiologi pedesaan adalah seluruh masyarakat pedesaan yang terus menerus menetap di desa. Kemudian, objek sosiologi pertanian adalah masyarakat pertanian tanpa memperhatikan tempat tinggal baik di desa ataupun di kota.

#### **1.4 Perbedaan dan Persamaan Sosiologi Agribisnis, Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan**

Secara keilmuan ketiga ilmu sosiologi ini, yaitu sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan merupakan tiga bidang ilmu yang sangat berdekatan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Masing-masing ilmu sosiologi tersebut memiliki objek kajian yang berbeda, namun juga memiliki satu kesamaan hampir sama-sama fokus secara umum mempelajari kehidupan sosial masyarakat pertanian. Berikut ini adalah perbedaan antara sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan.

##### **1. Sosiologi agribisnis**

Objek kajian fokus kepada interaksi sosial dan relasi sosial manusia yang terjadi dalam bidang usaha bisnis di sektor pertanian dalam kehidupan Masyarakat. Berhubungan dengan pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian, interaksi sosial masyarakat agribisnis, kelompok sosial dan mobilitas sosial dalam masyarakat agribisnis, kepemimpinan dan kelembagaan masyarakat agribisnis, dan perubahan sosial masyarakat agribisnis.

##### **2. Sosiologi pertanian**

Mempelajari tentang aktivitas hubungan sosial masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Khususnya berkaitan dengan perubahan sosial petani,

kelembagaan pertanian, penggunaan teknologi pertanian, interaksi sosial antara petani dan lingkungan pertanian. Tanpa membedakan aktivitas pertanian di desa dan di kota.

### 3. Sosiologi pedesaan

Kosentrasi kepada struktur sosial dan kehidupan sosial masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Fokus kajian tentang aktivitas sosial masyarakat tidak hanya pada kehidupan sosial masyarakat pada bidang pertanian saja, namun juga berhubungan dengan aktivitas masyarakat dalam aspek organisasi sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sosiologi pedesaan cakupan lebih luas tanpa membedakan aktivitas masyarakat pada bidang pertanian saja. Namun sosiologi pedesaan membatasi fokus pada kehidupan sosial masyarakat di pedesaan.

Ketiga ilmu ini, sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan sering kali sulit dibedakan secara jelas karena ketiga ilmu ini sangat dekat dan saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling tumpang tindih dalam fokus kajian kehidupan masyarakat agribisnis, masyarakat pertanian dan masyarakat pedesaan. Setiap ilmu memiliki fokus dan perspektif yang unik dalam melihat suatu realitas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Setelah melihat perbedaan antara ilmu sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan. Maka akan dilihat persamaan antara ketiga ilmu tersebut yang memiliki keterikatan dan persamaan antara ilmu yang satu dengan ilmu lainnya dalam memahami kehidupan sosial dalam masyarakat agribisnis, masyarakat pertanian dan masyarakat pedesaan. Berikut ini adalah persamaan antara sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan.

1. Fokus pada kehidupan sosial masyarakat

Dimana sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan memusatkan perhatian pada masyarakat, baik masyarakat agribisnis (masyarakat berusaha bisnis pertanian), masyarakat pertanian, dan masyarakat pedesaan.

2. Interaksi sosial

Ketiga ilmu ini sama-sama memiliki fokus kajian pada proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat. Adanya interaksi sosial dan proses sosial sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat agribisnis, masyarakat pertanian dan masyarakat pedesaan

3. Perubahan sosial

Sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian, dan sosiologi pedesaan sama-sama memiliki fokus utama ketertarikan dan konsentrasi pada perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial sangat berkontribusi memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat pertanian dan pedesaan, termasuk masyarakat yang melakukan bisnis dalam bidang pertanian.

4. Pembangunan berkelanjutan

Sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian, dan sosiologi pedesaan memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman dan mendukung perlu adanya pembangunan berkelanjutan dalam membangun pertanian dan pedesaan. Tanpa adanya pembangunan berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan pedesaan.

5. Faktor dari lingkungan

Sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian, dan sosiologi pedesaan melihat bahwa faktor lingkungan, khususnya lingkungan fisik dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan

sosial baik dalam bidang pertanian dan kehidupan sosial masyarakat di pedesaan.

Persamaan utama antara sosiologi agribisnis, sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan adalah fokus objek kajian pada interaksi sosial dan kehidupan sosial pada sektor pertanian dan pedesaan dalam masyarakat. Dalam implementasinya ketiga ilmu ini saling melengkapi dan memahami kompleksitas dalam hubungan sosial masyarakat di bidang pertanian dan di pedesaan.

### **1.5 Kontribusi Sosiologi Agribisnis**

Sosiologi agribisnis memiliki berbagai kontribusi dalam pembangunan pertanian yang meliputi berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kontribusi besar sosiologi agribisnis dalam pembangunan pertanian:

1. Peningkatan aspek pemberdayaan masyarakat  
Sosiologi agribisnis berperan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat agribisnis, khususnya dalam peningkatan kapasitas, kapabilitas dan partisipasi masyarakat agribisnis dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan
2. Peningkatan Kelembagaan petani  
Sosiologi agribisnis berperan untuk peningkatan kelembagaan petani dan pengembangan organisasi petani yang modern sesuai perkembangan zaman.
3. Kesejahteraan Petani  
Sosiologi agribisnis berkontribusi peningkatan kesejahteraan petani, memberikan pemahaman tentang peningkatan nilai tukar hasil pertanian, pengolahan usaha pertanian, serta peningkatan kualitas produksi hasil pertanian.

4. Peningkatan pengelolaan pada rantai pasok  
Sosiologi agribisnis berkontribusi peningkatan integrasi nilai tambah dan pengelolaan rantai pasok yang baik dan efektif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agribisnis.
5. Adanya reposisi dan revitalisasi  
Sosiologi agribisnis berperan dalam mendukung pembangunan pertanian yang terintegrasikan dengan globalisasi, informasi, teknologi dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan ramah lingkungan. (Sulistiyowati, 2012).
6. Peningkatan pengembangan teknologi  
Sosiologi agribisnis berkontribusi dalam melakukan inventarisasi kebutuhan manusia akan teknologi dan sumber daya alam. Maka dengan demikian sosiologi agribisnis membantu masyarakat dalam menerapkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agribisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, & Biba, M. A. (2017). *Pengantar Agribisnis* (A. Rahim (ed.); Issue Januari). Muhajid Press.
- Davis, J. H., & Goldberg, R. A. (1957). A Concept of Agribusiness. In *Graduate School of Business Administration*. Division of Research Harvard University.
- Drillon, J. J. (1971). *Introduction to Agribusiness Management*. Asian Productivity Organization, 1971.
- Krisnamurthi, B. (2020). *Pengertian Agribisnis*. Puspa Swara.

- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Planck, U. (1990). *Sosiologi Pertanian*. Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo. (2017). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi. (2010). *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soenarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sulistiyowati, L. (2012). *Peranan Ilmu Sosiologi/ Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian Masa Depan di Indonesia*. Universitas Padjadjaran.

## **BAB 2**

# **MASYARAKAT AGRIBISNIS**

**Siti Masithoh, S.Pt., M.Si**

[sitimasitoh@unida.ac.id](mailto:sitimasitoh@unida.ac.id)

### **2.1. Definisi Masyarakat**

Objek kajian sosiologi agribisnis adalah masyarakat agribisnis. Kajian Sosiologi Agribisnis menempatkan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang memiliki suatu sistem tertentu dan pengorganisasian dalam rangka interaksi sesamanya. Terdapat sejumlah definisi masyarakat antara lain menurut Mc. Iver and Page; bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan golongan, pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Sedangkan menurut Ralph Linton (1936), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sementara itu Selo Soemardjan (1964), Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Tidak semua kumpulan manusia dapat dikatakan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1990), terdapat empat unsur yang menjadi ciri suatu Masyarakat, yaitu :

1. Manusia yang Hidup Bersama. Saling mengenal, tolong-menolong-gotong royong demi kelangsungan hubungan sosial sesama anggota masyarakat.
2. Mereka bercampur untuk waktu yang cukup lama. Berinteraksi menghasilkan suatu pola kebudayaan tertentu,

seperti berupa aturan bersama, sanksi-penghargaan, pola sikap-tindakan bersama menghadapi tekanan komunitas luar dll.

3. Mereka sadar sebagai suatu Kesatuan. Kehidupan yang terjalin demikian lama, mampu membentuk *sense of belonging* (rasa memiliki sesamanya), dengan demikian setiap anggota masyarakat merasa satu bagian, saling tergantung dengan suatu jejaring hubungan sesama anggota komunitas yang diwujudkan dalam identitas sebagai warga komunitas tertentu.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Oleh karena telah tinggal bersama dalam waktu lama dan telah membentuk suatu kesatuan hidup bersama, maka komunitas tersebut membentuk satu sistem hidup bersama, terintegrasi sebagai suatu kesatuan warga komunitas.

Berbagai definisi masyarakat tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa masyarakat merupakan kumpulan dan kesatuan manusia yang merupakan sistem pengaturan bagaimana manusia bertingkah laku dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kebudayaan yang dihasilkan oleh kumpulan manusia yang telah hidup lama, merupakan suatu sistem pengaturan yang tidak dapat dilepaskan (ditinggalkan) dengan mudah karena sudah terinternalisasi (*internalization*) pada setiap anggota masyarakat tersebut melalui proses *sosialisasi*.

## **2.2. Masyarakat sebagai Sistem Sosial**

*System* (sistem) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1988) merupakan seperangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, merupakan suatu susunan yang teratur dari pandangan, teori,

azas dan metode. Sedangkan pengertian sistem sosial adalah “*any set of interrelated elements which, as they work and change together, may be regarded as a single unity*” (Honet, 1977).

Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, termasuk juga dalam hal ini masyarakat Agribisnis. Masyarakat sebagai sistem sosial terdiri dari bagian-bagian yang “saling berhubungan” (berinteraksi fungsional). Sistem sosial terdiri dari pola Kebudayaan (Orientasi Nilai Budaya) dan Struktur Sosial, berada dalam keseimbangan dinamis (*dynamic Equilibrium*). Perubahan mengenai sesuatu bagian akan mempunyai efek atau dampak pada bagian lainnya (Sajogyo, 1976) dikutip oleh Anonim (2003).

Menurut Loomis and Beegle; dikutip oleh Anonim (2003), suatu sistem sosial mencakup aspek Orientasi Nilai Budaya (*cultural value orientation*) dan Struktur Sosial (*Social Structure*). Orientasi nilai; digambarkan sebagai suatu kerangka pemikiran yang memberikan arahan kepada warga masyarakatnya dalam berperilaku (bersikap dan bertindak) dalam kehidupan sosial. Orientasi nilai ini merupakan suatu aspek yang abstrak dari kebudayaan (dalam kaitannya dengan sistem pengaturan berperilaku dikenal juga sebagai *social institutions*-kelembagaan sosial).

Sedangkan struktur sosial merupakan suatu pola hubungan sosial dimana perilaku-perilaku sosial terjadi dan diarahkan oleh orientasi nilai tersebut. Struktur berubah apabila orientasi nilai berubah. Sebagai contoh masyarakat petani-nelayan yang semula berorientasi nilai “apa yang dihasilkan hari ini, dimakan hari ini” (konsumtif) dengan struktur masyarakat petani-nelayan secara umum dominan bermatapencaharian petani-nelayan dan tingkat pendidikan rendah dengan pola peran pengambilan keputusan dominan pria. Setelah terjadi perubahan orientasi nilai kepada “hidup

dimasa datang, tergantung bagaimana memanfaatkan pendapatan hari ini, harus ada perubahan menuju kehidupan yang lebih baik”, maka struktur masyarakatnya berubah dimana terdapat keragaman mata pencaharian, pendidikan anak menjadi prioritas, suami tidak lagi dominan memutuskan keperluan keluarga, karena isteri tidak lagi tergantung pendapatan suami dari hasil tangkap.

Di dalam perkembangannya interaksi sesama manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, kemudian timbul suatu ikatan-ikatan sosial yang berbeda diantara sesama manusia ketika menghadapi berbagai kebutuhan dan tingkat pelayanan yang berbeda pula. Ikatan sosial inilah yang oleh Emile Durkheim dikutip oleh Anonim (2003), digunakan sebagai pembeda antar interaksi masyarakat desa dan kota, yang kemudian menimbulkan istilah *Community* dan *Society*.

Menurut *E Durkheim*, *Community* merupakan ciri “Ikatan Sosial” *mechanistic* dimana terdapat hubungan saling tergantung yang otomatis saling mengisi tanpa harus diatur secara rinci. Sedangkan *Society* merupakan ciri suatu “Ikatan Sosial” *Organic* yaitu adanya upaya untuk mengorganisir hubungan tersebut secara detail (rinci) agar berjalan secara teratur sesuai harapan. Di dalam masyarakat kota (*Society*), hubungan sosial akan berjalan apabila terdapat kesesuaian fungsi (*social role*) masing-masing anggota masyarakat yang berinteraksi, untuk suatu aktivitas tertentu. Hal ini yang melahirkan istilah Integrasi Fungsional, suatu aktivitas akan berjalan manakala masing-masing pihak berperan sesuai dengan peran/fungsi masing-masing dalam kesatuan yang terpadu.

Pekerjaan sektor pertanian di pedesaan dapat dikerjakan oleh petani dengan sistem pengelolaan sederhana, yang menempatkan seorang petani berperan multi fungsi; sebagai

petani pemilik, penggarap, pekerja sekaligus manajer, produsen sekaligus konsumen, dengan tingkat ketergantungan yang rendah dalam pemenuhan input-input (tenaga kerja, pupuk, pemberantas hama-penyakit, air dll.) pada sistem pertanian tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya tuntutan spesialisasi peran seseorang agar mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kalaupun terdapat dukungan (partisipasi peran) orang lain, aktivitas tersebut tidak diorganisir secara khusus, dapat terjadi secara sewajarnya, berupa gotong-royong ataupun tolong-menolong dengan tidak dilandasi kepentingan (*pamrih, interest*) individu. Artinya kalaupun tidak terdapat pertolongan tetangganya, aktivitas tersebut tetap dapat dijalankan keluarga petani tersebut.

Bandingkan aktivitas masyarakat desa tersebut diatas dengan kondisi aktivitas di kota berikut ini. Interaksi antara orang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan/aktivitas sistem transportasi kota. Sistem transportasi kota mensyaratkan adanya sub-sub sistem yang diorganisir, saling menunjang satu sama lainnya agar dapat dijalankan. Paling tidak terdapat sub sistem alat/moda angkutan, sub sistem terminal, sub sistem pengaturan lalu-lintas, sub sistem aturan berkendara, dan sub sistem aturan prasarana penunjang (jalan, jembatan, halte, Lampu lalu lintas dll.) Sistem transportasi tersebut hanya dapat berjalan manakala seluruh sub sistem berfungsi dan saling mendukung. Artinya diperlukan pengaturan dan pengelolaan (manajemen) secara spesifik (spesialisasi), masing-masing berperan secara terpadu (*integrated*) sesuai fungsinya, dan apabila salah satu sub sistem terganggu akan terganggu sistemnya secara keseluruhan. Anda dapat menganalisis apa yang terjadi dan bagaimana menguraikan permasalahannya, apabila salah satu sub

sistemnya bermasalah. Contoh, apabila sopir Angkutan Kota Bogor menolak masuk terminal Baranangsiang, atau tidak terorganisir dan tidak terencana jumlah angkutan dan prasarana jalan/jembatan, dapat digambarkan bagaimana dampak ikutannya (*multiplier effect*) apakah berupa kemacetan, kecelakaan, terganggunya pola kerja karena keterlambatan, kerugian ekonomi yang tidak kecil dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui penduduk Kota Bogor yang sangat tinggi mobilitas sirkuler ke Jakarta-Tangerang-Bekasi-Depok.

Tentu saja apa yang digambarkan di pedesaan adalah kondisi dimana desa sangat terbatas atau tidak memperoleh interaksi dengan dunia luar, sehingga tidak ada ketergantungan dengan pihak luar desa, tidak terdapat kebutuhan yang berasal dari luar desa yang harus dipenuhi oleh orang desa tersebut. Pada kasus angkutan perkotaan diatas, memberikan gambaran begitu tergantungnya antar sesama sub sistem, hubungan yang terjadi secara timbal balik tidak dapat dilepaskan antara yang satu dengan yang lainnya.

Prinsip pembentuk kesatuan manusia dalam suatu desa (komunitas) dapat terjadi secara sengaja didasari oleh beberapa hal, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar (1950) seperti dikutip oleh Koentjaraningrat (1964) adalah Hubungan tinggal dekat (*Teritorial*), Hubungan Kekkerabatan (*Geneologis*), Hubungan karena Tujuan-tujuan khusus (*misal pembentukan desa wisata, desa industri kecil dll.*) dan "Ikatan dari atas Desa" (*contoh pembentukan desa transmigrasi*). Dalam kenyataan kehidupan masyarakat pedesaan tidak hanya di Indonesia maupun di luar Indonesia, dapat dilihat bahwa kadang-kadang salah satu dari keempat prinsip tersebut yang menentukan dan menguasai seluruh lapangan kehidupan masyarakat desa, tetapi sering kita jumpai juga bagaimana dua, tiga atau empat prinsip tersebut yang menentukan dan

menguasai berbagai lapangan tertentu dalam kehidupan masyarakat desa.

Bagaimana dengan perkotaan? Pembentukan komunitas kota (*Society*) pada dasarnya lebih ditentukan oleh ikatan *organic*, dimana ketersediaan orang-orang untuk membentuk suatu ikatan kesatuan komunitas lebih didasari suatu tujuan tertentu atau kepentingan tertentu. Sehingga untuk membentuk suatu kesatuan (*Unity*) diperlukan pengorganisasian yang terencana dan jelas, bagaimana hak-kewajiban yang terukur. Namun demikian kota-kota di Indonesia berkembang dari pedesaan yang memperoleh tekanan pembangunan dan kebutuhan untuk perubahan, sehingga tidak terlepas dari nilai budaya pedesaan (yang mengutamakan kerukunan-ikatan mekanik). Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kotapun tidak dapat dilepaskan dari dasar geneologis, teritorial maupun "ikatan atas Desa" (tekanan kepentingan pemerintah).

Berdasarkan ciri struktur sosial, beberapa perbedaan antara *community* dan *society*, antara lain: *Society* menunjukkan pola hubungan yang bersifat impersonal, tidak mementingkan pribadi tetapi lebih mementingkan posisi status individu dan peranannya dalam kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan *community* menunjukkan pola hubungan yang bersifat personal, ikatan batin (kedekatan secara personal), kenal-mengenal yang didasari oleh hubungan sosial kemasyarakatan.

Menurut Ferdinand Tonnies; dikutip oleh Anonim (2003) *Community* merupakan kumpulan sejumlah orang yang terbentuk oleh kedekatan tempat tinggal (*Gemeinschaft by place*) atau ikatan darah (*Gemeinschaft by blood*). *Community* merupakan *Gemeinschaft* dimana hubungan sosial yang terjadi cukup akrab, kekal dan berdasarkan pengertian yang sama

diantara mereka dalam masyarakat tersebut. Selain itu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan (*ascribe status*) dengan peranan khusus dan selaras dengan yang lain sehingga konflik peranan dapat dihindarkan. Anggota *community* relatif tidak bergerak (berubah) atau mobilitas fisik (jarang melakukan *migration*) maupun mobilitas sosial (relatif terbatas terjadinya *social sinking* atau *social climbing*). Sedangkan *society* merupakan kumpulan sejumlah orang yang terbentuk lebih didasari oleh kepentingan atau tujuan tertentu (*Gesellschaft*) dan kedudukan sosial seseorang berdasarkan kapasitas kemampuan individu (*achieve status*). *Gesellschaft* bercirikan skala besar, bersifat perorangan /individualitas dengan ikatan-ikatan yang dilandasi kontrak (perjanjian).

Menurut Koentjaraningrat (1990), *community* diterjemahkan sebagai komunitas; Suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas dengan ciri: kesatuan wilayah, kesatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas dan rasa loyalitas terhadap komunitas sendiri. Erich Wolf, membedakan kesatuan orang apakah termasuk kedalam kategori *community* atau *society* berdasarkan sejauhmana keterlibatan pihak-pihak tertentu apakah dua pihak timbal balik (*dyadic*) dan *one stranded* (satu kepentingan yang sama) untuk *community*. Sedangkan *society* menunjukkan keterlibatan banyak pihak (*polyadic*) dan *multi stranded* (banyak kepentingan yang terpecah-pecah atau berbeda). Wolf, dalam kajian masyarakat pada suatu komunitas perdesaan memberikan pemahaman tentang *Peasant* (seperti halnya T Sahlin). *Peasant* merupakan komunitas yang ada di perdesaan dengan segala aktivitas sosial ekonominya, baik pertanian, jasa maupun perdagangan yang sederhana dalam suatu batasan

kebutuhan *subsistence*. Jadi *Peasant* tidak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang petani.

Robert Redfield, dikutip oleh Anonim (2003) dengan pendekatan budaya, dimana terdapat dominasi aspek kebudayaan *Great tradition* terhadap *Little tradition*, menempatkan pedesaan dibawah “bayang-bayang kekuasaan” kota. Kota (pusat kerajaan, pusat kekuasaan pemeritahan) merupakan acuan berperilaku/bertindak bagi masyarakat desa/pedesaan. Masyarakat pedesaan dikatakan sebagai *Folk Society*, suatu komunitas yang telah menjadi bagian (telah berhubungan dengan) masyarakat kota, sehingga masyarakat pedesaan merasakan diri mereka berada dibawah suatu sub kultur lain yang lebih luas (masyarakat kota). Kota dianggap sebagai pusat pemikiran dan pusat lembaga yang mengintrodusir tehnologi baru bagi masyarakat pedesaan.

Sebagai contoh para migran (dari desa) yang untuk sementara waktu bermukim dan bekerja di kota (“mboro” istilah di masyarakat Jawa Timur atau “truko” istilah di masyarakat Jawa Tengah) yang kemudian pulang (untuk membawa “remitan”, suatu hasil kerja yang dibawa ke daerah asal migran), tidak hanya membawa oleh-oleh dari kota berupa uang kerja, akan tetapi juga membawa budaya ke pedesaan untuk *di-difusikan* kepada masyarakat desa asal.

Proses Difusi budaya selanjutnya terjadi berupa penerimaan (peniruan/imitasi) apa yang dibawa oleh migran tersebut, karena mereka berpandangan sesuatu yang berasal dari kota lebih mulia, lebih agung sehingga menjadi panutan.

Seperti halnya Robert Redfield, Joseph Himes yang mengikuti teori Robert Redfield (*Great Tradition-Little tradition*), menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan masyarakat desa terhadap masyarakat kota. Ketergantungan desa terhadap kota dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu:

1. Geografis; Desa berlokasi di sekitar suatu pusat kota, lokasi-lokasi yang strategis (aksesibilitas mudah) diperuntukkan bagi pembangunan kota.
2. Kultural; secara material (lembaga, organisasi dll.) merupakan “bawahan” dari suatu pusat di kota; secara non material (wewenang, birokrasi dll.) harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di kota. Contoh penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah menghilangkan sejumlah kesatuan komunitas khas daerah (seperti *nagari* di Sumatera Barat, dengan nasionalisasi desa).
3. Ekonomi; desa secara histories merupakan “*hinterland*” wilayah penyangga kota, yang menyediakan produk pertanian sebagai bahan mentah untuk kepentingan industri di kota, menyediakan tenaga kerja, pensuplai modal (lewat aliran dana dari desa ke kota). Selain itu secara ekonomi desa (dengan populasi besar) merupakan pasar potensial bagi produk-produk industri kota.
4. Sosiologis; introduksi program melalui lembaga cenderung merusak atau menghilangkan peran-peran (fungsi) lembaga yang telah lama ada di desa. Hal ini terjadi karena ada tekanan (*pressure*) secara institusional bahwa desa harus menerima (tanpa dapat atau diberi peluang menolak) inovasi dari kota, yang cenderung mengabaikan tata-nilai yang telah melembaga di desa. Contoh hilangnya fungsi kelembagaan lumbung padi, panen padi sistem “*bawon*”, setelah datangnya inovasi Revolusi Hijau (*Green Revolution*) dan masuknya Ekonomi Uang/Ekonomi Pasar ke pedesaan.

Bagaimana dengan konsep masyarakat agraris dan masyarakat agribisnis? Berlandaskan pendefinisian masyarakat, maka konsep masyarakat agraris adalah suatu

komunitas yang mempunyai aktivitas yang dilandasi budaya pengelolaan tanaman/hewan (budidaya pertanian) yang sangat tergantung kepada lahan secara sosial ekonomi. Pada masyarakat ini, terdapat hubungan yang khas antara orang dengan lahan, dimana lahan menjadi dasar keterikatan orang (petani) dengan usahatani keluarga, dan penguasaan lahan menjadi ukuran penentuan sistem stratifikasi sosial masyarakat.

Pada masyarakat agraris ini memunculkan dua pola kebudayaan dalam kaitannya dengan orientasi pemenuhan kebutuhan yaitu orientasi kepada kecukupan keluarga tanpa adanya niatan untuk bertukar secara komersial dengan sesamanya atau dengan komunitas luar (*subsistence life of living*) dan orientasi produksi untuk pemenuhan kebutuhan pasar (*commercial orientation, profit orientation*).

Didalam kajian evolusi budaya pertanian, Kluckhohn membuat kerangka analisis orientasi budaya masyarakat pertanian berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan manusia. Terdapat lima unsur (elemen) masalah kehidupan yang dapat dianalisis dengan tahapan evolusioner perkembangan orientasi manusia pertanian, seperti tampak dalam Tabel 1, berikut ini.

**Tabel 1** Kerangka Kluckhohn Mengenai Lima Masalah Hidup yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia

Masalah Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
	Hakekat dan Sifat Hidup	Hidup itu Buruk	Hidup itu Baik
Hakekat Karya	Karya itu untuk Hidup	Karya itu untuk Kehidupan	Karya untuk menambah Karya

Hakekat Kedudukan Manusia dalam Ruang Waktu	Masa lalu	Masa Kini	Masa Depan
Hakekat Hubungan Manusia dengan Alam	Tunduk terhadap Alam	Mencari Keselarasan dengan Alam	Menguasai Alam
Hakekat Hubungan Manusia dengan Manusia	Memandang ke Tokoh Atasan	Mementingkan rasa Ketergantungan kepada sesamanya	Berjiwa Individualistik

Pada kehidupan masyarakat pedesaan pertanian yang menetap, seperti pertanian padi sawah (dan palawija) yang berorientasi pemenuhan kebutuhan keluarga, terkait dengan analisis orientasi budaya diatas, tampak bahwa masyarakat pedesaan pertanian ini berada pada tahapan kedua dari evolusi orientasi nilai budaya suatu komunitas. Pada tahapan ini terdapat orientasi (pandangan) pada pemenuhan kebutuhan kehidupan masa kini, relatif selaras dengan alam dan dominan bekerjasama sesama petani (gotong royong-tolong menolong).

Sedangkan untuk pertanian menetap yang tidak tergantung secara dominan dengan pertanian tanaman pangan, tetapi pertanian pangan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pasar atau sudah beralih ke pertanian hortikultura yang cenderung komersial, secara analisis berada tahap ketiga. Pada tahap ini, manusia petani telah berorientasi untruk menguasai sumberdaya alam- tehnologi dan ilmu pengetahuan, bahkan dengan orientasi keuntungan petani

telah berani menanggung resiko dan ketidakpastian baik alam maupun pasar (ekonomi). Orientasi masa depan tergambar dari inovasi yang berkembang dan jiwa individualistik berkembang demi kemajuan sosial ekonomi mereka. Pada tahap evolusi orientasi nilai budaya ketiga inilah petani dan pertaniannya telah mengenal dan mengaplikasikan prinsip-prinsip bisnis dalam budidaya dan perdagangan produk pertanian. Didalam khazanah pertanian modern dikenal sebagai masyarakat agribisnis.

### **2.3. Masyarakat Agribisnis**

Konsep Masyarakat Agribisnis, muncul dari pemahaman tentang masyarakat yang sistem produksi pertaniannya (pertanian dalam arti luas mencakup: pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan (musiman-tahunan), kehutanan, perikanan dan peternakan) berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan pasar. Suatu masyarakat yang berorientasi kepada sistem nilai pasar bagi produk pertanian yang dihasilkan, sehingga memiliki pola pikir bagaimana produk pertanian dapat dihasilkan mencapai surplus dan mampu bersaing bagi pemenuhan pasar sehingga memperoleh keuntungan, kemudian melahirkan sikap dan tindakan bertani yang efisien, disiplin, jujur, pantang menyerah, berani menanggung resiko dan profesional, yang ditindaklanjuti dengan tindakan pengelolaan (manajemen) professional.

Dengan kata lain masyarakat agribisnis merupakan masyarakat pertanian yang tidak hanya berfikir, bersikap dan bertindak sebatas bagaimana melakukan budidaya pertanian, akan tetap sudah berfikir secara sistemik dan holistik (menyeluruh) bahwa aktivitas budidaya yang dilakukan tidak terlepas dari berfungsinya sub sistem-sub sistem lain dalam

sistem agribisnis (sistem agribisnis mencakup *sub system Input factor, farming, processing, marketing and distribution, and supporting-services*).

Masyarakat agribisnis, memiliki pola berfikir yang dilandasi orientasi nilai *comparative or / and competitive advantage*. Sehingga anggota masyarakat bersikap progresif dalam memandang potensi sumberdaya yang dimiliki. Artinya bagaimana sumberdaya yang dimiliki dipandang sebagai *asset* yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan. Pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dilakukan dengan pertimbangan *opportunity cost* untuk suatu investasi dengan pandangan *risk and uncertainty* harus dihadapi. Didalam masyarakat agribisnis, kemampuan untuk “membaca peluang pasar” yang ditindaklanjuti dengan langkah (tindakan) menginvestasikan sumberdaya untuk bersaing memproduksi dan memasarkan barang dan jasa, baik atas dasar keunggulan potensi dibanding pesaingnya maupun atas dasar keunggulan *technology/design/service*. Membahas tentang masyarakat agribisnis, sangat erat kaitannya dengan kegiatan industri.

#### **2.4. Masyarakat Industrial**

Masyarakat industri merupakan suatu konsep komunitas (lebih tepat *society* karena umumnya berada di perkotaan) yang secara struktur maupun orientasi nilai budayanya telah memberikan gambaran masyarakat berteknologi modern, dengan tingkat pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan tinggi, pola pikir dan pola tindak didasari oleh nilai-nilai rasionalisme, menjunjung tinggi hak individual dan profesionalisme.

Dengan kata lain, masyarakat industri adalah masyarakat yang berbudaya industri. Beberapa penciri

masyarakat yang berbudaya industri seperti yang dikemukakan oleh Prof. Lukman Soetrisno (2004), antara lain adalah:

1. Ciri rasionalisme yang tinggi dalam arti kemampuan manusia untuk melihat segala fenomena yang ada di alam dalam konteks obyektivitas ilmiah;
2. Ciri kreativitas yang tinggi. ciri ini memberikan gambaran bahwa budaya industri yang tercermin dari tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat terpicu untuk menciptakan suatu inovasi yang sangat variatif untuk mengatasi kendala keterbatasan sumberdaya, sehingga tercapai produktivitas tinggi dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya terbatas tersebut;
3. Ciri "comitment" dalam arti tekad untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tuntas dan mempertahankan sesuatu yang dinilai secara rasional dan dirasakan benar;
4. Adanya tingkat obyektivitas pelaksanaan dan ketaatan pada hukum yang tinggi; terkait dengan ciri komitmen diatas, maka pelaku bisnis dalam masyarakat industri harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku, harus berani bertanggungjawab secara hukum baik dalam transaksi pasar, dalam proses produksi, maupun dalam aktivitas industri lainnya.
5. Adanya toleransi yang tinggi atas perbedaan etnis dan agama; Di dalam masyarakat industri bekerja dan berinteraksi sesamanya dalam kerangka hubungan yang rasional, sehingga perbedaan-perbedaan individu yang tidak terkait dengan proses produksi ekonomi tidak boleh mempengaruhi kinerja industri.
6. Kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Masyarakat industri dalam proses produksi-konsumsi harus

memperhatikan keberlangsungan sumberdaya secara berkesinambungan. Sikap dan perilaku yang bermuara kepada pentingnya pelestarian sumberdaya, baik dalam tataran jangka pendek maupun jangka panjang: pemanfaatan sumberdaya yang efisien dan efektif, tidak eksploitatif. Selain itu bagaimana mendisain penanganan limbah yang tidak mencemari lingkungan, bahkan bagaimana mendisain pembangunan industri yang menghitung resiko bencana yang kemungkinan ditimbulkan oleh industri tersebut.

Selanjutnya Prof Lukman Soetrisno juga mengisyaratkan bahwa masyarakat industri (berbudaya industri) juga harus didukung oleh suatu pemerintahan yang berbudaya industri, yaitu suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemeritahan demikian sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak proses transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial. Dapat diinterpretasikan bahwa beliau menempatkan esensi sistem pemerintahan yang secara berimbang mampu menempatkan kepentingan pemilik modal (kapitalis) dengan kepentingan masyarakat (rakyat) yang dalam pandangan kapitalis ditempatkan sebagai input produksi. Sistem pemerintahan yang demokratis diharuskan mampu mengikis "pandangan sempit" kaum kapitalis dan menempatkan kedudukan masyarakat (karyawan industri) sebagai sumberdaya manusia yang harus dihargai tinggi baik dari sisi HAM (hak azasi manusia) maupun profesionalitasnya. Suatu hal yang tidak berlangsung pada negara industri dengan sistem pemerintahan sosialis maupun kapitalis.

Penggambaran yang tidak jauh berbeda yang dikemukakan Prof Lukman Soetrisno mengenai ciri (lebih

tepat syarat) pembentukan masyarakat industri di Indonesia yang tidak boleh berciri murni kapitalis maupun ciri sosialis. Keenam ciri yang dituntut keberadaannya dalam masyarakat industri, adalah cerminan bahwa ciri tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Artinya dalam proses modernisasi yang ditandai oleh peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai agama. Rasionalitas yang dituntut adalah obyektivitas ilmiah yang tidak boleh dilandasi oleh materialisme buta. Kreativitas yang digambarkan dengan makin tingginya inovasi, tetap harus memperhatikan dan tunduk kepada kawasan atau kaidah agama dan tidak berlandaskan pada pertimbangan ilmiah semata. Hal ini terkait dengan tuntutan toleransi yang tinggi kepada sesama umat dalam menciptakan, mengusahakan dan mengelola industri.

Suatu industri didirikan dan diciptakan untuk tidak boleh melanggar kaidah semua agama. Artinya penciptaan industri harus tunduk kepada etika bisnis dan etika industri di satu sisi dan etika agama di sisi lainnya. Demikian pula terkait dengan ciri komitmen masyarakat industri dituntut secara serius menyelesaikan suatu pekerjaan dengan iktikad baik, dengan ikrar atas nama sang pencipta sehingga berdiri diatas kebenaran hakiki sesuai norma kaidah agama. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat industri yang diinginkan berkembang di Indonesia adalah masyarakat industri yang pertanggungjawabannya mencakup dunia dan akhirat.

Apa yang disitir oleh Prof. Soetrisno (2004) menjadi penting mengingat dalam era industrialisasi terjadi perubahan pola sikap dan tindakan dimana menurut Dharmawan (1986) bahwa masyarakat industri berpandangan luas, obyektif dan optimis tanpa meninggalkan kepercayaan dan sistem nilai yang ada serta menghargai setiap perubahan yang terjadi

khususnya dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat berfikir positif tentang kemajuan, bahkan bekerja dipandang sebagai sesuatu yang mutlak dikerjakan. Namun demikian perlu dicermati bahwa perubahan sikap dan tindakan terutama terkait dengan kepercayaan (agama) karena masyarakat industri berpandangan luas serta tidak fanatik (terhadap agama), hal inilah yang dipandang sebagai kalangan cenderung melahirkan sekularisme.

Sekularisme menunjukkan bidang kehidupan yang penting seperti bekerja, berkarier, profesionalisme dipisahkan dari agama, atau agama tidak lagi mendasari pandangan hidup dan aktivitas individu seseorang. Hal inilah tentunya tidak dibenarkan bagi masyarakat beragama, seperti masyarakat Indonesia.

Hal penting lainnya landasan pemikiran masyarakat industri yang digambarkan Prof. Soetrisno adalah masyarakat industri yang dalam produksi maupun pemanfaatan produk industri tidak melupakan aspek konservasi sumberdaya dan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya. Sehingga industri yang tercipta di Indonesia bukan industri model *Hard industrialization* (yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara) maupun *Catching up industrialization* (yang berkembang di negara berkembang) dimana kedua model tersebut bersifat "*Energy consumptive*" yang sangat eksploitatif dan merusak lingkungan.

Pendekatan lain untuk memahami perbedaan antara masyarakat pedesaan (pertanian) dengan masyarakat kota (industri/jasa) adalah dengan melihat orientasi nilai budaya yaitu suatu pandangan dan harapan yang dilandasi sistem nilai (kaidah-norma budaya-agama) dalam beraktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Landasan pemikiran *Khluakhon* dalam Soekanto (1998) tentang orientasi nilai budaya menjadi

acuan utama pembedaan masyarakat apakah tergolong masyarakat pedesaan (pertanian) atau masyarakat perkotaan (industri). Dharmawan (1986) dengan mengikuti pemikiran Khluckhon, membuat pembedaan karakteristik masyarakat desa dan masyarakat kota sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, Dharmawan (1986) dengan menggunakan kerangka pemikiran Khluckhon, memberikan gambaran bahwa pada masyarakat desa pra industri, secara umum dicirikan oleh suatu kebersamaan sesama anggota masyarakat dalam menghadapi segala tantangan hidup, ketergantungan generasi sekarang terhadap ketentuan sistem nilai generasi sebelumnya (pandangan konservatif), dan ketergantungan terhadap alam yang tinggi. Hal inilah yang dipandang menjadi kendala perubahan masyarakat dalam arti jika tetap dipertahankan dengan “kekolotan” akan sulit menerima suatu inovasi.

Berbeda dengan masyarakat pertanian, masyarakat industri yang dicirikan oleh sistem nilai individual yang tinggi yang mendukung kreativitas penciptaan inovasi, manusia dengan teknologi dan ilmu pengetahuan mampu mengatasi kendala alam (sangat progresif) dan kemampuan *skill* individu menentukan status seseorang. Ciri-ciri masyarakat industri inilah yang mendukung berkembangnya suatu inovasi, sehingga pada masyarakat industri selalu beraktivitas atas dasar logika berfikir rasional.

**Tabel 2** Perbedaan Pandangan Hidup Pada Masyarakat Desa dan Masyarakat Industri

Pandangan Hidup	Masyarakat Desa	Masyarakat Industri
Pandangan terhadap Unit Family	Anggota keluarga bekerjasama untuk mencapai hasil (produksi) sekedar untuk hidup ( <i>survival</i> ) Anak mendapat perhatian khusus karena anak dipandang produktif (faktor produksi) Ikatan rasa kesukuan sangat kuat dan tetap	Titik berat pada ketunggalan ( <i>singularity</i> ) Keluarga merupakan unit konsumsi bukan unit penghasil Anak dianggap beban tanggungan sehingga ibu yang bekerja selalu menghindari kehamilan dan melahirkan
Pandangan tentang Ikatan Sosial	Ikatan masyarakat merupakan rasa tanggungjawab bersama yang didasarkan atas kasih sayang dan pengertian ber-sama Bagi hasil sama rata merupakan pandangan hidup yang kuat	Ikatan sosial berupa <i>social contract</i> ; mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain karena mereka dibayar Dituntut untuk memiliki <i>skill</i> kemampuan.
Pandangan mengenai sikap dan aktivitas masyarakat	Prinsip <i>Gorontocracy</i> ; yaitu siapa yang lebih dahulu menetap dan yang paling lama serta berusia lanjut maka ia berkuasa dan dihormati oleh masyarakat <i>Homogeneity of population</i> (kesukuan) sebagai sesuatu yang paling baik Aktivitas satu dengan	Semua ikatan yang ada hubungannya dengan tanah leluhur dan sebagainya dihilangkan. Orientasi beralih ke tugas pekerjaan Adat istiadat dinilainya sebagai sesuatu yang membatasi dan kolot

	lainnya tidak terpisah	Tata tertib harus sesuai dengan keadaan saat ini Terbentuknya pekerjaan yang terspesialisasikan
Pandangan mengenai posisi seseorang	Seseorang mendapatkan status dan posisinya dari warisan dan nama baik keluarga ( <i>ascribed status</i> )	Derajat seseorang dalam status dan posisinya didasarkan pada apa yang ia capai berdasarkan <i>skill</i> -nya ( <i>achievement status</i> )
Pandangan dalam lingkungan hidup	Hidupnya adalah pekerjaannya, sedangkan pekerjaannya merupakan jawaban terhadap adanya perubahan musim	Hidup mereka tidak tergantung pada kalender musim, tetapi mereka selalu bekerja setiap waktunya.

Sumber : A. Dharmawan (1986) dengan sejumlah modifikasi.  
Keterangan : Dari keenam “pandangan hidup” yang dikemukakan Dharmawan (1986), dalam tabel ini hanya lima yang dikutip, dengan sejumlah modifikasi.

Tuntutan penerapan sistem nilai pada masyarakat industri terkait dengan profesionalitas dalam beraktivitas, tidak semestinya melanggar norma-norma agama. Oleh karena itu secara sosiobudaya sistem nilai yang dituntut diterapkan pada masyarakat industri Indonesia sesuatu yang rasional tetapi tidak melanggar agama.

Sebagaimana tercantum pada Tabel 2, terkait dengan pandangan terhadap nilai keluarga, tentu saja nilai anak yang dalam masyarakat industri dipandang “beban” tidak dapat diterapkan di komunitas industri Indonesia. Demikian pula pandangan terhadap adat atau sistem nilai tradisional tidak selayaknya masyarakat industri mengabaikan *makna yang*

*sangat dalam* terkandung didalamnya, karena sudah banyak penelitian dan pandangan para pakar sosiologi dan antropologi, didalam nilai-nilai tradisional terkandung sistem *konservasi sosiobudaya dan ekologi* yang sangat bermanfaat menjaga kesinambungan sumberdaya alam, industri dan masyarakat. Industri yang diterapkan di Indonesia, tetap dituntut memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai yang tercantum didalam sistem nilai sosiobudaya yang telah terinternalisasi.

Pada masyarakat desa, *family* merupakan suatu unit. Anggota keluarga bekerja bersama guna mencapai hasil produksi sekedar cukup untuk hidup (dalam makna survival). Meskipun demikian dalam tataran sederhana, penduduk desa telah memiliki konsep “tabungan”, dimana produksi selain dikonsumsi keluarga, sebgaiian disimpan baik untuk cadangan pangan keluarga maupun cadangan input (seperti benih padi, jagung atau biji-bijian lainnya) untuk masa tanam berikutnya.

Pada masyarakat desa, tidak ada seorang anggota keluarga yang berkeinginan mengumpulkan hasil produksi tadi bagi dirinya sendiri. Mereka bekerja secara serentak dan bersama-sama. Disinilah konsep tolong menolong dalam keluarga pedesaan, menjadi unsur pengikat. Anak mendapat perhatian khusus dari keluarga karena mereka tahan bekerja dan dipandang lebih produktif, disinilah terdapat pandangan bahwa anak merupakan aset atau faktor produksi, yang dapat menyumbangkan tenaga bagi proses produksi ekonomi keluarga.

Di masyarakat pedesaan ikatan kesukuan (*kinship*) sangat kuat dan bersifat tetap, dimana setiap keluarga memiliki pola tersendiri berlandaskan hubungan darah (keurunan dan perkawinan). Oleh karena itu hubungan

antar keluarga sangat erat dan bersikap tolong-menolong, sehingga dalam setiap keluarga orang tua dan anak cacat tetap dipelihara sebagai tanggungjawab bersama antar keluarga.

Masyarakat industri, menurut Dharmawan (1986) kehidupan didasarkan pada ketunggalan (*singularity*) dan keakuan (*individuality*), sehingga keluarga merupakan “*a consumption unit*” (pemakai/konsumen), bukan sebagai “*a production unit*” (penghasil/produsen). Sehingga jika ayahnya sakit tidak bekerja, tidak dapat digantikan oleh anak atau isterinya. Anak merupakan beban tanggungan semata-mata, karena itu jika makin banyak anak, dipandang akan makin banyak beban tanggungan yang harus dicukupi. Hal ini dipandang tidak menguntungkan, atau pemborosan. Bahkan bagi ibu (wanita) karier, selalu berusaha menjauhkan dirinya dari kehamilan dan melahirkan anak.

Dalam kerangka berfikir yang sama, masyarakat industri pun berpandangan berbeda dengan masyarakat pedesaan, dalam hal orang tua (lanjut usia). Orang tua pada masyarakat industri dipandang sebagai manusia yang tidak produktif, sehingga daripada menjadi beban keluarga. Pandangan inilah yang melandasi tindakan seorang anak yang telah berkeluarga dalam masyarakat industri mengambil sikap daripada menjadi beban (menggangu ritme hidup) maka orangtua lebih baik dititipkan di panti asuhan.

Pada aspek pandangan terhadap ikatan sosial, terdapat perbedaan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Masyarakat desa menilai bahwa ikatan masyarakat (*social bonds*), dan merupakan rasa tanggungjawab bersama (*a sense of community*). Tanggungjawab bersama baik dalam hal keberuntungan (*fortune*) maupun dalam hal kemalangan (*misfortune*). Masyarakat desa akan turut berduka atau bersimpati ketika salah satu atau sebagian warga masyarakat

desa tertimpa kemalangan, seperti tertimpa bencana atau kematian. Demikian pula, warga akan merasa ikut berbahagian jika salah satu atau sebagian warga desa sedang berbahagian, seperti saat hajatan (syukuran pernikahan, khitanan, berangkat ataupun kembali dari ritual ibadah haji, syukuran karena keberhasilan panen padi dan lainnya.).

Ikatan yang terjalin dalam masyarakat desa berdasarkan rasa kasih sayang dan pengertian bersama (*mutual concern*). Bagi hasil secara sama rata merupakan pandangan hidup yang kuat, hal ini tidak terdapat di komunitas masyarakat industrial. Pada masyarakat kota (industri) *social bonds* digantikan oleh *social contract*. Hal ini bermakna orang akan mengerjakan sesuatu untuk orang lain, karena mereka dibayar untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh pemesan pekerjaan.

Oleh karena itu pada masyarakat kota (industri) *skill* atau ketrampilan merupakan suatu keharusan yang wajib dimiliki seseorang agar dapat melakukan pelayanan (*servicess*). Sebagai contoh, jika anak seorang warga kota (masyarakat industri) terindikasi gejala penyakit tertentu, maka orangtuanya atau anggota keluarga, atau pembantunya tersosialisasi untuk segera menghubungi dokter keluarga atau dokter spesialis untuk mendeteksi atau mendiagnosa kemudian jika positif terserang penyakit tertentu dengan segera memutuskan untuk menyerahkan perawatan dan penyembuhan anak mereka. Sementara jika hal tersebut terjadi di masyarakat pedesaan, pendekatan pertama dilakukan semaksimal mungkin oleh keluarga terdekat, yang tentunya berdasarkan pengalamannya pernah atau memiliki pengalaman menolong mengatasi penyakit, meskipun tidak persis tahu penyakit apa yang diduga menyerang anak tersebut. Warga tetangga terdekat atau kerabat yang tinggal berjauhan dengan keluarga yang diduga anaknya sakit

tersebut, lebih banyak bertindak memberikan motivasi (sugesti), memberikan dukungan moral dan tidak banyak memberikan pemecahan hal apa yang semestinya dilakukan.

Pandangan terhadap sikap dan aktivitas sosial. Di dalam kehidupan masyarakat desa, faktor ketenangan (harmoni, rukun, keeratan hubungan sosial) menjadi syarat utama. Setiap orang dapat dikenal melalui tempat tinggal (rumahnya), sehingga anggota masyarakat relatif mampu menunjukkan secara percis nama serta identitas diri seseorang (suami/isteri/anak dari seseorang, ciri fisik bahkan nama panggilan sehari-hari, teman sepermainan, pekerjaan dll.) dalam komunitas desa.

Oleh karena tingkat mobilitasnya relatif terbatas, sehingga warga desa kenal sesamanya. Prinsip *gorontocracy* yang bermakna siapa yang lebih dulu menetap dan yang paling lama serta berusia lanjut, maka orang tersebut yang berkuasa dan dihormati di masyarakat desa, masih dipertahankan. Hal ini bermakna warga desa yang menjadi pioner dan berwawasan pengetahuan tentang desa dan memahami secara lebih dalam sistem nilai yang berlaku di desa dibanding warga lainnya, di"tua"kan. Sehingga dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di desa dominan ditentukan atau diwarnai oleh pemikiran dan pendapat orang yang di "tua"kan tersebut.

Berbeda dengan masyarakat desa, pada masyarakat kota (industri), dengan tingkat mobilitas sosial tinggi (terutama terkait mobilitas horisontal-migrasi), memandang tidak perlu mempertahankan semua ikatan sosial yang berhubungan dengan tanah leluhur, misalnya tidak lagi mempertahankan silaturahmi dengan orang tua atau kerabat dan koleganya yang bersifat sosial. Hal yang diutamakan adalah profesionalisme bekerja. Tanah tempat tinggal lebih dinilai

sebagai faktor tempat tinggal sementara, artinya jika suatu ketika dimutasikan atau pindah kerja yang menyebabkan harus meninggalkan tempat tinggalnya, disikapi dengan rasional. Artinya jika perpindahannya dirancang cukup lama, maka tempat tinggal tersebut akan dijual untuk modal pembelian atau penyewaan tempat tinggal baru dimana ia bekerja. Jika perpindahannya bersifat sementara dan berpeluang kembali ke tempat tinggal lama, maka ia akan berhitung (untung-rugi, berapa korbanan dan berapa yang penerimaan yang berpeluang diperolehnya) apakah akan dipertahankan dengan mewajibkan anggota keluarga tetap bertahan atau dijual.

Di dunia kerja masyarakat industri skill dan profesionalitas karyawan menjadi tolok ukur utama seseorang karyawan dapat dipertahankan atau harus dimutasi (reposisi jabatan) bahkan di PHK (diberhentikan). Pandangan terhadap pembaharuan (inovasi) sangat dominan demi kemajuan perusahaan, sehingga karyawan yang progresif dengan ide-ide (gagasan/inovasi) terbaru akan menjadi acuan kinerja karyawan (terutama tingkat manajerial). Sehingga loyalitas atau dedikasi karyawan tidak menjadi bobot utama penilaian untuk mempertahankan seorang karyawan dalam posisi jabatan tertentu. Anak-anak muda (profesional muda) menjadi incaran perusahaan yang berkembang menuju era informasi-teknologi tinggi masa depan.

Pandangan terhadap posisi seseorang. Di dalam masyarakat tradisional pedesaan, dominan anggota masyarakat memperoleh status sosial/posisi sosial dari warisan dan nama baik keluarga (*ascribed status*). Seorang tukang bangunan (teknisi bangunan) terus menerus menjadi tukang bangunan, bukan karena kebodohan atau tidak ada peluang berpindah pekerjaan, akan tetapi karena mengikuti

jejak dan petuah orangtuanya (ayah atau kakek moyangnya dulu).

Sedangkan pada masyarakat perkotaan (industri) seseorang mendapatkan posisi sosial/status sosial, karena prestasi atau hasil ketrampilan yang dimiliki (*achieve status*). Artinya seseorang berdasarkan ketrampilan, kecakapannya (kapasitas skill) yang dimilikinya akan memperoleh posisi sosial/status sosial, dimana status sosial diperjuangkan untuk diraih, bukan karena pewarisan atau pengakuan tanpa menunjukkan kapasitas diri (*status by achievement*).

Dengan demikian status sosial/posisi sosial seseorang dalam masyarakat industri ditentukan oleh hasil pendidikan/pelatihan yang telah dicapai bukan didasarkan atas kesopanan, loyalitas atau status sosial/posisi sosial orangtuanya. Keadaan masyarakat industri demikian mengarah kepada adanya persamaan antar manusia. Anggota masyarakat yang satu akan berkedudukan sama dengan anggota masyarakat lainnya, apabila mereka memiliki ketrampilan-kepandaian (*skill*) atau spesialisasi yang sama atau yang sederajat. Pandangan terhadap lingkungan hidup. Pada masyarakat pertanian (dalam makna luas) dalam konteks pedesaan, pengetahuan-sikap-tindakan seseorang selalu disesuaikan dengan adanya beberapa perubahan musim sepanjang tahun. Hidup adalah pekerjaannya, sedangkan pekerjaannya merupakan jawaban atas adanya perubahan musim (Dharmawan, 1986). Dalam makna ekologi manusia, penduduk pedesaan relatif budayanya sangat dipengaruhi oleh kekuatan alam, sehingga jika berdasarkan pemikiran Khluckhon, mereka hanya pasrah atau setidaknya hanya mampu menyesuaikan diri dengan irama alam.

Kondisi demikian, tercermin dari kekhawatiran atau ketidaktenangan penduduk pedesaan (pertanian) sepanjang

waktu, mulai dari bercocok tanam (budidaya), perawatan maupun panen. Hal demikian terjadi karena mereka tidak dapat memastikan, selalu waswas hasil kerja berbulan-bulan tidak dapat memastikan hasil yang akan diperoleh. Penduduk pedesaan (pertanian) tidak mampu mencermati ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin timbul sehingga mereka tidak banyak berani mengambil resiko (*risk*) untuk berbudidaya dengan teknologi dan jenis komoditi yang belum pernah mereka praktikan. Sehingga mereka selalu menyerahkan diri kepada sang pencipta (Tuhan, Allah swt.), setelah melakukan segala ikhtiar (usaha) dalam budidaya pertaniannya.

Keadaan tersebut diatas, tidak terjadi pada masyarakat industri, karena hidup mereka sangat tergantung kepada bekerja yang tegas dan kepastian waktunya. Hal ini terkait dengan bagaimana seseorang mampu mengemas keahlian/kepandaianya untuk berusaha tetap bertahan, sehingga kepastian pendapatan menjadi lebih tinggi. Masyarakat industri cenderung berani mengambil keputusan dengan *risk and uncertainty* yang telah diperhitungkan masak-masak. Oleh karena perhitungan berdasarkan pendekatan rasional inilah, secara umum masyarakat industri cenderung tidak banyak menyerahkan hasil kerjanya, dengan pendekatan diri kepada Tuhan (Allah SWT).

Pada komunitas industri, suatu kegagalan dalam bekerja atau pendidikan, disikapi dengan menyalahkan diri atas keterbatasannya. Jika menilai dirinya tidak mungkin dapat mengubah-memperbaikinya maka sikap yang diambil berhenti atau mengakhiri kehidupannya. Dengan demikian penilaian terhadap masyarakat petani oleh sejumlah Sosiolog Barat (*Booke-Geertz* dll.) yang selama ini melekat yaitu petani bersikap *fatalistik*, dalam kehidupan pertaniannya, dapat dipertanyakan kebenarnya, karena justru pada komunitas

industri sikap *fatalistik* inipun seringkali muncul, terutama pada masyarakat industri maju (seperti Jepang dan Singapura).

### DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. 2000. *Sosiologi Industri*. Landasan Analisis Agribisnis. Program Diploma Manajemen Agribisnis (MAB), Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Anonim, 2003. *Sosiologi Umum*. Tim Editor Sosiologi Umum - Institut Pertanian Bogor
- Dharmawan, A., 1986, *Aspek-aspek Dalam Sosiologi Industri*. Bina Cipta. Bandung
- Parker, SR., RK. Brown, J. Child and MA. Smith, 1992. *Sosiologi Industri*. (disadur oleh G Kartasaputra). Rineka Cipta. Jakarta.
- Sayogyo, 1971. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. (Diktat Kuliah, tidak diterbitkan)
- Sadjad, S., 1983. *Industri di Pedesaan. Persepsi, Konsepsi dan Realisasinya*. Majalah Prisma Nomor 1, Januari 1983.
- Saragih, B. dan B Krisnamurthi, 1994. *Agribisnis. Cara Baru Memandang Pertanian*. Fakultas Pertanian, IPB. Bogor
- Soekanto, S., 1998. *Sosiologi. Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetrisno. L. 1995. *Struktur Sosial dan Nilai Budaya Dalam Industrialisasi Pedesaan*. dalam Lukman Soetrisno, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.



## **BAB 3**

# **INTERAKSI DAN PROSES SOSIAL MASYARAKAT AGRIBINIS**

**Sitti Nurani Sirajuddin**

[sittinurani81@gmail.com](mailto:sittinurani81@gmail.com)

### **3.1 Pendahuluan**

Hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi baik antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok akan mengakibatkan interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi melibatkan lebih dari satu orang, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial, memiliki tujuan yang jelas, terdapat dimensi waktu, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Dua syarat utama interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dalam prosesnya terjadi pada 3 bentuk yaitu antara perorangan, antara perorangan dengan suatu kelompok dan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dalam interaksi sosial bukan sekedar tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara penyampaiannya kepada siapa. Komunikasi terbagi dua bagian yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal bersifat langsung sedangkan komunikasi non-verbal dalam interaksi sosial dapat dilihat dalam berbagai pola sosial. Interaksi sosial yang terjadi akan mengakibatkan proses sosial. (Herlina, 2014) menyatakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok merupakan interaksi sosial.

Suatu interaksi sosial atau hubungan secara timbal balik atau saling mempengaruhi antara manusia sepanjang hidupnya berlangsung di dalam masyarakat. Arti yang lain dari proses sosial yaitu cara-cara berhubungan dimana dapat dilihat jika kelompok-kelompok sosial atau individu saling bertemu serta menentukan sistem dan bentuk hubungan sosial. Pada interaksi sosial terjalin hubungan erat yang kemudian dan akan menciptakan keselarasan sosial

### **3.2 Interaksi Sosial Masyarakat Agribisnis**

Syarat utama terjadinya aktivitas dan integrasi sosial yaitu interaksi sosial (Banting & Kymlicka, 2007; Modood, 2007; Phillips, 2009; Spinner-Halev & Parekh, 2002). Bentuk penyesuaian individu dengan lingkungannya dapat terjadi melalui interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok maupun pihak – pihak diluar kelompoknya, oleh karena itu pola interaksi dan hubungan sosial sangat penting, hal ini sesuai (Haryani & Tairas, 2014) menyatakan bahwa lingkungan sosial berkontribusi pada dua hal. Pertama, lingkungan sosial memberikan informasi kebaruan yang dapat mendorong petani menjadi lebih maju dan meningkatkan produktivitas usahatani. Kedua, lingkungan sosial juga mempengaruhi keputusan petani dalam berusahatani. Menurut (Soekanto, 2013) ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial yakni adanya kontak sosial dan komunikasi. (Lestari, 2013) menyatakan dalam berinteraksi seseorang individu atau kelompok sosial sedang berusaha atau belajar untuk memahami tindakan sosial seorang individu ataupun kelompok sosial lain.

Jika individu dalam masyarakat dapat bertindak sesuai dengan konteks sosialnya maka interaksi sosial akan berjalan dengan tertib dan teratur yakni tindakan yang disesuaikan

dengan situasi sosial saat itu, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, serta individu bertindak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif adalah beberapa bentuk interaksi sosial.

### 1. Interaksi Sosial Asosiatif

Interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Hubungan dengan proses sosial yang bersifat asosiatif dapat diketahui melalui aktivitas sosial di bidang pertanian dan Perkebunan. Salah satu contoh inereaksi sosial asosiatif dari hasil penelitian (Pohan & Gunawan, 2019) yaitu masyarakat desa Mekarwangi mempunyai kesadaran kolektif yang kuat. Dibuktikan dengan sikap gotong-royong dalam kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, hari besar negara, acara pernikahan, pemakaman, pengajian, Pembangunan rumah warga dan infrastruktur desa lainnya. Pembagian tugas dilakukan secara sederhana, pihak laki-laki bertugas mengerjakan pembangunan, sedangkan ibu-ibu menyiapkan makanan/cemilan. Doktrin yang dianut bahwa mereka yang tinggal di satu desa juga merupakan satu keluarga atas dasar kesamaan dari segi agama, budaya, bahasa, dan pekerjaan.

Ada beberapa interaksi sosial terkait proses asosiatif yaitu: kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi

#### a. Kerja Sama

Kerja sama berarti bekerja sama atau usaha bersama dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama dan biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Kerjasama terjadi jika orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut serta kesadaran

adanya kepentingan-kepentingan yang sama. Ada empat faktor yang mendorong terjadinya kerja sama, yaitu motivasi atau kepentingan pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, dan tuntutan situasi.

Salah satu contoh yaitu petani bergabung pada koperasi pertanian. Melalui koperasi maka petani dapat mengakses sumberdaya dan hal penting yang sulit diakses secara individu. Koperasi juga bisa membantu petani untuk berkolaborasi satu sama lain dengan berbagi pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta sumberdaya dan layanan.

b. Akomodasi

Akomodasi adalah suatu keadaan dan usaha-usaha dalam mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara di antara pihak-pihak yang berkonflik atau adanya suatu keseimbangan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Keseimbangan terwujud karena proses penyesuaian dan kesepakatan untuk tidak saling bertentangan dengan tujuan untuk mengurangi pertentangan antara orang-perorang atau antara kelompok dengan kelompok sebagai akibat adanya perbedaan paham, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer, untuk memungkinkan terjadinya kerja sama, mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah (Imam Sujarwanto, 2012). Paksaan, kompromi, konsiliasi dan toleransi adalah bentuk-bentuk akomodasi. Sedangkan akomodasi menurut (Annas, 2017) yaitu suatu bentuk keseimbangan dalam proses interaksi antar individu dan kelompok manusia yang berkaitan dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku. Sebagai suatu proses maka akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan yaitu usaha untuk mencapai kestabilan.

Salah satu contoh bentuk akomodasi di bidang agribisnis yaitu antara petani dan pedagang nanas yaitu berupa kompromi dan toleransi yang dilakukan oleh pedagang dan petani saat ada keputusan dan masukan dari salah satu pihak misalnya kegiatan tawar-menawar harga jual nanas yang dilakukan oleh petani dan pedagang untuk menentukan harga yang sesuai untuk kedua belah pihak, selain itu terjadi kegiatan kumpul bersama yang dilakukan pedagang maupun petani dalam membahas dan menyusun jadwal untuk membantu salah satu petani yang kesulitan untuk mengangkut nanas dikarenakan tidak ada kendaraan.

c. Asimilasi

Usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia merupakan suatu proses sosial yang disebut dengan asimiliasi. Proses asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mempertinggi kesatuan dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. (Imam Sujarwanto, 2012) menyatakan asimilasi merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama

Amalia, (2013) menyatakan bahwa asimilasi merupakan suatu proses sosial yang timbul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu lama. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti sering menemukan orang-orang dengan ciri kebudayaan yang berbeda-beda walaupun dengan perbedaan kebudayaan ini namun masyarakat tetap membaur dan menjalin hubungan yang lama.

Salah satu contoh bentuk asimilasi di antara petani dan pedagang yaitu mereka saling bergaul dan berkumpul tanpa membedakan kebudayaan yang berbeda di antara mereka, seperti pada kegiatan gotong-royong dalam memanen komoditas yang sama dilakukan oleh petani dan pedagang, mereka saling membaaur satu sama lain dan berinteraksi dengan baik

d. Akulturasi

Proses sosial yang timbul jika kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan kebudayaan asing dikatakan sebagai akulturasi dimana unsur-unsur kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses akulturasi ini tidak bisa dilepaskan dari budaya asing. Budaya asing yang masuk ke lingkungan masyarakat tidak bisa langsung diterima begitu saja. Maka dari itu, proses akulturasi membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Interaksi Sosial Disosiatif

Interaksi sosial disosiatif adalah proses yang menjauhkan atau mempertentangkan sesuatu atau keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Ketidaktertiban sosial (social disorder) memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar-anggota masyarakat tersebut. Beberapa proses disosiatif adalah persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan

a. Persaingan

Proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Persaingan merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang sederhana. Proses ini adalah proses sosial yang mengandung perjuangan untuk memperebutkan tujuan-

tujuan tertentu yang sifatnya terbatas, yang semata-mata bermanfaat untuk mempertahankan suatu kelestarian hidup (Uyara et al., 2023).

Saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu merupakan bentuk persaingan. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum.

Kelompok-kelompok manusia atau individu sering bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu yang menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman yang merupakan proses sosial dalam bentuk persaingan.

b. Kontravensi

Kontravensi adalah suatu proses sosial yang ditandai oleh adanya perasaan dan sikap tidak suka yang disembunyikan. Bentuk proses sosial ini berada di antara persaingan dan konflik. Kontravensi berarti bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Tanda-tanda kontravensi yaitu gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri sendiri atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang

Proses sosial yaitu kontravensi ditandai dengan ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat, atau dengan pendirian masyarakat.

c. Pertikaian

Proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya adalah bentuk pertikaian.

Bentuk lanjut dari kontravensi yaitu pertikaian artinya perselisihan sudah bersifat terbuka. Disebabkan karena adanya perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Terkadang pertikaian muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan atau kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman.

d. Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Ketika individu-individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman dan kekerasan akan menimbulkan konflik atau pertentangan.

Salah satu contoh dari interaksi sosial disosiatif adalah pertikaian terjadi pada dua petani dimana yang satu menggunakan pupuk organik pada sawahnya namun petani lain yang posisi sawahnya berada di atasnya menggunakan pupuk kimia untuk memupuk sawahnya, otomatis sawah yang menggunakan pupuk organik tersebut akan tercemar oleh pupuk kimia pada sawah yang berada di atasnya melalui saluran irigasi. Jadi petani organik merasa dirugikan dengan hal ini, sehingga terjadilah pertentangan antara kedua petani tersebut

### **3.3 Proses Sosial Masyarakat Agribisnis**

Interaksi sosial yang terjadi akan mengakibatkan proses sosial. Cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok sosial saling bertemu, dan menentukan sistem, serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apa bila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada disebut dengan proses sosial

Siklus perkembangan dari struktur sosial yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam proses hubungan sosial adalah proses sosial. Proses-proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat jika kelompok-kelompok atau individu dan saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada (Sudarman & Madiistriyatno, 2022)

Cara manusia berhubungan, berkomunikasi, dan memengaruhi satu sama lain merupakan proses sosial yang merupakan hal sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial, yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk bertahan hidup dan berkembang juga merupakan proses sosial.

Berlangsungnya proses sosial semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat inklusif, kontrol sosial, dan afeksi (kasih sayang). Di sisi lain, proses sosial menghasilkan perubahan mendasar yang menciptakan mobilitas gerakan sosial; terciptanya kelompok, asosiasi, organisasi, dan partai politik baru; tersebarnya gaya hidup baru; dan berkembangnya temuan teknologi dengan segala dampaknya (Sztompka, 2007).

Hubungan dan proses sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ketika berbicara tentang hubungan maka proses sosial menjembatannya hingga berlanjut pada aktivitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Proses sosial diawali dengan interaksi sosial berupa hubungan timbal-balik yang dinamis antara pihak-pihak terkait baik dalam kerja sama, persaingan, atau pertikaian (Priyatna, 2013). Sedangkan aktivitas interaksi yang memicu variasi hubungan dalam masyarakat disebut dengan proses sosial (Dirdjosisworo, 1996). Sesungguhnya tujuan awal dari berlangsungnya hubungan dan proses sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan akan kontrol sosial, dan kebutuhan afeksional dari tiap-tiap individu sesuai dengan latar belakang statusnya (Sari, 2009). Proses sosial merupakan proses hubungan yang dinamis dalam bermasyarakat dengan mengombinasikan aksi-aksi sosial (interaksi sosial) sebagai pengaruh timbal-balik antara dua pihak atau lebih demi mencapai tujuan tertentu (Abdulsyani, 1994).

Proses sosial akan terjadi apabila dalam kehidupan bermasyarakat khususnya pertanian terjadi kontak sosial antar masyarakat dan terjadi pertukaran pesan atau melakukan komunikasi. Seperti saling mengadakan kerja sama, saling berbicara, saling berbagi pengalaman, saling bertikai dan saling gotongroyong. Karena hal tersebut merupakan syarat terjadinya interaksi sosial yang merupakan awal terjadinya proses sosial

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi: skematika, teori dan terapan*. Bumi Aksara,.
- Amalia, N. (2013). Harmonisasi dan Konflik. In *Unimal Press* (Vol. 53, Issue 9).
- Annas, A. (2017). Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan. In *Celebes Media Perkasa* (Vol. 53, Issue 9).
- Banting, K., & Kymlicka, W. (2007). Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. In *Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*.  
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199289172.001.0001>
- Dirdjosisworo. (1996). *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Raja Grafindo Perkasa.
- Haryani, R., & Tairas, M. M. W. (2014). Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 3(1).
- Herlina. (2014). Interaksi Sosial Penyuluh Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Usahatani Masyarakat Petani Di Kabupaten Batang. *Journal of Educational Social Studies*, 3(2).
- Imam Sujarwanto. (2012). Interaksi Sosial antar Umat Beragama (Studi Kasus pada Masyarakat Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal). *Journal of Educational Social Studies*, 1(2).
- Lestari, I. P. (2013). INTERAKSI SOSIAL KOMUNITAS SAMIN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society*

- and Culture, 5(1).  
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2376>
- Modood, T. (2007). *Multiculturalism: A Civic Idea*. Polity Press.
- Phillips, A. (2009). Multiculturalism without culture. In *Multiculturalism Without Culture*.  
<https://doi.org/10.1057/cpt.2008.8>
- Pohan, B., & Gunawan, W. (2019). Proses Sosial sebagai Akar Sublimasi Masyarakat Pedesaan. *Simulacra*, 2(2).  
<https://doi.org/10.21107/sml.v2i2.6040>
- Priyatna, A. (2013). Negotiating and rethinking local culture: The narratives of Indonesian women juggling higher education, work, and domestic roles. *Asian Journal of Women's Studies*, 19(4).  
<https://doi.org/10.1080/12259276.2013.11666167>
- Sari, D. W. (2009). Sosiologi (Konsep dan Teori). PT. Refika Aditama: Bandung.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu Pengantar. In *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 23).
- Spinner-Halev, J., & Parekh, B. (2002). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. *Contemporary Sociology*, 31(2).  
<https://doi.org/10.2307/3089515>
- Sudarman, & Madiistriyatno, H. (2022). *Sosiologi dan Manajemen Pendidikan (Edisi Revisi)*. Indigo Media.
- Sztompka, P. (2007). Sosiologi Perubahan Sosial (terjemahan). In *Jakarta: Pranada Media Group* (Issue 2007).
- Uyara, A., Siwalette, J. D., & Palembang, S. P. (2023). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Interaksi Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Pedagang Pasar Mardika*.

## **BAB 4**

### **KELOMPOK SOSIAL DALAM AGRIBISNIS**

**Ulfah Nurdiani, S.P., M.Sc.**

[ulfah.nurdiani@unsoed.ac.id](mailto:ulfah.nurdiani@unsoed.ac.id)

Kelompok sosial dalam agribisnis merupakan komponen yang tak terpisahkan dari dinamika pertanian modern. Di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara agraris seperti Indonesia, kelompok sosial memainkan peran vital dalam memfasilitasi kegiatan agribisnis yang berkelanjutan. Kelompok-kelompok ini tidak hanya melibatkan petani, tetapi juga mencakup pedagang, distributor, konsumen, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang berinteraksi dalam jaringan kompleks produksi dan distribusi pangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, struktur dan fungsi kelompok sosial dalam agribisnis mengalami perubahan signifikan. Teknologi pertanian modern, akses informasi yang lebih baik, serta pasar global yang semakin terbuka telah mengubah cara kelompok sosial beroperasi dan berinteraksi. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya, peningkatan kompetisi, dan konflik kepentingan antara berbagai kelompok sosial.

Memahami dinamika kelompok sosial dalam agribisnis menjadi sangat penting untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, memastikan distribusi yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta komunitas agraris lainnya. Dengan latar belakang ini, bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai jenis kelompok sosial yang berperan dalam agribisnis, menganalisis interaksi dan pola kerjasama di antara mereka, serta mengevaluasi

dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi efektif untuk memberdayakan kelompok sosial dalam rangka mencapai pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

#### **4.1 Definisi Kelompok Sosial**

Kelompok sosial dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang saling berinteraksi secara teratur, memiliki tujuan bersama, serta mengembangkan rasa identitas dan solidaritas kolektif. Dalam konteks agribisnis, kelompok sosial mencakup berbagai entitas yang berperan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi produk pertanian. Interaksi antar anggota kelompok ini sering kali diatur oleh norma dan nilai yang diakui bersama, yang membantu menjaga keteraturan dan keberlangsungan kelompok tersebut. Menurut Giddens et al. (2017), kelompok sosial memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan dinamika sosial di berbagai konteks, termasuk dalam sektor agraris, di mana mereka berfungsi sebagai agen perubahan dan inovasi yang signifikan.

#### **4.2 Jenis-Jenis Kelompok Sosial dalam Masyarakat Agribisnis**

Dalam masyarakat agribisnis, terdapat berbagai jenis kelompok sosial yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat petani.

##### **a. Kelompok Primer**

Kelompok primer merupakan kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intim, asosiasi tatap muka, dan kerja sama yang erat. Kelompok ini seringkali terdiri dari

keluarga petani yang bekerja sama dalam kegiatan pertanian. Mereka saling mengenal dengan baik dan memiliki hubungan yang erat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti kelompok kerja sama tani di desa-desa 2.

b. Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder merupakan kelompok formal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Interaksi dalam kelompok sekunder terdiri atas saling hubungan yang tidak langsung dan kurang bersifat kekeluargaan. Contohnya adalah koperasi pertanian dan asosiasi petani. Mereka memiliki tujuan yang spesifik dalam pengembangan pertanian dan dapat melibatkan petani dari berbagai kelompok primer 2.

c. Kelompok Formal dan Informal

Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk secara resmi dengan tujuan tertentu, seperti lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengembangan pertanian. Sementara itu, kelompok informal seperti kelompok arisan tani terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dengan didasari oleh kepentingan dan pengalaman bersama 1.

Selain jenis-jenis kelompok social Masyarakat dalam agribisnis diatas, terdapat pula jenis kelompok sosial menurut peran dalam ekosistem pertanian. Pertama, kelompok tani merupakan salah satu jenis kelompok sosial yang paling umum ditemui. Kelompok ini terdiri dari para petani yang bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka melalui berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi pertanian (Beckford & Barker, 2018). Kelompok tani sering kali menjadi wadah untuk pelatihan dan

penyuluhan, serta tempat untuk mengembangkan praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kedua, kelompok pedagang dan distributor berperan dalam menghubungkan petani dengan pasar. Mereka bertanggung jawab atas distribusi hasil pertanian dari produsen ke konsumen, memastikan bahwa produk pertanian dapat diakses dengan mudah dan harga yang kompetitif. Kelompok ini juga berperan dalam menentukan harga produk di pasar, yang dapat berdampak signifikan pada pendapatan petani (Leeuwis & Aarts, 2017).

Ketiga, kelompok konsumen, meskipun sering kali tidak terorganisir secara formal, memiliki pengaruh besar terhadap agribisnis. Preferensi dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi jenis dan jumlah produk yang diproduksi oleh petani. Konsumen juga dapat membentuk kelompok advokasi yang mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan etis (Pretty, 2018).

Keempat, kelompok peneliti dan penyuluh pertanian berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran inovasi teknologi di sektor pertanian. Mereka bekerja sama dengan petani untuk menguji dan mengimplementasikan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Kelompok ini juga membantu dalam penyuluhan dan pendidikan petani untuk memastikan adopsi teknologi baru yang efektif (Morris et al., 2017).

Kelompok sosial dalam agribisnis ini saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dinamika antar kelompok ini penting untuk dipahami guna mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam agribisnis.

### **4.3 Ciri-ciri Kelompok Sosial**

Kelompok sosial memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari kumpulan individu yang tidak terorganisir. Pertama, kelompok sosial terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki tujuan bersama dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan tersebut. Interaksi yang terjadi bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi, yang membantu membangun identitas kelompok yang kuat (Giddens et al., 2017). Kedua, anggota kelompok memiliki kesadaran akan keanggotaan mereka dan merasa bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar (Macionis, 2018). Ketiga, ada struktur dan norma yang mengatur perilaku anggota kelompok, yang membantu menjaga keteraturan dan harmonisasi dalam kelompok (Barker, 2014). Keempat, kelompok sosial memiliki dinamika yang terus berkembang seiring waktu, mencerminkan perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kelompok (Scott & Marshall, 2009).

### **4.4 Fungsi dan Peran Kelompok Sosial dalam Masyarakat Agraris**

Kelompok sosial memainkan peran penting dalam masyarakat agraris, di mana mereka berfungsi sebagai agen utama dalam berbagai aspek kehidupan pertanian. Salah satu fungsi utama kelompok sosial adalah menyediakan dukungan ekonomi dan sosial bagi anggotanya. Kelompok tani, misalnya, sering kali membantu anggotanya dengan berbagi pengetahuan, alat pertanian, dan sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka (Beckford & Barker, 2018). Selain itu, kelompok sosial berperan dalam penyebaran inovasi dan teknologi pertanian, yang

esensial untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga keberlanjutan lingkungan (Leeuwis & Aarts, 2017). Melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan, kelompok-kelompok ini membantu para petani mengadopsi praktik-praktik baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan (Pretty, 2018).

Selain fungsi ekonomi, kelompok sosial juga berperan penting dalam membangun jaringan sosial dan solidaritas di antara anggotanya. Mereka menciptakan ikatan sosial yang kuat melalui kegiatan-kegiatan bersama seperti gotong royong dan pertemuan rutin (Westoby & Shevellar, 2016). Fungsi ini sangat penting dalam masyarakat agraris yang sering kali menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar (Morris et al., 2017). Dengan adanya kelompok sosial, petani dan anggota komunitas lainnya dapat bekerja sama untuk menghadapi tantangan tersebut secara kolektif (Scoones, 2019).

Peran kelompok sosial dalam masyarakat agraris juga mencakup fungsi politik dan pengambilan keputusan. Mereka sering menjadi wadah bagi anggotanya untuk menyuarakan kepentingan mereka dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian (Bebbington, 2020). Melalui kelompok-kelompok ini, petani dapat memperkuat posisi tawar mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak lain mempertimbangkan kepentingan mereka (Bernstein, 2017).

#### **4.5 Proses Pembentukan Kelompok**

Pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat agribisnis merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kelompok sosial ini antara lain kebutuhan untuk

berbagi sumber daya, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat posisi tawar di pasar. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh para petani, seperti akses terhadap teknologi, informasi, dan modal, juga mendorong mereka untuk membentuk kelompok guna mengatasi masalah ini secara kolektif. Faktor sosial seperti kepercayaan dan norma budaya juga memainkan peran penting dalam proses pembentukan kelompok, karena ikatan sosial yang kuat dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama di antara anggota kelompok (Beckford & Barker, 2018).

Proses pembentukan kelompok sosial biasanya melalui beberapa tahap yang khas. Tahap pertama adalah tahap pembentukan (*forming*), di mana individu-individu mulai berkumpul dan mengenal satu sama lain, serta mendiskusikan tujuan dan visi bersama. Pada tahap ini, anggota kelompok biasanya mencari kesamaan dan mencoba memahami peran masing-masing dalam kelompok. Tahap kedua adalah tahap penataan (*storming*), di mana anggota kelompok mulai menghadapi konflik dan perbedaan pendapat. Konflik ini perlu diatasi melalui komunikasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Tahap ketiga adalah tahap normalisasi (*norming*), di mana kelompok mulai menetapkan aturan dan norma yang akan mengatur perilaku anggotanya. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai bekerja lebih harmonis dan efisien. Tahap keempat adalah tahap pelaksanaan (*performing*), di mana kelompok mulai bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggota kelompok berfokus pada tugas dan berusaha mencapai hasil yang diinginkan. Terakhir, adalah tahap pembubaran (*adjourning*), di mana kelompok mungkin mengalami perubahan struktur atau bahkan dibubarkan setelah mencapai tujuan atau menghadapi perubahan yang

signifikan (Tuckman, 1965; revisited in more recent works by Forsyth, 2018).

Proses ini menunjukkan bahwa pembentukan kelompok sosial dalam agribisnis tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang memerlukan waktu dan usaha untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan mencapai efisiensi kerja yang optimal. Dinamika ini sangat penting untuk dipahami karena keberhasilan kelompok sosial dalam agribisnis sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk melewati setiap tahap dengan baik dan membangun dasar yang kuat untuk kerjasama yang berkelanjutan (Leeuwis & Aarts, 2017).

#### **4.6 Manajemen Kelompok Sosial dalam Agribisnis**

Manajemen kelompok sosial dalam agribisnis memegang peran penting dalam memastikan kelangsungan dan efektivitas kerja kelompok. Proses manajemen ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi kegiatan, dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul di dalam kelompok. Manajemen yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kelompok sosial, termasuk tahapan pembentukan kelompok, struktur organisasi, dan pola interaksi antar anggota kelompok. Pentingnya manajemen kelompok sosial dalam agribisnis ditekankan oleh kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas, meminimalkan konflik, dan mencapai tujuan bersama (Barker & Barker, 2017).

Penerapan prinsip manajemen yang tepat dapat membantu kelompok sosial dalam agribisnis mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, fluktuasi pasar, dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, manajemen yang baik juga mendorong inovasi dan

pembelajaran berkelanjutan di dalam kelompok, yang merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan kelompok sosial dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah (Leeuwis & Aarts, 2017).

Manajemen kelompok sosial dalam agribisnis juga melibatkan penggunaan alat dan teknik manajemen yang sesuai dengan konteks dan karakteristik kelompok. Hal ini termasuk penggunaan pertemuan rutin, komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, dan pengembangan kebijakan internal yang mendukung keberlangsungan kelompok. Selain itu, pemimpin kelompok atau fasilitator juga memainkan peran kunci dalam memfasilitasi proses manajemen kelompok sosial yang efektif, termasuk dalam mengelola konflik dan memfasilitasi pengambilan keputusan kelompok (Beckford & Barker, 2018).

Dengan demikian, manajemen kelompok sosial dalam agribisnis tidak hanya tentang pengelolaan aspek teknis dan operasional, tetapi juga tentang pengelolaan hubungan dan dinamika sosial di dalam kelompok. Dengan pendekatan manajemen yang tepat, kelompok sosial dalam agribisnis dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **4.7 Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Kelompok Sosial dalam Agribisnis**

Mengelola kelompok sosial dalam agribisnis menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk perubahan lingkungan eksternal, konflik internal, dan keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mempertahankan kebersamaan dan kesatuan

visi di antara anggota kelompok yang mungkin memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Tantangan lainnya adalah ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani. Selain itu, pengelolaan konflik internal, baik itu terkait dengan pembagian sumber daya maupun perbedaan pendapat, juga menjadi tantangan serius dalam mengelola kelompok sosial dalam agribisnis.

Namun, terdapat solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama, memperkuat komunikasi dan partisipasi anggota kelompok dapat membantu membangun kebersamaan dan kesatuan visi di antara mereka (Leeuwis & Aarts, 2017). Melalui forum-forum diskusi dan pertemuan rutin, anggota kelompok dapat berbagi informasi, pengalaman, dan harapan mereka, sehingga memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Kedua, pengembangan kapasitas anggota kelompok dalam hal manajemen, teknologi pertanian, dan penyelesaian konflik juga menjadi solusi yang efektif. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian.

Selain itu, pembentukan jaringan kerja sama antar kelompok sosial dan pihak-pihak terkait juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam mengelola kelompok sosial dalam agribisnis. Melalui kerja sama lintas kelompok, anggota kelompok dapat saling mendukung dan bertukar pengalaman serta sumber daya yang diperlukan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperluas akses terhadap pasar dan teknologi pertanian (Beckford & Barker, 2018).

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan kelompok sosial dalam agribisnis dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya dan menjadi agen perubahan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. (2014). *Cultural Studies: Theory and Practice* (5th Edition). SAGE Publications.
- Barker, Derek A., and Clinton L. Beckford. (2017). *The Management of Agricultural Enterprises*. Routledge.
- Bebbington, Anthony. (2020). *Social Movements and the Politics of Rural Development in Latin America*. University of Pittsburgh Press.
- Beckford, Clinton L., and Derek A. Barker. (2018). *Sociology of Agriculture: Theoretical Approaches and Contemporary Issues*. Routledge.
- Bernstein, Henry. (2017). *Political Economy and Agrarian Change: Themes in the Sociology of Agriculture*. Rowman & Littlefield.
- Forsyth, Donelson R. (2018). *Group Dynamics* (7th Edition). Cengage Learning.
- Giddens, Anthony, et al. (2017). *Introduction to Sociology* (9th Edition). W.W. Norton & Company.
- Grace Eirin. (2022). *Jenis Kelompok Sosial: Formal, Informal, Primer, Sekunder, dan Contohnya*. Bobo.id.
- Leeuwis, Cees, and Noelle Aarts. (2017). *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension* (3rd Edition). Wiley-Blackwell.
- Macionis, John J. (2018). *Sociology* (16th Edition). Pearson.

- Morris, Carol, et al. (2017). *Agriculture and Rural Development in a Globalizing World: Challenges and Opportunities*. Routledge.
- Pretty, Jules N. (2018). *The Sustainable Intensification of Agriculture*. Routledge.
- Scoones, Ian. (2019). *Sustainable Livelihoods and Rural Development*. Practical Action Publishing.
- Scott, John, and Gordon Marshall. (2009). *A Dictionary of Sociology* (4th Edition). Oxford University Press.
- Tonnies, F. (2011). *Community and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft)*. Martino Fine Books.
- Tuckman, Bruce W., and Mary Ann Jensen. (1977). Stages of Small-Group Development Revisited. *Group & Organization Studies*, 2 (4), 419-427.
- Westoby, Peter, and Lynda Shevellar. (2016). *Learning and Mobilising for Community Development: A Radical Tradition of Community-Based Education and Training*. Routledge.

## **BAB 5**

# **PELAPISAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT AGRIBISNIS**

**Tintin Febrianti**

[tintin\\_febrianti@uniga.ac.id](mailto:tintin_febrianti@uniga.ac.id)

### **5.1 Pengertian Pelapisan Sosial**

Istilah pelapisan sosial sering disebut juga dengan stratifikasi sosial, berasal dari kata *strata* dan *stratum* yang berarti lapisan. Oleh karena itulah stratifikasi sosial (*social stratification*) seringkali diartikan sebagai pelapisan masyarakat. Pelapisan sosial merupakan suatu sistem yang membedakan individu atau kelompok masyarakat, dan membuatnya terpisah dalam kelas-kelas yang berbeda dengan hak serta kewajiban yang berbeda pula diantara individu atau kelompok dalam lapisan-lapisan tersebut (Maunah, 2015). Konsep pelapisan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat agribisnis menjadi landasan untuk pemahaman lebih lanjut tentang dinamika sosial di sektor pertanian.

Agribisnis sendiri merupakan sektor yang penting dalam perekonomian dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di negara-negara agraris. Pelapisan atau stratifikasi sosial merupakan pembagian atau stratifikasi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki tingkat akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang berbeda. Konsep ini membantu dalam memahami ketimpangan dan dinamika sosial di dalam masyarakat. Pertanian sering kali menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di daerah pedesaan, dan distribusi sumber daya dan peluang dalam sektor ini dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial seperti status ekonomi, pendidikan, dan kepemilikan tanah. Pemahaman tentang stratifikasi sosial diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan peluang, dan merumuskan kebijakan atau strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan inklusi dalam sektor pertanian.

## **5.2 Perspektif Teori Klasik dan Modern tentang Pelapisan Sosial**

Pattinasarany (2016) menyebutkan terdapat dua perspektif teori untuk memahami lebih mendalam mengenai topik pelapisan atau stratifikasi sosial tersebut. Teori yang dimaksud dibagi menjadi teori klasik dan teori modern. Dalam teori sosiologi klasik terdapat beberapa ilmuwan penting yang mendalami pelapisan sosial yaitu Karl Marx dan Max Weber. Sedangkan dalam perspektif teori modern salah satu tokoh penting yang mendalaminya yaitu Pitirim Sorokin. Dalam masyarakat agraris, teori Marx dapat diterapkan dengan mempertimbangkan konflik antara pemilik lahan atau modal dengan petani atau pekerja agraris. Analisis ini dapat mengungkap eksploitasi ekonomi yang mungkin terjadi dalam hubungan produksi pertanian, seperti pemilik tanah yang memperoleh keuntungan yang besar sementara petani atau pekerja agraris mungkin mengalami kondisi kerja yang buruk atau rendahnya upah. Sedangkan penerapan teori Weber terkait konsep kelas, status, dan kekuasaan. Weber dapat diterapkan dalam masyarakat agribisnis dengan mempertimbangkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam sektor pertanian. Misalnya, petani kecil mungkin memiliki status sosial yang rendah dan akses terbatas terhadap kekuasaan

politik dibandingkan dengan pemilik besar atau industri pertanian besar. Pitirim Sorokin membagi struktur sosial menjadi 2 (dua) yakni struktur sosial vertikal dan struktur sosial horizontal. Pelapisan atau stratifikasi sosial identik dengan struktur sosial secara vertikal. Dalam struktur sosial vertikal atau pelapisan sosial tergambar interaksi sosial yang bersifat hierarki memunculkan lapisan atas, lapisan menengah dan lapisan bawah (Rinardi, et.al, 2022).

Pelapisan sosial tersebut dapat bersifat lebih kompleks tergantung pada Tingkat kemajuan atau Tingkat perkembangan masyarakatnya (Raharjo, 2017). Pada dasarnya, struktur sosial khususnya yang bersifat vertikal merupakan suatu sistem pelapisan sosial dalam bentuk hirarki atau penjenjangan secara bertingkat. Kemudian hal ini mengantarkan individu- individu dengan karakteristik yang sama dimasukkan pada lapisan atau strata tertentu sehingga muncullah lapisan sosial masyarakat tinggi, menengah dan rendah. Masyarakat biasanya memiliki pandangan khas atau penilaian yang lebih tinggi terhadap sesuatu yang mereka anggap berharga. Semakin berharga maka semakin tinggi nilainya. Gejala inilah yang memunculkan pelapisan sosial sekaligus menempatkan individu tau sekelompok masyarakat pada lapisan tertentu secara hirarkis. Sesuatu yang dianggap berharga itu akan berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal- hal yang dinilai berharga tersebut antara lain kepemilikan atas kekayaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2017).

### **5.3 Dimensi Pelapisan Sosial Agribisnis**

Analisis tentang dimensi-dimensi pelapisan sosial, termasuk dimensi ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan dalam konteks agribisnis akan memberikan pemahaman yang lebih

mendalam tentang bagaimana struktur sosial mempengaruhi distribusi sumber daya dan peluang dalam sektor pertanian. Berikut adalah penjelasan rinci tentang dimensi-dimensi pelapisan sosial dalam agribisnis:

1. Dimensi Ekonomi:

Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi, dimana dimensi ekonomi mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan pertanian, modal, peralatan, dan pasar. Kelompok-kelompok dalam masyarakat agraris mungkin memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya ini, yang dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dalam sektor pertanian. Dimensi ini mencakup distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan antara berbagai kelompok dalam masyarakat agraris. Misalnya, petani kecil mungkin menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar daripada pemilik lahan besar atau industri pertanian besar, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam tingkat kesejahteraan. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi:

- Lahan Pertanian Pelapisan sosial dapat memengaruhi akses terhadap lahan pertanian. Pemilik lahan besar atau industri pertanian besar mungkin memiliki akses lebih besar terhadap lahan yang subur, sementara petani kecil mungkin terbatas dalam aksesnya.
- Modal dan Teknologi : Kelompok-kelompok dengan pelapisan sosial yang lebih tinggi mungkin lebih mampu untuk mengakses modal finansial dan teknologi pertanian yang canggih, seperti alat pertanian modern dan pupuk. Sementara itu, petani kecil mungkin kesulitan mendapatkan modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Pelapisan sosial mempengaruhi distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi dalam pertanian. Pemilik lahan besar atau industri pertanian besar mungkin memiliki akses lebih besar terhadap lahan, modal, dan teknologi pertanian, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kelompok-kelompok dengan pelapisan sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki standar hidup yang lebih tinggi, dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang mewah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih baik.

### **Dimensi Pendidikan**

Dimensi pendidikan mencakup akses dan tingkat pendidikan dari berbagai kelompok dalam masyarakat agraris. Perbedaan dalam tingkat pendidikan dapat memengaruhi akses terhadap informasi, keterampilan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Petani yang memiliki pendidikan tinggi mungkin memiliki keunggulan kompetitif dalam mengelola usaha pertanian mereka. Pelapisan sosial dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian. Petani dengan pelapisan sosial yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan formal dan pelatihan pertanian, yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha pertanian. Petani dengan pelapisan sosial yang lebih rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam teknik pertanian yang modern dan efisien.

### **Dimensi Kekuasaan**

Dimensi kekuasaan mencakup kontrol dan pengaruh yang dimiliki oleh berbagai kelompok dalam masyarakat agraris. Pemilik lahan besar atau industri pertanian besar mungkin memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar dalam menentukan kebijakan pertanian dan distribusi sumber daya. Kekuatan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat.

Analisis dimensi-dimensi pelapisan sosial ini membantu dalam mengidentifikasi ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam masyarakat agraris serta merumuskan strategi untuk mengatasi masalah ini. Dengan memahami peran ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan dalam pembentukan pelapisan sosial dalam agribisnis, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan inklusi sosial dan kesempatan dalam sektor pertanian bagi semua pihak terkait. Pelapisan sosial dapat memengaruhi keterlibatan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Kelompok-kelompok dengan pelapisan sosial yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dan lebih banyak kesempatan untuk memengaruhi kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pengambilan keputusan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam representasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat agraris, seperti petani kecil, petani perempuan, atau kelompok minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Maunah, Binti. (2015). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Ta'allum* Volume 03 Nomor 01 Juni 2015
- Pattinasarany, Indera Ratna Irawati. (2016). Stratifikasi dan Mobilitas Sosial. FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Raharjo, Dawam. 2017. Pengantar Sosiologi Perdesaan dan Pertanian. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Rinardi, Haryono, et.al. (2022). Struktur Sosial Masyarakat Petani Bawang Merah di Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 9 Nomor 1 Tahun 2022
- Soekanto, Soerjono. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Rajagrafindo Persada. Bandung
- Zuraidah, Ken Izzah. (2022). Stratifikasi Sosial Masyarakat Petani Desa Berdasarkan Kepemilikan Tanah. *Pepatusdu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*. Volume 18 Nomor 1 Mei 2022



## **BAB 6**

# **STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT AGRIBISNIS**

**Dr.Ir. Charles R. Ngangi, MS**  
[charlesr.ngangi@gmail.com](mailto:charlesr.ngangi@gmail.com)

### **6.1 Pengertian Struktur Sosial**

Individu yang berinteraksi atau tergabung dalam keanggotaan kelompok, biasanya memiliki kesamaan tujuan atau topik pembahasan. Hal ini termasuk dalam lingkup keluarga, pertemanan, dan dalam hubungan formal seperti di tempat kerja. Perbedaan-perbedaan ini membentuk kerangka yang membangun struktur sosial dalam masyarakat (Kolip 2015). Setiap kelompok memiliki tujuan yang berbeda-beda, mulai dari kelompok hobi, komunitas kerja, dan beragam lainnya. Perbedaan sosial ini, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan unsur yang membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Struktur sosial sendiri adalah pola-pola yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat (Benjamin et al, 2020)

Pada dasarnya, struktur sosial menurut Jamaludin (2015) dapat dibagi menjadi dua bagian: 1) Struktur sosial statis, yang meliputi cara masyarakat terbentuk secara vertikal dan horizontal. Vertikal mencakup stratifikasi sosial seperti kepemilikan tanah, hewan ternak, keberagaman, dan barang-barang. Sedangkan horizontal mencakup kelompok sosial tertentu seperti kelompok ternak dan komunitas yang memiliki perasaan yang sama.; 2) Struktur sosial dinamis, yang mencakup pola hubungan yang terorganisir. Secara umum, struktur sosial merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang teratur dan berulang

antara dua orang atau lebih. Unit-unit dasarnya bukanlah individu itu sendiri, tetapi aspek-aspek tertentu di antara mereka, seperti peran-peran (contohnya peran sebagai suami atau sebagai anggota dalam kelompok tani) dan organisasi sosial yang menetapkan peran-peran kelompok yang terstruktur.

Ciri-ciri utama dari struktur sosial adalah interaksi yang selektif, teratur, dan dikendalikan oleh berbagai kontrol sosial. Struktur sosial juga merujuk pada tatanan masyarakat dan faktor utama dalam struktur sosial adalah hubungan sosial yang memengaruhi perilaku manusia (Wijayanti, 2019). Tanpa adanya hubungan sosial, suatu masyarakat tidak akan terbentuk. Masyarakat terdiri dari beragam individu yang memiliki karakteristik yang berbeda. Purwasih & Wijayanti (2017) menyatakan, untuk memudahkan pengenalan terhadap struktur sosial, penting untuk memahami beberapa ciri yang dimilikinya. Struktur sosial memiliki sifat yang abstrak, yang berarti bahwa struktur sosial tidak dapat disaksikan atau diraba secara langsung

Beberapa pakar telah mengemukakan pandangan mereka mengenai definisi struktur sosial:

1. Parson: struktur sosial adalah bagian dari sistem sosial yang cenderung lebih stabil daripada fungsi-fungsi sosial lainnya.
2. Koentjaraningrat: struktur sosial adalah kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara berbagai unsur dalam masyarakat.
3. Raymond Firth: konsep struktur sosial berfungsi sebagai alat analisis yang membantu dalam memahami perilaku manusia dalam konteks kehidupan sosial.

4. James M: struktur sosial mencakup pola-pola khas dalam suatu kelompok, termasuk hubungan antarindividu, antara individu dan kelompok, serta antarkelompok.
5. Evans-Pritchard mengartikan struktur sosial sebagai hubungan-hubungan yang konsisten dan mengikat kelompok sosial dalam unit yang lebih besar.

## **6.2 Fungsi Struktur Sosial**

Struktur sosial dalam masyarakat agribisnis terbentuk dengan tujuan agar individu bersedia mengambil status-status sosial dan memainkan peran mereka sesuai dengan harapan dalam masyarakat. Karena sejatinya agribisnis merupakan konsep menyeluruh tentang proses pertanian yang mencakup persiapan faktor produksi, budidaya, pengolahan (agroindustri), pemasaran, infrastruktur yang diperlukan, dan kegiatan pembinaan yang diperlukan (Karmini, 2020). Sehingga petani dapat dianggap sebagai sistem sosial, yang merupakan pola interaksi sosial yang terorganisir dan terinstitusi. Karakteristik utama dari sistem sosial ini adalah struktur sosial yang mencakup hierarki status dan peran di dalam suatu unit sosial, yang membentuk nilai-nilai dan norma yang mengatur interaksi antarstatus dan peran tersebut. Struktur sosial juga melibatkan unsur-unsur sosial seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, dan lapisan sosial. Petani, sebagai bagian dari struktur sosial, melakukan tindakan sosial dengan tujuan mencapai keinginan tertentu.

Struktur sosial dalam masyarakat agribisnis melibatkan pola hubungan sosial, interaksi yang intens, dan menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan, yang akhirnya membentuk pola terorganisir serta fungsi dan peran yang ada dalam struktur sosial. Semakin penting suatu status, semakin sedikit individu yang dapat mencapainya dan semakin besar

imbalan yang diberikan oleh masyarakat. Perbedaan dalam imbalan yang diterima oleh individu antara strata atas dan strata bawah inilah yang menyebabkan stratifikasi sosial (Purwasih, 2014). Secara umum, fungsi pembentukan struktur sosial dalam masyarakat agribisnis meliputi:

#### 4. Fungsi Kontrol

Dalam konteks peran dan status, struktur sosial dalam masyarakat agribisnis dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ini berarti, struktur sosial dapat mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam masyarakat. Dengan menyadari peran dan status yang dimiliki dalam struktur sosial, petani akan cenderung untuk mematuhi norma dan nilai masyarakat. Hal ini dapat memastikan bahwa sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat agribisnis tetap terjaga dengan baik. Sebagai contoh, kelompok tani akan menerapkan kontrol terhadap proses usaha agribisnis untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Melalui kontrol yang efektif, setiap anggota kelompok dapat menjalankan peran dan statusnya secara optimal dalam kegiatan agribisnis

#### 5. Fungsi Identitas

Struktur sosial membawa ciri khas yang membedakan masyarakat agribisnis. Ciri-ciri ini memberikan identitas unik, sehingga struktur sosial dapat berperan sebagai penanda identitas bagi suatu kelompok. Kelompok yang memiliki kesamaan dalam latar belakang, ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosial petani sebagai ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok lain. Struktur sosial mendorong petani untuk memiliki ciri atau identitas tertentu saat memainkan peran dan status sosial mereka.

## 6. Fungsi Pembelajaran

Perbedaan dalam struktur sosial masyarakat agribisnis bisa dipelajari sebagai objek dalam ilmu sosial. Pembelajaran ini terkait dengan norma-norma yang berlaku di dalam suatu kelompok tani. Harapannya, anggota kelompok akan mampu berperilaku sesuai dengan harapan dari kelompok tersebut. Dalam konteks pembelajaran, struktur sosial berperan sebagai landasan untuk menegakkan disiplin sosial di dalam kelompok atau masyarakat. Dalam proses ini, individu atau kelompok akan memperoleh pemahaman dan kesadaran mengenai norma, kebiasaan, dan nilai-nilai kelompok atau masyarakat tersebut.

### 6.3 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah konsep dalam sosiologi yang mengacu pada pembagian masyarakat secara vertikal menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah berdasarkan kriteria tertentu (Ngangi 2018) Seiring waktu, masyarakat membentuk struktur yang jelas, termasuk kebiasaan, cara hidup, nilai, norma, dan adat istiadat. Struktur sosial yang terbentuk ini mengarah pada spesialisasi dalam masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan perbedaan status sosial antar individu. Perbedaan status sosial di masyarakat diikuti oleh perbedaan peran yang sesuai dengan status sosial individu. Ini menghasilkan pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial, pada dasarnya, merupakan kerangka konseptual untuk memahami dan mendefinisikan satu aspek dari organisasi sosial. Stratifikasi dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat (Syarbaini & Fatkhuri, 2016)

Essensi dari stratifikasi sosial adalah bahwa setiap individu memiliki beberapa posisi sosial dan memainkan

beberapa peran, memungkinkan klasifikasi mereka ke dalam kategori status-peran. Klasifikasi ini didasarkan pada posisi relatif dari peran yang mereka mainkan secara keseluruhan. Stratifikasi sosial didefinisikan, baik secara eksplisit maupun implisit, sebagai sistem fungsional yang mengakui perbedaan dan peringkat posisi dalam kelompok, asosiasi, komunitas, dan masyarakat.

Dalam masyarakat agribisnis yang umumnya berfokus pada pertanian, tanah atau aset serupa menjadi yang paling berharga. Tanah memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada gelar akademis (Soerjono & Sulistyowati, 2017). Oleh karena itu, bagi petani, kepemilikan tanah menjadi simbol atau penentu status dalam masyarakat. Pada masyarakat agribisnis, simbol status yang dimiliki oleh petani akan menentukan posisi sosial mereka. Selain tanah, aset seperti sepeda motor, mesin penggilingan padi, traktor tangan, dan alat-alat pertanian lainnya juga merupakan simbol status yang jelas bagi petani padi.

Berdasarkan kepemilikan tanah, masyarakat agribisnis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga lapisan stratifikasi sebagai berikut:

1. Lapisan tertinggi terdiri dari kaum petani yang memiliki tanah pertanian dan rumah.
2. Lapisan menengah terdiri dari kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, tetapi memiliki tanah pekarangan dan rumah.
3. Lapisan terendah terdiri dari petani yang tidak memiliki tanah pertanian maupun tanah pekarangan untuk rumah.

Umumnya, dalam masyarakat agribisnis, peran pembuka tanah atau yang disebut sebagai cikal bakal karena mereka adalah orang pertama yang membuka hutan untuk

dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Oleh karena itu, cikal bakal dan keturunannya dianggap sebagai golongan elit di desa dan sering kali menjadi sesepuh atau tokoh yang dihormati. Golongan kedua setelah cikal bakal adalah pemilik tanah atau orang kaya, namun mereka bukan keturunan cikal bakal. Mereka memiliki banyak tanah dan kekayaan karena keuletan dan kemampuan lainnya. Golongan ketiga terdiri dari petani yang hanya memiliki sedikit tanah yang cukup untuk konsumsi sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya, mereka harus bekerja di sektor lain, seperti berdagang kecil-kecilan. Golongan keempat adalah orang yang tidak memiliki tanah tetapi bekerja di sektor pertanian. Kelompok ini sering disebut sebagai buruh tani.

Kelompok cikal bakal adalah kelompok masyarakat dengan jumlah anggota yang sangat terbatas. Di sisi lain, kelompok buruh tani merupakan kelompok terbesar dalam struktur sosial masyarakat pertanian di Jawa. Namun, pelapisan sosial di masyarakat pertanian di luar Jawa, seperti di pedalaman Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua, memiliki kriteria yang berbeda dengan petani di Pulau Jawa. Ini disebabkan oleh luasnya lahan pertanian di luar Jawa yang masih tersedia, sehingga masalah kepemilikan tanah tidak sebesar di Jawa.

Penentuan status seseorang yang dihormati bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola lahan pertanian, termasuk jenis tanaman yang ditanam, teknik penanaman, dan sarana transportasi hasil pertanian. Kondisi masyarakat pertanian di luar Jawa sangat beragam, sehingga sistem stratifikasi sosial mereka juga bervariasi. Namun, secara umum, kelompok dengan pengelolaan pertanian yang maju dan tanah yang luas menduduki strata tertinggi dalam

stratifikasi sosial. Kelompok lain, seperti petani dan buruh, mengikuti di bawahnya

## 6.4 Tipe Struktur Sosial

Praktik-praktik sosial dalam masyarakat agribisnis, juga dikenal sebagai struktur sosial. Struktur sosial merupakan kebiasaan yang berulang dan terorganisir dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Struktur sosial terbagi menjadi tiga tipe: signifikasi, legitimasi, dan dominasi. Ketiga tipe struktur sosial ini saling terkait dan saling memengaruhi. Signifikasi memberikan makna simbolik yang kemudian memengaruhi dominasi dan legitimasi individu atau kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan tiga tipe struktur sosial menurut Anthony Giddens (Wijayanti, 2019a):

### 1. Struktur signifikasi (*Signification*)

Struktur Signifikasi (*Signification*) atau sering disebut juga penandaan terkait dengan pemberian simbol, interpretasi, penyebutan, dan penggunaan bahasa. Contoh dari struktur signifikasi termasuk panggilan "ayah" dan "ibu" untuk orang tua.

### 2. Struktur Dominasi (*Domination*)

Struktur dominasi atau penguasaan terkait dengan kontrol atas manusia (politik) dan benda (ekonomi). Contoh dominasi mencakup aturan kelompok yang berlaku dalam kelompok tani, yang mengikat semua anggota kelompok. Sanksi yang diberlakukan kepada mereka yang melanggar aturan dapat memperkuat keberadaan tata tertib tersebut

### 3. Struktur Legitimasi (*Legitimation*)

Struktur legitimasi atau pembenaran terkait dengan keberadaan aturan normatif yang tercermin dalam hukum. Contoh struktur legitimasi meliputi pembayaran gaji oleh pemilik perusahaan kepada karyawan, pemberian sanksi

oleh guru kepada siswa yang bolos sekolah, dan penangkapan pelaku kejahatan oleh polisi.

Berbagai elemen komponen struktur sosial masyarakat agribisnis, Pertama, bila dilihat dari kelompok-kelompok sosial yang terdiri dari lima bentuk, yaitu: 1) Primary group, 2) Communities, 3) Associations, 4) Society, dan 5) Ephemeral Group. Kelompok sosial merujuk pada sekelompok orang yang sadar menjadi bagian dari kelompok tersebut, saling terkait, memiliki identitas bersama, serta tujuan, ideologi, dan struktur yang terorganisir untuk mengatur perilaku anggotanya. Ketika mempertimbangkan struktur sosial pada tingkat mikro, komponen utamanya adalah individu-individu yang memiliki status dan peran dalam kelompok. Selain itu, komunitas merujuk pada "masyarakat setempat" yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki identitas kelompok, dan berinteraksi secara intens antar anggota (Benjamin et al, 2020).

Batas antara *community* dan *society* tidaklah kaku. Namun, istilah *society* lebih umum digunakan. Masyarakat luas merujuk pada kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, seperti sebuah kota, pada suatu waktu tertentu. Asosiasi juga penting dalam masyarakat, yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh individu-individu sesuai dengan peran dan status mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Institusi tidak hanya mencakup pola-pola aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola-pola yang berkaitan dengan asosiasi dalam menjalankan aktivitas tersebut.

Ketiga, kaidah dan norma-norma sosial di dalam kelompok-kelompok masyarakat menetapkan keteraturan dan aturan untuk memastikan ketertiban. Ini didasarkan pada aturan moral yang abstrak, mencakup: 1) Aturan-aturan sosial

yang ditetapkan oleh masyarakat, dan 2) Aturan-aturan prosedural untuk mengatur realitas sosial, yang dikenal sebagai norma. Secara sosiologis, norma dan nilai dapat dibedakan. Norma secara langsung mengatur perilaku manusia, dapat diikuti atau dilanggar, dan bertindak sebagai alat untuk mencapai nilai tertentu. Sebagai contoh, bekerja keras dapat dianggap sebagai norma untuk mencapai kesuksesan, yang merupakan nilai yang lebih besar. Kedua konsep tersebut memiliki hubungan kompleks di dalam masyarakat, mencakup aspek-aspek abstrak seperti moral, nilai, peraturan, dan ide.

Keempat, stratifikasi sosial adalah fenomena umum di masyarakat yang mencakup lapisan-lapisan atau tingkatan dalam kehidupan sosial. Fenomena ini muncul karena adanya ketidaksetaraan sosial yang menghasilkan ranking sosial dan pembagian kelompok dalam strata yang berbeda, membentuk stratifikasi sosial. Kelima, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural society, di mana anggotanya terbagi dalam golongan-golongan berdasarkan status sosial mereka. Faktor-faktor seperti agama, suku bangsa, aliran politik, dan ketidaksetaraan ekonomi menyebabkan kemajemukan dalam sistem budaya, ekonomi, dan politik. Integrasi sosial untuk mencapai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia menjadi perhatian penting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin, Susetyo, Mulyaningsih, H. (2020). *Struktur Sosial*. Pusaka Media. Bandar Lampung
- Jamaludin, A. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Karmini. (2020). *Dasar-dasar Agribisnis*. Mulawarman University Press.
- Kolip, U., Setiadi., Elly M. (2015). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana.
- Ngangi, C. (2018). *Sosiologi Pertanian*. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) Universitas Sam Ratulangi.
- Purwasih, J., Janah, Y., & Gumilar, F., Kusumataro, S. (2014). *Ensiklopedia Sosiologi: Struktur Sosial*. Jakarta. Cempaka Putih.
- Purwasih, J., Wijayanti F. (2017). *Struktur dan Mobilitas Sosial*. Cempaka Putih. Klaten, Jawa Tengah
- Soerjono, S., Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi suatu pengantar (Revisi)*. Rajawali Pers.
- Syarbaini, S. Fatkhuri (2016). *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wijayanti, F., (2019). *Mengenal Struktur Sosial Masyarakat*. Cempaka Putih PT. Klaten, Jawa Tengah
- Wijayanti, F. (2019). *Bentuk-bentuk Struktur Sosial*. Cempaka Putih PT. Klaten, Jawa Tengah



## **BAB 7**

# **MOBILITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT AGRIBISNIS**

**Dr. Irmayani, S.P, M.Si**

[irmaumpar@yahoo.co.id](mailto:irmaumpar@yahoo.co.id)

### **7.1 Pengertian Mobilitas Sosial**

Mobilitas mempunyai banyak arti yang berbeda-beda, pertama-tama merupakan perpindahan fisik (pergerakan geografis), khususnya perpindahan tempat tinggal (menetap/sementara) dari suatu tempat ke tempat lain. Kedua, mobilitas sosial, yaitu perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Menurut (Horton & Hunt, 1999), mobilitas sosial adalah perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial juga dapat diartikan perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas sosial menyebabkan terjadinya perubahan, pergeseran, peningkatan, atau penurunan tingkat sosial seseorang atau sekelompok orang. Mobilitas sosial bisa dalam bentuk kenaikan atau penurunan status sosial dan (seringkali) termasuk dalam hal pendapatan yang dialami beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok (Suyanto & Sutinah, 2004).

Dalam sosiologi, mobilitas sosial mengacu pada pergerakan status antar kelas sosial. (Soekanto, 1990) mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Menurut (Tetiani, 2005) Mobilitas sosial adalah pergerakan individu (atau terkadang kelompok) antara posisi berbeda dalam hierarki sosial

(stratifikasi sosial) dalam suatu masyarakat. Mobilitas sosial merupakan fenomena yang umum terjadi pada entitas sosial.

Mobilitas sosial dikaitkan dengan perubahan status atau status pribadi kelompok menuju keadaan yang lebih buruk, lebih baik atau tetap sama dengan bentuk semula namun di tempat yang berbeda. Tipe-tipe mobilitas sosial pada prinsipnya ada dua macam yaitu vertikal dan horizontal (Soekanto, 2012). Mobilitas secara luas sebagai perpindahan orang dalam ruang sosial (*social space*). Mobilitas sosial bukan hanya mempelajari perpindahan posisi sosial individu-individu, tetapi juga pada konsekuensi dari perpindahan tersebut bagi kelompok-kelompok sosial dan struktur sosial secara keseluruhan dimana individu-individu tersebut berpindah (Pattinasarany, 2016). Mobilitas sosial adalah gerakan sosial atau gerakan sosial yang memuat kedudukan dan peranan seseorang untuk dapat berpindah ke dalam gerakan sosial atau gerakan vertikal horizontal (Sari, 2016).

Mobilitas sosial di dalam kehidupan masyarakat tidak semuanya sama. Terdapat beberapa bentuk dan sifat mobilitas, di antaranya terbuka, tertutup dan campuran. Masyarakat yang memiliki sifat mobilitas terbuka memungkinkan anggota masyarakatnya melakukan perpindahan status sosial dalam stratifikasi yang ada, baik itu mobilitas vertikal maupun horizontal. Sedangkan pada masyarakat yang memiliki sifat mobilitas tertutup tidak memberikan ruang bebas kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan perpindahan status sosial, hanya orang-orang dan kelompok tertentu saja yang memiliki akses perpindahan status. Begitupun dengan mobilitas campuran, sifat mobilitas ini adalah kombinasi antara mobilitas terbuka dan tertutup (Alamsyah, 2020).

## 7.2 Jenis-jenis Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe, yaitu mobilitas sosial horizontal dan vertikal. Mobilitas sosial horizontal diartikan sebagai gerak perpindahan dari suatu status lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi, dalam mobilitas sosial horizontal ini, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sedangkan mobilitas sosial vertikal, yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu status sosial ke status sosial lainnya, yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal ini jika dilihat dari arahnya maka dapat dirinci atas dua jenis, yaitu gerak perpindahan status sosial yang naik (*social climbing*) dan gerak perpindahan status yang menurun (*social sinking*).

Sorokin dalam (Soekanto, 2015) mengatakan, ada dua gerakan sosial dasar. Pertama, pergerakan sosial horizontal, yaitu perpindahan status individu atau kelompok dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya dalam tingkat yang sama. Misalnya seorang petani kecil berubah menjadi pedagang kecil. Status sosialnya tetap sama dan relatif stabil. Kedua, mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak seimbang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut arahnya, gerakan sosial vertikal secara spesifik dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1) Gerak sosial vertikal naik, berupa masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi yang telah ada sebelumnya atau terbentuknya suatu kelompok baru, yang kemudian menempatkan dirinya pada tingkat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu dalam kelompok tersebut. 2) Gerakan sosial vertikal ke bawah (*social immersion*), berupa turunnya status individu ke kedudukan inferior atau turunnya

status suatu kelompok individu yang dapat berupa suatu disintegrasi dalam kelompok sebagai kesatuan.

Secara prinsip terdapat dua macam tipe gerak sosial yakni Gerak Sosial Horizontal dan Gerak Sosial Vertikal. Gerak Sosial Horizontal adalah peralihan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya sederajat. Sedangkan Gerak Sosial Vertikal diartikan sebagai perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat ((Soekanto, 2015).

Mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu mobilitas sosial antar-generasi (*intergenerational mobility*) dan intra-generasi (*intragenerational mobility*). Mobilitas sosial antar-generasi mengkaji hubungan status sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama dari orang tua kepada anak. Penelitian mungkin berfokus pada hubungan antara pandangan ayah dan anak atau pada posisi kelas individu dan kelas tempat mereka tumbuh. (Pattinasarany, 2016). Seseorang yang dapat mencapai status atau kedudukan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, artinya ia telah melakukan mobilitas antar-generasi naik. Sebaliknya apabila status atau kedudukan menjadi lebih rendah berarti ia telah melakukan mobilitas sosial antargenerasi turun (Purwasih et al., 2017).

### **7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial**

Mobilitas sosial terjadi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan mobilitas sosial baik secara individual maupun secara struktural. Faktor struktural adalah ketika status sosial yang dituju oleh individu memang ada atau terdapat tempat untuk diisi sehingga mendorong orang tersebut melakukan mobilitas sosial seperti lowongan

pekerjaan. Sedangkan faktor individual adalah ketika tidak semua tempat dapat dijangkau. Kondisi ini berkaitan dengan kualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, kecakapan, dan keterampilan maka semakin besar kemungkinannya untuk menjangkau posisi tertentu (Purwasih et al., 2013).

Menurut (Suyanto et al., 2007) mobilitas sosial terjadi juga didorong oleh beberapa faktor pendorong. adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial pada masyarakat modern, yakni. (1) Faktor struktural, yakni relatif dari kedudukan tinggi yang biasa diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja adalah faktor struktural; (2) Faktor individu yang dimaksud adalah kualitas orang per orang, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilannya, keterampilan pribadi, dan lain-lain termasuk kemujuran yang menentukan siapa yang akan berhasil mencapai kedudukan itu.

Adapun yang termasuk dalam cakupan faktor struktural antara lain:

- 1) Struktur pekerjaan masyarakat yang mengandalkan kehidupan ekonominya pada bidang pertanian dan bahan baku, cenderung memperluas lapangan kerja di tingkat bawah dan membatasi di tingkat menengah ke atas. Hal ini mengakibatkan mobilitas sosial yang cenderung rendah pada masyarakat pertanian. Di sisi lain, masyarakat bergantung pada kehidupan ekonominya pada industri cenderung memperluas lapangan kerja di tingkat menengah dan atas. Itulah sebabnya, mobilitas sosial dalam masyarakat industri cenderung tinggi.
- 2) Perbedaan tingkat kelahiran (*Fertilitas*) pada masyarakat dengan status sosial lebih rendah, angka kelahiran seringkali lebih tinggi dibandingkan masyarakat dengan

status sosial rata-rata atau lebih tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan angka kelahiran yang sangat mencolok antara kabupaten dan kota.

Faktor individu adalah kualitas seseorang baik dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Adapun faktor individu terdiri atas perubahan kemampuan dan orientasi sikap terhadap mobilitas.

- 1) Perubahan kemampuan pendidikan dan keterampilan akan memengaruhi perubahan kemampuan seseorang, dan secara otomatis akan berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Misalnya, seorang tukang ojek setelah mengikuti kursus mengemudi mobil maka ia mampu menjadi sopir.
- 2) Orientasi Sikap terhadap mobilitas. Perubahan sikap dapat mendukung dan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Contoh sikap pro mobilitas adalah keinginan untuk maju atau beradaptasi dengan lingkungan. Sementara itu, sikap yang menghambat mobilitas antara lain bersikap masa bodoh, tidak peduli dengan lingkungannya, dan pasrah dengan keadaan tanpa mau berusaha.
- 3) Status Sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketidakpuasan status yang diwarisi dari orang tuanya dapat menjadi penyemangat untuk memperjuangkan status atau kedudukan yang lebih baik dari orang tuanya.
- 4) Faktor situasi ekonomi. Kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan bagi penduduk di daerah tertinggal mendorong mereka melakukan urbanisasi menuju kota-kota besar dengan harapan kehidupan ekonomi yang lebih baik.
- 5) Faktor Situasi Politik Situasi politik yang tidak menentu, seringkali menimbulkan ketidakpastian jaminan keamanan,

dapat mendorong masyarakat untuk keluar dan pergi ke tempat lain.

- 6) Faktor kependudukan. Bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk berdampak pada pemukiman kecil, kualitas lingkungan yang buruk, menyusutnya kesempatan kerja, kemiskinan, dan lain-lain, yang dapat mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke lokasi lain.
- 7) Faktor keinginan melihat daerah lain. Hal ini tampak pada fenomena *tourisme*, orang mengunjungi daerah atau tempat tertentu dengan tujuan sekedar melihat sehingga menambah pengalaman atau bersifat rekreasional.

Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial adalah : 1) Faktor kemiskinan yang dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Contohnya, seorang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayai, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. 2) Faktor diskriminasi kelas yang dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan, sehingga hanya sedikit orang yang mampu mendapatkannya. 3) Faktor perbedaan ras dan agama dapat menghambat mobilitas sosial. Perbedaan kelas rasial, seperti yang terjadi di Afrika Selatan di masa lalu, dimana ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam untuk dapat duduk bersama-sama di pemerintahan sebagai penguasa (*Sistem Apharteid*). 4) Faktor perbedaan jenis kelamin (*gender*) dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya.

## 7.4 Dampak Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial memungkinkan seseorang untuk menduduki status sesuai dengan keinginan tetapi terdapat beberapa kerugian disamping manfaatnya. Beberapa kerugian mobilitas sosial antara lain adalah memungkinkan terjadinya ketidakpuasan dan ketidak-bahagiaaan karena impian yang diidam-idamkan tidak semuanya berjalan dengan mudah (Suyanto et al., 2007).

Secara khusus, (Horton & Hunt, 1999) mencatat sejumlah dampak negatif dari mobilitas sosial vertikal, seperti kekhawatiran akan berkurangnya status sosial jika terjadi mobilitas ke bawah, stres dalam menjalankan peran baru setelah kehilangan status, peningkatan posisi, perpecahan dalam hubungan antar individu. anggota masyarakat kelompok primer kelompok yang mula-mula seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Secara umum dampak mobilitas sosial bagi masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif, 1) Dampak Positif a) Mendorong seseorang untuk lebih maju b) Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. 2) Dampak Negatif a) Timbulnya konflik. Konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi tiga bagian, sebagai berikut. (1) Konflik antar kelas (2) Konflik antar kelompok sosial. Konflik ini dapat berupa konflik antara kelompok sosial yang masih tradisional dengan kelompok sosial yang modern dan proses suatu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial lain yang memiliki wewenang. (3) Konflik antargenerasi b) Berkurangnya solidaritas kelompok Dampak lain mobilitas sosial dari faktor psikologis antara lain sebagai berikut. (1) Menimbulkan ketakutan (2) Adanya gangguan psikologis bila

seseorang turun dari jabatannya (*post power syndrome*) (3) Mengalami frustrasi.

## **7.5 Mobilitas Masyarakat dalam Agribisnis**

Mobilitas sosial yang terjadi pada petani karet yaitu mobilitas sosial vertikal dari petani karet ke pertambangan emas. Faktor utama yang mendorong mobilitas sosial adalah kondisi sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari pendapatan penambang emas yang lebih tinggi daripada pendapatan petani karet. Perpindahan mata pencaharian dari petani karet ke penambang emas membawa perubahan terhadap ekonomi masyarakat. Perubahan pekerjaan petani karet ke penambang emas yang dilakukan mengakibatkan kondisi ekonomi semakin baik dan meningkat dari masa sebelumnya (Ardiansyah., 2015).

Hasil penelitian (Sari, 2016) menggambarkan bahwa saluran mobilitas sosial dalam keluarga petani suburban terdiri atas:

1. Saluran pendidikan. Keberhasilan anak petani yang dengan pendidikannya dapat merubah kedudukannya menjadi lebih baik. Kegagalan anak petani yang memiliki keinginannya sendiri untuk tidak meneruskan sekolah dengan alasan membuang-buang waktu atau biaya yang mahal.
2. Saluran organisasi ekonomi. Anak petani ketergabungannya dalam organisasi pekerjaan yang menghasilkan gaji/pendapatan, sehingga dapat menopang kehidupan keluarga petani suburban. Namun kegagalan pun terjadi karena meskipun banyaknya pengalaman pekerjaan dari anak petani tapi akhirnya tidak satu pun pekerjaan yang sesuai bagi dirinya sehingga akhirnya adalah menganggur.

3. Saluran pernikahan. Dengan menikah derajat seseorang dapat naik karena mengikuti derajat suaminya yang tinggi. Namun kegagalan pun terjadi dimana terjadinya perceraian yang mengakibatkan terjadinya pengangguran.

Mobilitas sosial petani pekebun dijelaskan bahwa seorang suami disamping berkerja mencari nafkah, dia berkewajiban juga mengurus rumah tangga pada saat sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja. Seorang istri memiliki banyak peran, selain mengurus suami dan anak-anaknya, dia juga mampu mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga dan meningkatkan penghasilan keluarga. Meskipun petani pekebun yang seharusnya menaikkan kesejahteraan namun malah sebaliknya kesejahteraan itu tidak mereka dapatkan (Hidayati, 2015).

Beberapa kasus misalnya tingkat mobilitas sosial yang mempengaruhi petani jeruk yang melakukan peralihan ke petani sawit ialah faktor keadaan ekonomi serta tanaman yang mudah mati sehingga membuat petani harus menggantikan tanamannya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dominan yang terjadi ketika petani jeruk beralih ke petani sawit yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas. Dampak dan konsekuensi mobilitas sosial yang dirasakan oleh petani jeruk ketika beralih ke petani sawit yakni: dampak positifnya bisa menumbuhkan lapangan kerja serta negatifnya bisa menumbuhkan kecumburuan sosial dan konflik antar kelas (Rahmat & Sulistyarini, 2015).

Proses mobilitas sosial petani padi sawah di Desa Penyasawan sangat mempengaruhi pekerjaan mereka dan sekaligus merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan existensinya, dimana mereka harus bekerja keras untuk mencari nafkah dan kehidupan terus berlanjut (Irmayani et al., 2022) dan perpindahan lahan itu berpengaruh pada

pendidikan anak-anak nya. Tetapi lahannya telah beralih dari pertanian padi ke kegiatan non-pertanian seperti penanaman karet, penanaman kelapa sawit, perumahan dan konstruksi komersial. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial petani padi, yaitu: faktor ekonomi, faktor umur, faktor generasi dan faktor alam (Yuliani & Kadarisman, 2019).

Rendahnya harga jagung serta harga bahan-bahan dalam bertani jagung yang cukup mahal terutama harga bibit jagung mengakibatkan pendapatan masyarakat kurang. Jagung membutuhkan modal yang banyak dalam berusahatani, sistem cara kerja yang berat dan harus melakukan gotong-royong antar masyarakat petani dalam berusahatani jagung. Adanya produksi nilam yang harga jual yang tinggi memungkinkan masyarakat mencapai mobilitas profesional dan tidak memerlukan modal besar terlalu banyak, serta cara kerjanya yang ringan (Nursida, 2017).

Mobilitas pekerja migran pertanian meliputi dua jenis, yaitu (a) perpindahan jenis tenaga kerja dari sektor non pertanian ke sektor pertanian, seperti sebelumnya bekerja sebagai tukang bangunan berpindah ke petani sawah atau dari penjual kelapa ke petani sawah. (b) Perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor pertanian, seperti dari petani padi ke petani karet dan sebaliknya, dari petani karet ke sawah. Mobilitas: pekerjaan yang dilakukan berdampak pada kondisi peningkatan dan penurunan ekonomi petani transmigran. Penyebab mobilitas pekerjaan petani transmigran adalah: (a) Kondisi ekonomi menjadi faktor penarik untuk melakukan mobilitas pekerjaan agar mencapai kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup lebih baik, (b) Peluang menjadi faktor pendorong karena bisa bekerja di bidang yang lebih baik (Yunita & Nopianti, 2022).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2020). *Mobilitas Sosial pada Keluarga Petani Karet Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Ardiansyah. (2015). Mobilitas Sosial Petani Karet ke Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Koto Tuo Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Jom FISIP*, 2(2), 1–13.
- Hidayati, Fitroh. (2015). Mobilitas Sosial Petani Perkebun Desa Bukit Lingkar di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM FISIP*, 1(2).
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1999). *Sosiologi*. Erlangga.
- Irmayani, I., Sahabuddin, T., & Muh Iqbal, P. (2022). *Eksistensi Nilai-Nilai Lokal Petanian* (M. Masnur, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nursida. (2017). *Mobilitas Masyarakat Tani Jagung Ke Tumbuhan Nilam Di Desa Kalitata Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pattinasarany, I. (2016). *Stratifikasi dan mobilitas sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwasih, Gita, J. H., & Wijayanti, F. (2013). *Ensiklopedia Sosiologi Struktur Sosial*. Cempaka Putih.
- Purwasih, Gita, J. Hesti., & Wijayanti, F. (2017). *Struktur dan Mobilitas Sosial*. Cempaka Putih.
- Rahmat, J., & Sulistyarini, P. (2015). *Analisis Mobilitas Sosial Vertikal Petani Jeruk Ke Petani Sawit di Desa Semparuk Kabupaten Sambas*. Untan Pontianak.

- Sari, K. H. B. (2016). Mobilitas Sosial Antar-Generasi Petani Sub-Urban di Kelurahan Sepanjang. *Jurnal Paradigma*, 4(1).
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2004). *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Suyanto, Bagong., & Narwoko, D. J. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (2nd ed.). Prenada Media Grup.
- Tetiani, Ani. (2005). *Memudarnya Dualisme Ekonomi: Studi Mobilitas Sosial Komunitas Perkebunan Teh Kertamah Pangalengan, Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Yuliani, P., & Kadarisman, Y. (2019). Mobilitas Sosial Petani Sawah di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Studi Kasus: Alih Fungsi Lahan Pertanian). *JOM FISIP*, 6(1).
- Yunita, A., & Nopianti, H. (2022). Mobilitas Pekerjaan Petani Transmigran di Desa Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(1).



## **BAB 8**

### **DESA DAN PERKEMBANGANNYA**

**Dr. Ir. Rosnita, M.Si**

[rosnitamag@lecturer.unri.ac.id](mailto:rosnitamag@lecturer.unri.ac.id)

#### **8.1 Konsep Desa**

Kata Desa, Dusun, atau Kampung berasal dari bahasa Sanskerta yang biasanya digunakan di wilayah Jawa, Madura dan Bali, di Sumatera Utara disebut (Kuta atau Huta), di Aceh (Gampong), di Maluku (Dusundati), di Minangkabau (Negeri), dan di Palembang (Dusun dan Marga). Kata Desa ini menunjukkan wilayah kesatuan hukum pemerintahan terkecil setelah Kecamatan dalam suatu provinsi yang berada di wilayah Indonesia.

Sebagai suatu kesatuan hukum yang dihuni penduduk atau masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Kata Desa dan sebutanlainnya mulai ada sejak tahun 1979. Dalam sejarah peraturan tentang desa telah terbentuk beberapa peraturan desa yang dapat dilihat pada:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 (Pokok Pemerintahan Daerah),
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 (Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah),
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 (Desa Praja),
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah)
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Pemerintahan Desa),
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan Daerah)

- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah), dan
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Desa)

Undang-Undang Desa disusun dalam rangka mewujudkan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan kesatuan masyarakat hukum adatnya. Hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetangkan dengan Undang-Undang. Pengelolaan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang”

Melalui perpaduan fungsi otonomi masyarakat dan otonomi daerah maka masyarakat kesatuan adat dalam lingkup desa akan terorganisasi menjadi desa dan desa adat. Keduanya memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, dan pembangunan desa yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah kabupaten (kota). Penggunaan sumberdaya dan potensi yang ada diharapkan dari inisiatif dan kreativitas masyarakat secara partisipatif dalam pembangunan.

Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Permen desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang pembangunan pedesaan yang meliputi rencana, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan diprioritaskan terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan yang antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan dasar;
- b) Membangun dan memelihara presarana dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang ada

- c) Mengembangkan perekonomian pertanian skala produktif
- d) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mendorong kemajuan perekonomian, dan
- e) Berdasarkan kebutuhan pedesaan, meningkatkan kualitas keamanan masyarakat pedesaan.

Tujuan pengaturan Desa berdasarkan Pasal 4 Undang Undang No.6 Tahun 2014 adalah:

- (1) Mengakui dan menghormati keberagaman desa yang ada sebelum dan sesudah berdirinya Negara Republik Indonesia.
- (2) Kejelasan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terhadap keberadaan dan jaminan hukum desa demi tercapainya keadilan bagi seluruh warga negara (3) Melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- (3) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.
- (4) Mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel.
- (5) Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.
- (6) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa agar mampu membangun kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- (7) Memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi defisit pembangunan nasional.
- (8) Penguatan masyarakat pedesaan sebagai isu pembangunan.

Kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 merupakan kewenangan yang berasal

dari usaha masyarakat sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat, serta meliputi berikut:

- (1) Pembangunan desa yang menitik beratkan pada kegiatan pelayanan dan penguatan masyarakat.
- (2) Pembangunan desa yang ruang lingkup pengaturan dan kegiatannya hanya berada pada wilayah desa dan masyarakat desa serta berdampak pada wajah desa. Pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat setempat.
- (3) Program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- (4) Program/kegiatan Pemerintah, pemerintah negara bagian, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak ketiga yang diserahkan dan diselenggarakan oleh Desa, dan
- (5) Program/kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah di tingkat desa dan diatur dengan ketentuan hukum mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dapat disimpulkan bahwa Desa dan Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat diwilayahnya dengan partisipasi masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Shuida, 2014).

Cara pandang yang berbeda dalam melihat desa terjadi karena menggunakan sudut pandang yang berbeda. Lahirnya sebutan Desa Adat dan Desa merupakan bentuk dari melihat Desa dari sudut pandang yang berbeda. Inilah semangat yang melandasi lahirnya Undang-Undang tentang Desa (Eko et al., 2014). Tabel 1 merupakan teorisasi baru tentang Desa yang

berbasis pada Desa yang diperoleh dari pengetahuan berjalan dari banyak pengalaman perjalanan.

**Tabel 3** Perspektif desa lama dan desa baru

	<b>Desa Lama</b>	<b>Desa Baru</b>
Payung hukum	UU No.32/ 2004	UU No.6/2004
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota ( <i>local state government</i> )	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Kedudukan dan peranan kabupaten/kota	Kewenangan besar yang dimiliki oleh kabupaten/kota dalam mengurus desa	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang luas mengenai pengelolaan desa, termasuk mengatur dan mengurus urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery</i> kewenangan dan program	Target	Mandat
Tempat politik	Desa merupakan tempat kegiatan proyek dari atas desa	Penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan lainnya berlokasi di desa
Posisi dalam	Objek	Subjek

pembangunan		
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan pelaksanaan	Pemangkasan sektoral dan posisi	Fasilitasi, partisipasi dan koordinasi

Sumber: Eko et al., 2014

Cara pandang terhadap terhadap desa :

*Pertama*, perspektif desa sebagai kampung halaman seseorang.

Bagi orang yang merantau meninggalkan kampung halamannya melalui transmigrasi, urbanisasi, atau mobilitas sosial. Kondisi mudik lebaran merupakan contoh nostalgia para perantau terhadap kampung halamannya dan sanak saudaranya.

*Kedua*, cara pemetaan yang terlihat desa merupakan wilayah administrasi dan organisasi pemetaan yang paling kecil, yang merupakan hirarki terendah pemerintahan di Indonesia.

*Ketiga*, cara pandang yang melihat desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Kegiatan pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Desa lama (Pasal 200 UU No. 32/2004), menggambarkan bahwa Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Desa baru (UU No.6/2014), desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi (Eko et al., 2014).

## 8.2 Pembangunan Dan Perkembangan Desa

Pembangunan desa dapat dipelajari sejarahnya dari masa ke masa, masa lalu hingga masa kini yang terus mengalami perkembangan dan transformasi. Implementasi pembangunan desa diwujudkan melalui “Semboyan” pembangunan desa. Semboyan yang dimunculkan digali dari nilai-nilai filosofi lokal, seperti di Sleman “Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Titi Tentrem Kerta Raharja” yang bermakna mewujudkan kondisi masyarakat yang makmur, damai, aman, teratur dan sejahtera. Semboyan di Papua Barat “Tananaripi Sosanie Besien” yang memiliki makna bekerja keras untuk mendapatkan kesenangan hati.

Konsep pembangunan desa dilakukan melalui kewenangan lokal berskala desa dengan menyusun perencanaan desa, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi melalui perkembangan masyarakat dan pelibatan partisipasi aktif masyarakat desa. Melalui tatakelola pemerintahan desa yang baik dan pelibatan partisipasi aktif masyarakat maka keberhasilan pembangunan desa dapat dicapai sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 menguraikan tentang Kewenangan Desa

Sejalan dengan sejarah perkembangan konsep pembangunan tersebut, filosofi pembangunan saat ini telah mengalami transformasi. Model lama pembangunan yang menggambarkan top down, hirarkhis, otokratis, sektoral dan *state centric*, sementara paradigma baru bersifat *society centric*: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipasi, emansipatoris dan seterusnya.

**Tabel 4** Perbedaan dua pendekatan pembangunan pedesaan, paradigma lama dan paradigma baru

No	Paradigma Lama	Paradigma Baru
1	Fokus pada pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
2	Retribusi oleh negara	Proses demokrasi dan keterlibatan warga terpinggirkan dalam pengambilan keputusan
3	Otoritiasme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan	Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll
4	Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil	Negara membuat lingkungan yang memungkinkan
5	Negara menyediakan layanan sosial	Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial
6	Transfer teknologi dari negara maju	Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal, pengembangan teknologi secara partisipatoris
7	Transfer aset-aset berharga pada negara maju	Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin
8	Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah	Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat
	Sektoral	Menyeluruh dan terpadu
	Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek	Organisasi belajar non-hirarkhis
	Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar	Peran negara: menciptakan kerangka pengakuan yang kondusif, membagi kekuasaan,

	mendorong tumbuhnya institusi-institusi lokal
--	-----------------------------------------------

Sumber: (Eko et al., 2014)

Undang Undang No.6 Tahun 2014 pada pasal 8 (ayat 1) tentang desa dinyatakan bahwa Pembangunan desa bertujuan mensejahterakan masyarakatnya dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana desa, membangun dan mengembangkan ekonomi desa, berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dan menjaga serta memelihara lingkungan secara berkelanjutan yang dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan kekeluargaan dan gotong royong melalui kebersamaan dalam mewujudkan keadilan sosial. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa konsep pembangunan desa dilakukan melalui tahapan:

- a) Perencanaan pembangunan desa (jangka menengah enam tahun dan rencana tahunan),
- b) Pelaksanaan pembangunan desa (dilaksanakan sendiri oleh desa dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa, dan memanfaatkan sumberdaya alam desa dan dengan kearifan lokal yang dimiliki), dan
- c) Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa (dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat).

Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 83 UU No.6 Tahun 2014) juga dilakukan oleh desa disamping pembangunan desa. Pembangunan kawasan desa (Permendes No.5 Tahun 2016) adalah pembangunan antar desa yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif sehingga diharapkan mampu mempercepat pembangunan kawasan desa. Rancangan pembangunan ini ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui pembahasan bersama dengan

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Desa yang meliputi:

1. Pemanfaatan dan pengusahaan wilayah desa sehubungan dengan peruntukan kawasan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang provinsi/kota
2. Service yang diberikan guna perbaikan kesejahteraan masyarakat
3. Perbaikan infrastruktur dan perekonomian perdesaan, serta peningkatan teknologi tepat guna
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kegiatan ekonomi.

Dalam mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui kerjasama desa (pasal 91) melalui dua pendekatan yaitu melalui kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dengan tujuan mempercepat pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kerjasama/kemitraan dapat dilaksanakan dalam 3 jenis kemitraan yakni : a) kemitraan antara organisasi berbasis masyarakat (Community Based Organization/CBO), b) kemitraan antara CBO dengan organisasi swasta (non-pemerintah), dan c) kemitraan antara CBO dengan pemerintah (Yalegama et al., 2016). Kerjasama antar desa meliputi:

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang memiliki daya saing,
- b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan
- c. Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerjasama yang telah disepakati melalui musyawarah bersama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala desa dan dilaksanakan oleh badan Kerjasama antar Desa yang terkait dengan :

- a. Pembentukan lembaga antar desa,
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat terlaksana melalui kerjasama antar desa
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar desa,
- d. Penganggaran untuk pembangunan desa, kelurahan, dan perdesaan,

Keikutsertaan dalam program pemerintah daerah di desa:

- a. Pembentukan institusi supralokal, SM.
- b. Penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui program kerjasama antar desa, c.
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan lintas desa,
- d. Alokasi anggaran untuk pembangunan desa, kelurahan, dan perdesaan, e.
- e. Sumbangan untuk program pemerintah daerah dimana desa
- f. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar desa.

Implementasi dari undang undang ini melalui dua pendekatan yakni “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”(Eko et al., 2014) . Perbedaan konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun” disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5** Perbedaan konsep membangun desa dan desa membangun

Item/Isu	Membangun desa (Pembangunan Perdesaan)	Desa membangun (Pembangunan Desa)
Pintu Masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	Functional	Lokus
Level	<i>Rural development</i>	<i>Local development</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	<i>Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.</i>	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll
Tingkat, Ruang Lingkup dan kisaran ukuran	Ruang Lingkup Wilayah spasial dan ekonomi yang mencakup desa-desa.	Dalam kisaran ukuran, desa dan kelurahan
Skema kelembagaan	Perda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi, dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana, dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan,	Menjadikan desa sebagai pusat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan Menjadikan desa sebagai

	sekaligus membangun kesejahteraan	pusat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai, dan melaksanakan	Fasilitasi, supervisi, dan pengembangan kapasitas desa
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai, dan melaksanakan
Hasil	Infrastruktur	

Sumber: Desa Membangun Indonesia (Eko dkk. 2014).

Konsep pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang mengedepankan perdesaan (*rural*). Kondisi budaya dan ciri khas sosial masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan seperti kearifan lokal, karakteristik sosial, struktur demografi, kelembagaan desa, dan budaya serta georafis umumnya masih dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat.

Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa 2016 (Shuida, 2014) menggambarkan dalam pembangunan berbasis perdesaan (*rural-based development*) memprioritas pembangunan pada:

1. Peningkatan kapasitas dan dukungan berkelanjutan terhadap pejabat dan lembaga pemerintah desa.
2. Memenuhi standar minimum pelayanan desa sesuai kondisi geografis.
3. Pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha desa.
4. Mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan keberdayaan, dan membentuk modal sosial budaya pada masyarakat pedesaan.
5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;

6. Pembangunan ekonomi pedesaan untuk mendorong jaringan desa-kota. serta
7. Memantau pelaksanaan peraturan desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan dukungan.

Persoalan yang muncul dalam pembangunan desa adalah bahwa hingga saat ini belum seluruh masyarakat dapat menjangkau dan mengakses pembangunan desa yang telah berhasil dicapai. Mereka ini umumnya masyarakat yang berada dalam lingkaran kemiskinan dan terpinggirkan. Kelompok ini biasanya yang berpendidikan rendah, kaum perempuan, lanjut usia, anak-anak dan kelompok yang berkebutuhan khusus (*difabel*), sehingga tidak merasakan keberhasilan pembangunan desa yang telah dicapai. Faktor yang mempengaruhi arah dan tingkat perkembangan desa adalah lokasi, fasilitas desa dan infrastruktur yang tersedia.

### **8.3 Keuangan Desa**

Keuangan Desa disusun oleh pemerintah desa dan dituangkan dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa serta mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menyebutkan “Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, menjunjung tinggi rasa keadilan dan akal sehat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Desa adalah untuk mengefektifkan program desa secara merata dan berkeadilan, dalam rangka melaksanakan kewenangan desa

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 (Permenku RI, 2016). Perencanaan pembangunan Desa terdiri dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa/ 6 tahun) yang telah harus disusun paling lambat pada Bulan Juni dan telah ditetapkan paling lama 3 bulan sejak pelantikan kepala desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa/ 1 tahun) yang sudah harus selesai disusun paling lama di Bulan Juli dan telah ditetapkan paling lama pada bulan September tahun anggaran berjalan. Tata cara teknis penyusunan RPJM dan RKP Desa diatur dalam Pedoman Pembangunan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa.

RKP Desa berisikan rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa disertai lampiran yang berisikan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah terverifikasi. Pada tahap selanjutnya Kepala Desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pengembangan Desa (Musrenbangdes) dan menyepakati rancangan rancangan RKP Desa yang berisikan prioritas program yang didanai antara lain:

- a. Pagu indikatif desa
- b. Pendapatan Asli Desa
- c. Swadaya Masyarakat Desa
- d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ataupemerintah daerah kabupaten/kota

RKP Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa berisikan:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
- b. Program kegiatan yang menjadi prioritas, dan penganggaran yang dikelola oleh desa
- c. Program, kegiatan, dan anggaran desa prioritas dikelola melalui kerja sama antara desa dan pihak ketiga.
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa diselenggarakan oleh desa atas nama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota.
- e. Penyelenggaraan kegiatan desa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Dana yang dibutuhkan desa dalam melaksanakan RKP Desa dan RPJM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Tujuan pemberian Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, kesenjangan pembangunan antar desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan. Dana desa merupakan keuangan desa dalam membiayai kegiatan dan program desa yang telah disusun dan disepakati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 72 sumber pendapatan desa selain dari APBN yang telah diberikan dapat berasal dari : a) Pendapatan Asli Desa (PAD Desa), b) Pendapatan Transfer Desa (PT) Desa, dan c) Pendapatan lainnya.

Pendapatan Asli Desa (PAD Desa) terdiri dari : a) Hasil usaha, seperti BUM Desa, pasar desa, wisata skala desa, tambak desa yang tidak menggunakan alat berat, tanah kas desa dan lainnya yang diusahakan oleh desa yang sumberdayanya berasal dari desa; b) Hasil Aset, misalnya pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi desa; c) Swadaya, dan partisipasi dan gotong royong yang melibatkan masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang; dan pendapatan lainnya desa.

Pedapatan Transfer Desa (PT) Desa, berasal dari: a) Dana Desa; b) Alokasi Dadan Desa (ADD); c) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Dana Desa, merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran dana desa oleh pemerintah secara menyeluruh dalam APBN setiap tahun.

Besar alokasi anggaran dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk (bobot 30 persen), angka kemiskinan (bobot 50 persen), dan luas wilayah (bobot 20 persen).

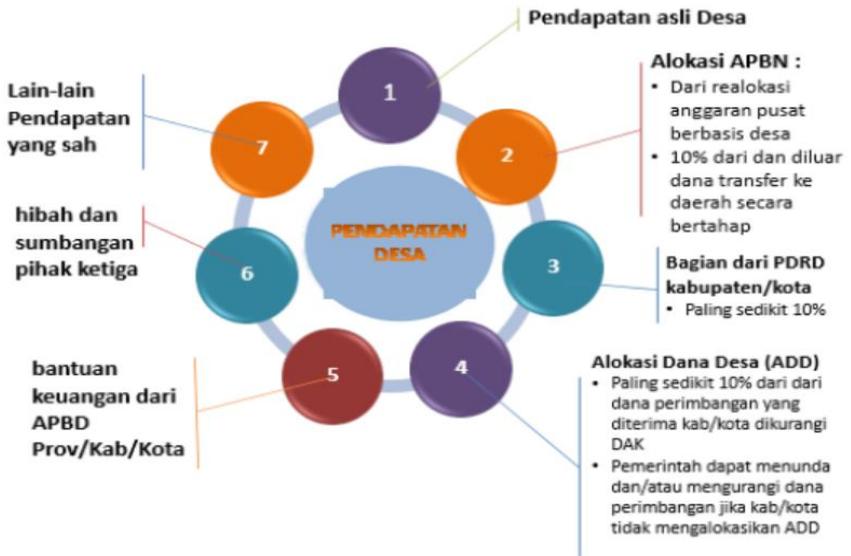
Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Dana ini merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota minimal 10 persen setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya dengan mempertimbangkan: 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, 2) Jumlah penduduk desa, 3) Angka Kemiskinan desa, luas wilayah desa,

dan kesulitan geografis yang penyalurannya dilakukan secara bertahap. Dalam implementasinya ADD memberikan dampak yang positif dan signifikan serta bergulit memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan desa, akan tetapi sebagian desa belum melakukan sosialisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan ADD secara transparansi kepada masyarakat desanya (Mahfudz, 2009)

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, besarnya minimum 10 persen dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan: a) 60 persen merata kepada setiap desa, dan 40 persen dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk percepatan pembangunan desa yang bersifat umum (peruntukan dan penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada desa penerima bantuan) dan bersifat khusus (peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan).

Pendapatan lain Desa yang Sah, berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Sumber pendapatan Dana Desa secara diagram disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1** Sumber pendapatan desa

Sumber: (Permenku RI, 2016)

#### 8.4 Indeks Pembangunan Desa (Ipd)

Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks. Tingkat kemajuan desa diukur menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Dimensi dalam penentuan IPD bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 74 menyatakan Tujuan Pembangunan Desa ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: 1) Kebutuhan Dasar, 2) Pelayanan Dasar, 3) Lingkungan, dan 4) Kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa. IPD 2018 terdiri dari lima dimensi: 1) Pelayanan Dasar, 2) Keadaan Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Publik, dan 5) Administrasi Publik.

Mengacu pada nilai IPD, perkembangan desa dapat digolongkan menjadi 3 yaitu: a) Desa Tertinggal, b) Desa Berkembang dan c) Desa Mandiri (BPS, 2018).

**Tabel 6** IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia, 2018

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sumatera	60,02	59,09	46,15	77,72	54,01	67,85	4,11	25,23	1,48	23 241
Jawa-Bali	67,82	68,31	54,78	81,15	59,14	80,34	0,26	25,28	5,09	23 108
Nusa Tenggara	56,25	53,86	34,41	82,55	45,78	75,25	1,46	3,77	0,13	4 043
Kalimantan	56,66	55,41	40,90	71,01	55,35	71,36	2,24	6,26	0,28	6 624
Sulawesi	60,63	57,81	44,77	83,04	51,81	72,78	1,46	9,83	0,38	8 804
Maluku	52,00	49,08	34,68	73,39	46,30	66,55	1,28	1,66	0,07	2 268
Papua	35,57	26,15	19,76	57,86	42,02	52,24	8,36	1,37	0,02	7 348
Indonesia	59,36	57,65	44,63	77,00	53,60	71,40	19,17	73,40	7,43	75 436

Sumber: (BPS, 2018)

Guna mencapai desa maju dan mandiri, maka pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam upaya meminimalisir desa tertinggal dikembangkanlah Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari: a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS), b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Astika & Subawa, 2021). IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa dan mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat dan karakteristik wilayah. Perkembangan desa dibagi menjadi: a) Desa Mandiri, b) Desa Maju, c) Desa Berkembang, d) Desa Tertinggal, dan e) Desa Sangat Tertinggal (Kementrian Desa, 2020)

Menurut European Union (EU) terdapat 55 indikator yang reliabel untuk pembangunan desa, di antaranya kependudukan dan migrasi: tingkat ketergantungan, *social of weight of young population, rejuvenation rate, substitution rate, demographic labour market index, migrasi netto, average annual population change, decennial population change*. Kualitas hidup/kehidupan social: keamanan lingkungan, pendapatan, consumer oriented services, perumahan. Struktur dan kinerja ekonomi: Struktur dan kinerja pasar tenaga kerja (tingkat pengangguran, tingkat pekerjaan, wirausaha, perubahan tingkat pengangguran jangka panjang, tingkat pencapaian pendidikan); Perusahaan dan inovasi (kepadatan bisnis, *turnover of business*); turisme dan rekreasi (suplai fisik, konsumsi fisik, ketenagakerjaan, pengeluaran turisme), *multifunctionality and agriculture* (diversifikasi usaha, diversifikasi produksi, struktur input, produktivitas), *business infrastructure* (internet untuk bisnis).

Indikator pedesaan menurut World Bank meliputi sosial dan ekonomi dasar, lingkungan, pengurangan kemiskinan, manajemen sumberdaya alam dan biodiversitas, serta kehidupan sosial (kesehatan dan pendidikan).

Indikator pedesaan menurut FAO mencakup pengurangan kemiskinan dengan kesamaan sosial: pendapatan/konsumsi, nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan, akses kelayanan komunitas. Akses terhadap tanah, air, dan SDA lainnya. Akses terhadap input pasar dan jasa. Perkembangan kegiatan diluar pertanian. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Pertumbuhan (kependudukan)

## **8.5 Indek Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri**

Pembangunan adalah merupakan perubahan sosial yang direncanakan dan dikehendaki (*intended social change*). Hasil

akhir pembangunan merupakan visi akhir dari pembangunan yang disebut sebagai dampak pembangunan. Awal pembangunan pedesaan sektor pertanian merupakan sektor yang dominan mengalami pergeseran menuju pemusatan kewilayahan yang memiliki konsekuensi kepada perluasan sektor-sektor pembangunan. Tidak hanya pertanian akan tetapi juga mencakup perindustrian dan jasa, perekonomian, politik dan birokrasi, keamanan, lingkungan dan sumberdaya alam.

Paradigma pembangunan selanjutnya berkembang kepada pembangunan yang berpusat kepada manusia. Perubahan dilakukan melalui proses pemberdayaan, dimana pembangunan berperan pada proses pemberdayaan individu dan kelompok masyarakat. Bank Dunia menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*Community Driven Development/ CDD*) dalam mengelola semua kegiatan pembangunan termasuk kegiatan proyek dalam pengadaan, pelaksanaan, dan pemantauan sendiri di tingkat Desa (Yalegama et al., 2016). Kemandirian Desa terletak pada kemandirian masyarakatnya. Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu sistem nilai, ide yang akan dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari sisi lingkungan ketergantungan adalah bentuk ketidakseimbangan sosial, dimana masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Ketergantungan merupakan persoalan sekelompok masyarakat yang tidak mampu berkembang menuju kepada perubahan. Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif (CDD) dalam mengatasi masalah lokal di dan bekerja secara bersama (kemitraan) maka CDD menjadi konsep yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan pertanian secara

berkelanjutan (Yalegama et al., 2016). Ketergantungan seharusnya merupakan kebutuhan pada jangka pendek dan bukan kebutuhan secara terus menerus dalam jangka panjang. Perlu upaya untuk melakukan kemandirian masyarakat seutuhnya yang didasarkan pada nilai-nilai, keyakinan, kesadaran, kepribadian dan pengalaman dari kesulitan hidup yang dialaminya. Moris, 2013 mengungkapkan bahwa kemandirian masyarakat melalui CDD menjadi sangat penting dilakukan dengan penekanan kepada masyarakat selaku penerima manfaat dari pada penekanan pada tepat waktu, sesuai anggaran dan ruang lingkup (Yalegama et al., 2016)

Kemandirian masyarakat terbentuk dari keluarga dan kelompok masyarakat. Pola hubungan dalam keluarga sesuai dengan peran masing-masing anggota keluarga yang akan menentukan terbentuknya kemandirian keluarga. Proses pembentukan kemandirian keluarga terjadi melalui kepercayaan, pola organisasi dan komunikasi. Agar gerakan masyarakat dapat tumbuh, diperlukan kewenangan pemerintah kepada kelembagaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang akan memunculkan pada inisiatif/kretivitas masyarakat. Menjadi penting dalam pelaksanaan kegiatan/ proyek tentang perspektif masyarakat terhadap faktor-faktor penentu dalam mencapai keberhasilan proyek pemberdayaan (Yalegama et al., 2016). Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, perlu dukungan pemangku kepentingan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui kemandirian masyarakat desa diharapkan dapat terwujud Desa yang Mandiri.

Dalam sejarah perkembangan desa, kita tidak asing dengan istilah otonomi desa. Otonomi desa yang dikenal luas dan dalam berbagai literatur, adalah otonomi asli, bulat dan utuh dan bukan pemberian dari pemerintah. Sementara

konsep Otonomi Desa dituangkan dalam UU No.32/2004, adalah otonomi yang diberikan melalui penugasan atau pendelegasian oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. (Eko et al., 2014).

UU No. 6/2014, tidak mengenal konsep otonomi desa kan tetapi kemandirian desa atau desa mandiri. Konsep Desa Mandiri untuk menggantikan konsep otonomi desa, dimana intervensi pemerintah yang terlalu kuat pada desa tidak akan menciptakan kemajuan dan kemandirian desa. Tidak terdapat definisi baku makna kemandirian desa. Kemandirian desa/ Desa mandiri menurut pendapat berbagai pihak adalah:

- a) Desa mandiri, adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah. Jika terdapat bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya perangsang.
- b) Desa mandiri, adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.
- c) Desa mandiri, adalah desa yang mampu memberi segala sesuatu untuk pembangunan desa.
- d) Kemandirian desa adalah kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan aset dan potensi yang dimiliki.
- e) Kemandirian desa, adalah desa yang tidak bergantung pada instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya, akan tetapi kapasitas dan inisiatif lokal (gagasam, kehendak, dan kemampuan masyarakat) yang kuat yang berbasis pada jaringan dan solidaritas, kebersamaan, kepemimpinan dan kearifan lokal.

Ciri-ciri kemandirian desa adalah :

1. Kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya,
2. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran satu desa-satu perencanaan, sebagai acuan seluruh program pembangunan di desa dan dijalankan secara konsisiten,
3. Sistem tata kelola mendukung aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok *marginal* lainnya.
4. Sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Pada UU No.6/2014 tidak memuat norma tentang prinsip dan ketentuan tentang kewenangan desa. Ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa (Eko et al., 2014):

- a. Kewenangan desa bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga kewenangan yang telah ada yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam UU No.32/2004 dan PP No.7/2005.
- b. Kewenangan desa hanya sebatas pada penganturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa.
- c. Kewenangan desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astika, A. N., & Subawa, N. S. (2021). *Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun*. 5(4), 223–232.
- BPS. (2018). *Indeks Pembangunan Desa 2018* (Masfufah; Tri Suryaningsih; Akhsan Naim (Ed.); 1st ed.). <https://doi.org/>-
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kurniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*. [http://www.academia.edu/download/34492495/Buku\\_Desa\\_Membangun\\_Indonesia\\_Sutoro\\_Eko.pdf](http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf)
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2020). *Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM), Provinsi Kabupaten, Kecamatan, Desa* (1st ed.). KPDT dan Transmigrasi. <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Mahfudz, M. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.33830/jom.v5i1.199.2009>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Permenku RI. (2016). Peraturan menteri keuangan RI Nomor.49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan RI*,

1–47.

Shuida. (2014). *Pengelolaan Buku Bantu. Deputi Koordinasi Pemberdayaan, 6.*

Yalegama, S., Chileshe, N., & Ma, T. (2016). Critical success factors for community-driven development projects: A Sri Lankan community perspective. *International Journal of Project Management, 34(4), 643–659.* <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.006>



## BAB 9

# KOTA DAN PERKEMBANGANNYA

Dr. Ir. Jane S. Tambas, M.Si

[janesulinda@gmail.com](mailto:janesulinda@gmail.com)

### 9.1 Pengertian Kota

Kota (*city*) adalah tempat tinggal dengan segala kompleksitasnya bagi manusia modern. Kota menyediakan berbagai kebutuhan masyarakatnya berupa: sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Kota sebagai sebuah fenomena "urban" memberikan lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sangat menentukan preferensi dan tata perilaku. Kota dalam kehidupan sehari-hari selalu tampak sibuk dengan berbagai kegiatan warga penghuni kota yang membutuhkan tempat berteduh, bekerja, bergaul serta menghibur diri. Sebagai sebuah tempat berkumpul dan tinggal, kota juga disebut dengan permukiman.

Kota acapkali dipahami sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang sangat individual, penuh kemewahan, gedung-gedung yang tinggi menjulang, kendaraan yang lalu-lalang mengundang kemacetan serta perkantoran yang mewah dan pabrik-pabrik yang besar. Kota juga dianggap sebagai tempat tujuan masyarakat pedesaan mencari pekerjaan, karena didasari sebuah *image* bahwa kota adalah tempat kesuksesan seseorang atau sekelompok orang.

Kota secara keseluruhan meliputi kota sebagai tempat tinggal dengan lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhinya, oleh sebab itu di kota dapat dilihat berbagai aspek kehidupan yang antara lain berupa aspek sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan dan sebagainya. Kota

memiliki banyak definisi bergantung pada dimensi dan pendekatan yang digunakan dalam proses mendefinisikannya.

Menurut Bintarto (1989), Kota dari segi geografi merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial- ekonomi yang heterogen bercorak materialistis atau dapat diartikan sebagai lanskap budaya yang diciptakan oleh unsur-unsur alam dan yang tidak alami serta memiliki gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Dari fakta, kota merupakan tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, tempat hidup dan berekreasi. Kelangsungan dan kelestarian kota oleh sebab itu, harus didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai untuk waktu selama mungkin. Sedangkan dari foto udara, kota itu nampaknya sebagai aglomerasi atau pengelompokan bangunan yang dikelilingi atau dibatasi oleh jalur-jalur jalan atau dan sungai-sungai yang diselang-seling dengan kelompok pepohonan besar atau dan kecil.

Namun demikian, pendekatan Bintarto terhadap definisinya masih belum jelas atau sulit menentukan batasan yang tegas mengenai perbedaan antar wilayah perkotaan, apabila menginginkan tinjauan tersebut. Dari pendekatan segi sosial maka pengertian kota seperti yang dipaparkan oleh Bintarto lebih tepat.

Beberapa ahli mendefinisikan kota dengan menekankan pada bentuk-bentuk fisik dari lingkungan kota, adalah sebagai berikut:

1. Smailes (1955), terdapat 3 unsur morfologi kota yaitu penggunaan lahan, pola-pola jalan dan tipe atau karakteristik bangunan.

2. Conzen (1962), mendefinisikan kota berdasarkan unsur-unsur yang serupa dengan dikemukakan Smailes, yaitu perencanaan (*plan*), langgam Arsitektur (*architectural style*) dan penggunaan lahan (*land use*). Berdasarkan Unsur-unsur morfologi kota adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai sebuah kota, baik kota kecil, kotamadya maupun kota metropolitan.
3. Adisasmita (2006), kota diartikan sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan. Suatu kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman yang berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang relatif tinggi, dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti: industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Santoso (2009), kota ideal adalah kota yang mampu mengako-modasi dan menyelaraskan antara aktivitas masyarakat dan bentuk penggunaan lahannya. Kota ideal merupakan kota yang mampu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka transformasi masyarakat secara menyeluruh dari Negara berkembang menjadi Negara yang mampu bersaing secara global.

## 9.2 Ciri-Ciri Kota

Bardo (1982), mengemukakan bahwa ada 3 ciri kehidupan kota yang menjadi pusat perhatian sosiologi dalam melihat kota, yaitu 1) struktur kota; 2) gaya hidup perkotaan (urban); dan 3) organisasi sosial. Ketiga inti kajian sosiologi tersebut kemudian ditambah dengan penelusuran terhadap

faktor-faktor yang mempengaruhi (seperti perencanaan kota) dan akibat dari perkembangan pola tertentu (seperti kerusuhan kota, abnormalitas kehidupan, dan sebagainya).

Bintarto (1989), mengemukakan beberapa ciri kota yang dilihat dari ciri fisis dan ciri sosial. Ciri fisis dapat ditunjukkan dari: 1. Tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan. Pasar dan pertokoan selalu merupakan titik api atau fokus point dari suatu kota menjadi pusat perdagangan, terlebih dengan adanya penambahan penduduk.. Daerah-daerah inti kota yang merupakan akumulasi dari gedung-gedung, pertokoan, kantor-kantor, bank-bank, bioskop, pasar dan lain sebagainya dikenal dengan istilah pusat daerah-daerah kegiatan yang adalah jantung dari kota atau *downtown*. 2. Tempat-tempat untuk parkir. Daerah-daerah pusat kegiatan di kota dapat hidup karena adanya jalur jalan, alat pengangkutan sebagai wadah arus penyalur barang dan manusia harus mendapatkan tempat untuk berhenti ditempat-tempat tertentu yang disediakan untuk tempat parkir. 3. Tempat-tempat rekreasi dan olah raga. Tempat-tempat ini adalah penting bagi manusia. Ruang untuk ini dapat digolongkan menjadi tiga: 1) halaman bermain atau *playlot* yang dimanfaatkan oleh anak-anak tingkat *play group* dan TK. 2) halaman bermain kelompok tetangga atau *neighborhood playground* untuk anak-anak umur 6 sampai 14 tahun. 3) lapangan bermain atau *playfield* untuk remaja dan orang dewasa. Meliputi lapangan segala permainan bola dan juga kolam renang jg lapangan golf dan sebagainya. Sebagai ciri sosial adalah sebagai berikut: 1. Pelapisan sosial ekonomi. Perbedaan tingkat pendidikan dan status sosial dapat menyebabkan keadaan yang heterogen. Dalam hal ini, pelapisan sosial ekonomi dapat ditemukan sebagai salah satu ciri sosial di kota. 2. *Individualisme*. Perbedaan status sosial ekonomi maupun kultural dapat

menimbulkan sifat *individualisme*. Sifat kegotongroyongan yang murni sudah jarang dijumpai di kota. Andaikan ada sudah dalam bentuk yang lain. 3. Toleransi sosial. Kesibukan masing-masing warga kota dapat menimbulkan kurangnya perhatian pada sesamanya. Apabila berlebihan akan menimbulkan sifat tak acuh atau kurang mempunyai toleransi sosial. 4. Jarak sosial. Kepadatan penduduk di kota-kota pada umumnya cukup tinggi. Biasanya sudah melebihi 10.000 orang/km. Secara fisik, warga kota berdekatan di jalan, di bioskop, di pasar dan ditempat lain, tetapi dari segi sosial berjauhan. 5. Penilaian Sosial. Perbedaan status, perbedaan kepentingan dan situasi kondisi kehidupan kota mempunyai pengaruh terhadap sistem penilaian yang berbeda mengenai gejala-gejala yang timbul di kota. Perasaan atau sikap tinggi hati sesama warga kota dapat merugikan *sense of belonging* atau rasa kesatuan dan persatuan.

Wirth (1938) yang melihat kota sebagai cara hidup (*Urban as Way of Life*). Di mana jumlah penduduk, kepadatan, dan heterogenitas kota menyebabkan cara hidup orang kota yang nonpribadi, datar, sepintas lalu, segregatif (terkotak-kotak) atau yang dalam istilah Ferdinand Tonnies disebut dengan ciri *gesselchaft*.

Ciri-ciri pokok suatu kota ini dapat terjadi perubahan dan variasi, karena tidak ada dua kota yang sama benar struktur dan keadaannya. Bertambahnya penghuni kota baik berasal dari penghuni kota maupun dari arus penduduk yang masuk dari luar kota mengakibatkan bertambahnya perumahan-perumahan dan ini akan mengurangi daerah-daerah kosong dalam kota.

### 9.3 Tipe Kota

Menurut Hariyono (2007) tipe kota telah terbentuk jauh 3000 tahun sebelum masehi. Adapun tipe kota mulai dari yang sederhana sampai kompleks seperti sekarang dan yang akan datang, dapat dibedakan menjadi tipe kota kuno sampai kota postmodern.

- a. Kota Kuno. Merupakan pengertian kota yang paling sederhana. Kota kuno adalah suatu kota yang ditemukan pada gua-gua, lembah-lembah atau tempat-tempat terlindung. Beberapa jalur tepi sungai atau di kawasan tertentu yang letaknya strategis menjadi cikal bakal terbentuknya kota. Ciri utama kota ini adalah mata pencaharian penduduknya non agraris dan mempunyai pekerjaan juga kebutuhan yang relatif heterogen. Unsur-unsur pembentuk kota dapat dilihat dari jumlah penduduk, ragam pekerjaan, ragam kebutuhan, fasilitas dan ada tidaknya yang berkuasa (sistem pemerintahan), dan seterusnya. Di beberapa kota kuno yang ada di dunia, salah satu ciri yang menonjol adalah terbentuknya benteng dan menara untuk mengintai dan melindungi kota dari serangan musuh. Kota kuno juga dilengkapi dengan parit untuk menghambat serangan musuh.
- b. Kota praindustri. Merupakan kota yang lebih berkembang dari kota kuno dan telah memiliki ciri seperti tahap agricultural. Penduduk mulai mengenal tehnik bercocok tanam yang baik. Perpindahan penduduk juga mulai terlihat, kebutuhan di kota semakin beragam dengan berdatangnya kelompok masyarakat ke kota. Pemukiman di kota semakin menonjol serta pembangunan fisik dan prasarana kota menjadi lebih teratur dan meluas. Kota ini muncul ditandai dengan munculnya pusat-pusat

kegiatan yaitu pusat pemerintahan, ruang publik (tempat masyarakat berinteraksi sosial), tempat beribadat, dan pasar tradisional (tempat distribusi barang dari desa ke kota dan sebaliknya serta tempat pemenuhan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat kota dan desa). Keempat pusat kegiatan ini letaknya relatif berdekatan, yang merupakan kegiatan pokok dari suatu kota praindustri.

- c. Kota Industri. Kota industri ini lahir ditandai dengan berkem-bangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Penggunaan rasionalisme untuk mempertinggi peradaban dan hidup masyarakat guna mencapai kebahagiaan hidup manusia. Sedangkan, penemuan teknologi menyebabkan barang-barang konsumsi dapat diproduksi secara massal. Pada kota ini kegiatan industri sangat menonjol, sistem kemasyarakatan agraris menjadi berubah menjadi industries.
- d. Kota Modern. Kota modern muncul saat modernisasi meluas, globalisasi menggejala ke seluruh pelosok dunia. Jumlah penduduk kota yang meningkat pesat, menyebabkan kota ber-kembang secara tidak sehat, seperti masalah permukiman kumuh, penyediaan perumahan layak huni, kriminalitas yang meningkat, masalah sumber air bersih dan saluran air. Adapun ciri-ciri kota modern ditandai dengan tiga hal, yakni: (1) penggunaan teknologi untuk mempermudah mewujudkan kebutuhan manusia; (2) adanya perhatian pada persoalan lingkungan (mengenal sistem daur ulang dan sumber energi non regular) sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia; (3) pemanfaatan tenaga listrik dan komputerisasi sebagai sumber vital untuk menggerakkan roda kegiatan manusia.

e. Kota Postmodern. Kota postmodern memiliki tingkat globalisasi yang tinggi, interaksi dan kerja sama yang saling menguntungkan dapat terjadi dengan kota yang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Redefinisi teknologi dan ilmu pengetahuan, pengakuan eksistensi kelompok marjinal, dan masyarakat menghargai nilai-nilai pluralitas.

#### 9.4 Fungsi Kota

Menurut National Urban Development Strategi (1985), kota memiliki beberapa fungsi, yakni: 1. *Hinterland Service*, memberikan pelayanan terhadap wilayah belakangnya (pedesaan), terutama berkaitan dengan ekonomi yang ditujukan pada kegiatan pemasaran produk, distribusi barang-barang kebutuhan, pelayanan sosial dan jasa; 2. *Interrigional Communication*, terciptanya hubungan antar wilayah (kota) yang memegang peranan khusus dalam mengumpulkan barang-barang produksi yang kemudian disalurkan ke wilayah lain (kota memiliki pelabuhan); 3. *Good Processing*, adanya kedudukan pabrik-pabrik yang mengolah bahan mentah untuk menjadi barang jadi, ini cenderung terkonsentrasi di kota; 4. *Residential Sub Centre*, sub-sub permukiman yaitu sebagai tempat tinggal bagi penduduk yang terkait dengan kegiatan di kota-kota utama yang besar.

Secara umum fungsi kota secara internal (sekunder) yaitu: (1) Sebagai kegiatan kehidupan sosial-budaya penduduk setempat; (2) Sebagai wadah kegiatan ekonomi lokal, mendukung rumah tangga penduduk, dalam hal: a. Kebutuhan produksi: bentuk pusat kerja pemerintah dan swasta, produksi/industri, b. Kebutuhan kerjasama jasa, distribusi transaksi, dan simpul pertukaran informasi, c. Kebutuhan layanan transportasi lokal: simpul jaringan sirkulasi berupa terminal, stasiun, dan bandara maupun

pelabuhan; 3. Sebagai satuan fisik infrastruktur lokal; 4. Sebagai wadah politik dan administrasi pemerintahan.

Sedangkan fungsi kota secara eksternal (primer) adalah: 1. Pusat interaksi dan wadah kegiatan sosial budaya bagi penduduk lebih luas; 2. Pusat dan wadah kegiatan ekonomi ekspor sehingga mempengaruhi manajemen transaksi industri antara lain produksi barang, produksi jasa, koleksi dan distribusi untuk wilayah luas; 3. Sebagai simpul komunikasi yang lebih lengkap dan cepat dengan jangkauan yang lebih luas wilayahnya; 4. Sebagai satuan fisik infrastrukural terkait dengan jaringan wilayah luas; 5. Pusat politik dan administrasi pemerintahan untuk kepentingan tingkat wilayah lebih atas. Selain beberapa pengertian dan fungsi fungsi di atas, pemahaman secara komperhensif terhadap kekuatan-kekuatan yang mengatur bentuk kota yaitu kekuatan ekonomi, sosial atau politik diperlukan untuk memahami secara jelas perkembangan kota secara berkelanjutan.

Menurut Jiven & Larkham (2003) secara morfologi fisik kota dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu bangunan-bangunan dan kegiatannya yang berada di atas atau dekat dengan muka tanah, instalasi-instalasi di bawah tanah, dan kegiatan-kegiatan di dalam ruangan "kosong" di angkasa. Doxiadis (1968) menegaskan bahwa Klasifikasi bentuk kota terbagi ke dalam beberapa tingkatan yaitu: 1. Kota besar/adikota (*metropolis*) berpenduduk lebih dari dua juta orang, 2. Kota raksasa (*megalopolis*) berpenduduk seratus juta orang atau lebih, 3. Wilayah kota (*urban region*) berpenduduk kira-kira tujuh ratus juta jiwa dan merupakan kota di seluruh wilayah, 4. Benua kota (*urbanized continent*) berpenduduk kira-kira lima miliar jiwa serta merupakan kota seluruh benua, dan 5. Mahakota (*ekumenopolis*) yang berpenduduk kira-kira tiga puluh milyar jiwa dan merupakan kota mendunia. Kehidupan

perkotaan merupakan kehidupan masyarakat yang dinamis, menciptakan identitas tersendiri, yang merupakan sifat dominan industri. sekunder (industri) dan tersier (jasa perdagangan) yang berperan besar dalam menjalankan fungsi kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan.

## 9.5 Pembangunan Kota

Pembangunan ruang kota bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan individu akan tempat beroperasi dan hidup baik secara kualitas maupun kuantitas. dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Pembangunan kota di Indonesia menurut Mulyandari (2011) ada beberapa isu penting yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan yaitu: 1. Adanya perkembangan fisik dan non-fisik yang tidak merata; 2. Pertumbuhan kota yang masih dipengaruhi oleh pasar dan bukan pro masyarakat; 3. Terjadinya proses komersialisasi/privatisasi yang cenderung tidak terkontrol oleh pihak berwenang sebagai akibat lemahnya penegakan hukum; 4. Dampak kerusakan lingkungan semakin parah sebagai akibat pembangunan kota yang tidak terkoordinasi dan terkontrol dengan baik, 5. Inefisiensi dalam penggunaan sumber daya; dan 6. Banyaknya gejala ketidakadilan sosial perkotaan. Perkembangan isu-isu diatas berdampak langsung dalam memperlihatkan karakter kota-kota di Indonesia yang dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Tumbuh secara tidak terencana (organis); 2. Cenderung tidak terkontrol (sprawl); 3. Mengabaikan aspek tata guna lahan, sehingga guna lahannya tercampur (mixed-uses) tanpa terintegrasi; 4. Dualism ekonomi: formal-in formal;

5. Aturan-aturan pemerintah kota daerah banyak yang tidak diteapkan dan ditegakkan secara tegas.

Pembangunan kota harus diupayakan untuk lebih meningkatkan produktifitas yang dapat mendorong sektor-sektor perekonomian, akan tetapi pengembangannya perlu memperhatikan ketersediaan sumberdaya, agar penggunaan sumber daya yang lebih efisien untuk infrastruktur dan layanan kota. Perkembangan perkotaan terjadi bersamaan dengan pembangunan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan budaya daerah. Hal ini juga diperlukan untuk menciptakan pemerataan yang tercermin dari pemerataan kemampuan mencari nafkah dengan mudah di perkotaan, juga dari segi infrastruktur. dan sarana maupun dari lapangan pekerjaan.

Di dalam (UU No. 26 Tahun 2007) disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perkotaan adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial, yang dijabarkan dalam 10 kriteria yang lebih spesifik untuk merumuskan kota.

Menurut Restina (2009) 10 kriteria tersebut adalah sebagai berikut : a) ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat, b) bersifat permanen, c) Kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah d) d) Struktur dan tata letak ruang kota yang dinyatakan melalui jalan dan ruang kota yang sebenarnya, e) Tempat tinggal dan tempat orang bekerja, f) fungsi perkotaan

minimum meliputi pasar, pusat administrasi atau pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas intelektual, g) heterogenitas dan perbedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat, h) pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian ditepi kota dan memeroses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas, i) pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat, j) dan pusat penyebaran.

## 9.6 Perkembangan Kota

Perkembangan kota-kota di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pesatnya pertumbuhan kota-kota di Indonesia diikuti oleh pertumbuhan dan peningkatan pelayanan jalan di seluruh kota besar maupun kecil, termasuk kota regional.

Perkembangan tersebut disertai dengan banyaknya lapangan kerja, fasilitas pelayanan yang lengkap dan standar hidup yang tinggi di daerah tersebut. Hal ini membuat Pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan dan infrastruktur agar dapat berjalan lancar guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Jaringan Jalan raya berkaitan dengan pergerakan manusia dalam segala aktivitas, terutama aktivitas perekonomian.

Perkembangan Kota adalah sebuah proses yang melibatkan keadaan perkotaan yang beralih dari satu keadaan ke keadaan lain pada titik waktu yang terpisah. Desakan untuk mengubah kondisi seringkali didasarkan pada melihat situasi dari berbagai sudut dan pada berbagai periode. Secara umum diterima bahwa pertumbuhan perkotaan merupakan produk dari populasi, pengelolaan alat atau lingkungan, terobosan dalam teknologi, dan kemajuan dalam organisasi

sosial. Zona-zona yang termasuk dalam kawasan perkotaan memberikan jendela ke arah perkembangan pertumbuhan kota. Menurut Bintarto (1989) dalam (Yunus, 2000), perkembangan kota dapat dilihat dari penggunaan lahan yang membentuk zona-zona tertentu dalam ruang kota.

Menurut (Branch, 1995); (Yunus, 2005), bentuk kota secara keseluruhan mencerminkan posisi geografis dan karakteristik tempat tersebut. Selain itu, Branch memberikan ilustrasi beberapa pola pembangunan kota yang mungkin ditemukan di dataran datar dalam bentuk hal-hal seperti topografi, bangunan, jalur transportasi, ruang terbuka, dan kepadatan bangunan, Secara skematik Branch, menggambarkan 6 (enam) pola perkembangan kota yaitu:

Menurut Zahnd (2012), secara teoritis dikenal tiga cara perkembangan dasar di dalam kota, meliputi:

1. Perkembangan horizontal Cara perkembangannya mengarah ke luar. Artinya, daerah bertambah, sedangkan tinggi dan luas lahan konstruksi (lantai tertutup) tetap sama. Perkembangan seperti ini sering terjadi dipinggir kota, dimana lahan masih lebih murah dan dekat jalan raya yang mengarah ke kota (dimana banyak keramaian).
2. Pembangunan vertikal Jalur pembangunan semakin bertahap. Artinya luas bangunan dan luas tanah tetap sama, sedangkan tinggi bangunan bertambah. Pembangunan seperti ini sering terjadi di pusat kota (yang harga tanahnya mahal) dan pusat perbelanjaan yang memiliki potensi ekonomi.
3. Perkembangan interstisial Cara perkembangannya bergerak ke dalam. Artinya, daerah dan ketinggian bangunan-bangunan rata-ratanya tetap sama, sementara luas (cakupan) lahan terbangun meningkat. Pembangunan

seperti ini sering terjadi di dalam kota dan antara pusat kota dengan pinggiran kota, dimana luas wilayahnya sudah terbatas dan tidak dapat dikurangi.

## **9.7 Urbanisasi dan Dampaknya**

Pengertian urbanisasi juga berbeda-beda, tergantung pemaha-man masing-masing orang berbeda-beda. Urbanisasi diartikan sebagai suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban. Secara spasial, hal ini dikatakan sebagai suatu proses diferensiasi dan spesialisasi pemanfaatan ruang dimana lokasi tertentu menerima bagian pemukim dan fasilitas yang tidak proporsional. Menurut Abbas (2002), Urbanisasi adalah sebagai perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakang oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Urbanisasi tidak boleh ditempatkan semata-mata pada konteks demografi, karena urbanisasi mengandung pengertian multidimensi. Dari perspektif demografi, urbanisasi berarti suatu proses peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan sehingga menyebabkan proporsi penduduk yang hidup meningkat, yang seringkali diukur hanya dengan konsentrasi. jumlah penduduk perkotaan, laju perubahan proporsi ini, dan pertumbuhan jumlah pusat kota.

Merlin dkk (2005) menjelaskan bahwa istilah urbanisasi memiliki dua arti yang berbeda, dimana dalam pengertian pertama dan paling banyak digunakan, urbanisasi diartikan sebagai proses peningkatan dan perkembangan kota, seringkali melibatkan proses perluasan ruang kota, dan dalam pengertian kedua diartikan sebagai proses peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan atau perkotaan. Soetomo

(2013) menambahkan bahwa urbanisasi adalah suatu proses terbentuknya kehidupan perkotaan dan pengertiannya dapat dipahami melalui pengertian kota itu sendiri. Urbanisasi mengacu pada peningkatan populasi secara umum dan jumlah Meningkatnya jumlah rumah melambangkan perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, sehingga kepadatan di perkotaan semakin tinggi.

Grunfeld dalam Daldjoeni (2003) berpendapat bahwa ada dua jenis urbanisasi atau urbanisasi, yaitu urbanisasi fisik dan urbanisasi mental. Urbanisasi fisik adalah pertumbuhan suatu kota ditinjau dari luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, pekerjaan konstruksi (arah horizontal atau vertikal), variasi tata guna lahannya yang non agraris. Sedangkan pengkotaan mental berarti perkembangan orientasi nilai-nilai dan kebiasaan gaya hidup yang meniru kota-kota besar.

Dampak arus urbanisasi yang tidak terkendali ini dianggap merugikan strategi perencanaan pembangunan perkotaan dan eksploitasi fasilitas perkotaan di luar kendali pemerintah kota. Beberapa dampak negatif ini akan menjadi lebih nyata seiring meningkatnya masalah kejahatan dan menurunnya tingkat kebahagiaan. Dampak negatif lainnya adalah urbanisasi yang berlebihan, yaitu tingginya proporsi penduduk perkotaan yang tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Selain itu, proses sub-ruralisasi juga dapat terjadi, yaitu jumlah penduduk di pedesaan terlalu sedikit dibandingkan dengan tingkat dan cara produksi yang ada. Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, hierarki pendidikan dan perkotaan. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran dan setengah pengangguran. Kota dipandang sebagai proses yang tidak efisien dan dibuat-buat *pseudo-*

*urbanisastion*. Sehingga urbanisasi merupakan variable dependen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persoalan-persoalan urbanisasi telah menjadi perhatian yang cukup besar, beberapa pemikiran yang membahas dampak urbanisasi dari sudut pandangan ekonomi yaitu Abbas (2002) berpendapat bahwa tingkat urbanisasi yang terlalu rendah dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kota dapat memperlambat kemajuan ekonomi. Sedangkan menurut Keban, proses urbanisasi yang tidak terkendali dan adanya hirarki kota akan menimbulkan berbagai akibat negatif yaitu munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan income perkapita, pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, pertumbuhan daerah kumuh, dan sebagainya.

Adams (2013) menunjukkan bahwa urbanisasi selalu membe-rikan dampak negatif dan positif terhadap pembangunan di bidang apapun. Dampak yang ditimbulkan dari proses ini tidak hanya menyangkut aspek jarak saja, namun juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Konsekuensi dari pesatnya urbanisasi yang meluas ke wilayah perkotaan akan menyebabkan munculnya permukiman kumuh yang meluas dan tumbuhnya sektor mikro informal. Sektor informal berkembang pesat dan menguntungkan namun berdampak pada peningkatan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2002). *Sosiologi Perkotaan*. Universitas Andalas.
- Adams. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Manullang (ed.)). Multi Presindo.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Bardo, J. W. (1982). *Urban Sociology a Systematic Introduction*. Itasca, IL:F, E. Peacock.
- Bintarto, R. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Branch, M. (1995). *Perencanaan Kota Komprehensif. Pengantar dan Penjelasan*. Gajah Mada University Press.
- Conzen, M. R. G. (1962). The Plan Analysis of An English City Centre. *Procesdings of the I.G.U. Symposium in Urban Geography*”,.
- Daldjoeni, N. (2003). *Geografi Kota dan Desa*. P.T. Alumni ITB.
- Doxiadis, C. A. (1968). *EKISTICS An Introduction To The Science Of Human Settlements*. Hutchinson Of London.
- Hariyono, P. (2007). *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Bumi Aksara.
- Jiven, G., & Larkham, P. J. (2003). Sense of Place, Authenticity and Character: A Commentary. *Journal of Urban Design*. manuscriptcentral.com (akses terakhir 15 maret 2024)
- Merlin, Choay, P. et, & Françoise. (2005). *Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement*. Quadrige/Manuel.
- Mulyandari, H. (2011). *Pengantar Arsitektur Kota*. Penerbit Andi.

- National Urban Development Strategi, [NUDS]. (1985). *Indonesia NUDS Final Report*. . National Urban Development Strategy Project.
- Restina, N. (2009). *Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting dan Arahan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Santoso, B. (2009). *Manajemen Proyek Konsep dan Implementasi*. Penerbit Graha Ilmu.
- Smailes. (1955). *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Wirth, L. 1938. Urbanism as Way of Life. *The American Journal of Sociology* Vol. 44 No. 1 July. Chicago Press.
- Yunus, H. S. (2000). *Struktur Tata Ruang Kota*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Yunus, H. S. (2005). *Klasifikasi Kota*. Pustaka Pelajar.
- Zahnd, M. (2012). *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual: Kajian tentang Kawasan Tradisional di Kota Semarang dan Yogyakarta suatu Potensi Perancangan Kota yang Efektif*. Kanisius.

## **BAB 10**

### **DINAMIKA KELOMPOK AGRIBISNIS**

Dr. Ir. Asda Rauf, M.Si.

[asdarauf@ung.ac.id](mailto:asdarauf@ung.ac.id)

Peradaban manusia terus berkembang seiring dengan tuntutan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masyarakat primitif yang kebutuhannya hanya dipenuhi dengan mencari makan atau berburu, hal ini dilakukan secara individual untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dengan terus berkembangnya dan pertumbuhan populasi manusia serta meningkatnya kebutuhan, maka terjadilah proses perubahan dalam suatu negara. Di sinilah perubahan dilakukan untuk mencapai tujuan hidup dan kehidupan yang lebih baik.

Dalam dunia pertanian yang ada hanyalah meramu dan berburu, racun, jumlah dan kebutuhan manusia, serta perubahan seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan manusia, termasuk baik dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini juga berdampak pada semakin banyaknya beragam bidang keilmuan yang dipelajari oleh bidang penelitian ini dan dunia pertanian menjadi semakin kuat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan orang lain yang dapat melakukan berbagai aktivitas bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut diperkuat oleh Samsul Arifin. B (2015) berpendapat bahwa ada dua hal penting yang mendasarinya, yaitu filsafat sebagai ilmu dasar kehidupan mencakup tiga unsur, yaitu (1) manusia mengenal dirinya sendiri dan mengenal dunianya; (2) masyarakat hidup dalam komunitas dan agama membantu

mereka hidup lebih baik; dan (3) manusia adalah makhluk hidup yang mencakup empat unsur: manusia sebagai makhluk sosial, hubungan manusia dengan lingkungan hidup, potensi hidup manusia, perubahan dan perkembangan dalam kehidupan manusia serta pentingnya proses peningkatan kapasitas kelompok. secara dinamis.

Bagian kedua, yaitu manusia sebagai organisme, merupakan bagian penting dalam intensifikasi dinamis kemampuan kelompok yang menjadi landasan kehidupan kelompok. Hal ini sangat penting dalam peran manusia sebagai kunci penting keberhasilan atau pencapaian tujuan pembangunan, termasuk pembangunan pertanian. Hal inilah yang menjadi awal terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat, termasuk upaya mencapai tujuan pembangunan pertanian, lebih khusus lagi industri pertanian.

Adanya interaksi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan menyebabkan orang-orang berkumpul. Dalam perilaku organisasi, terbentuknya kelompok merupakan wadah atau wadah untuk menyusun rencana dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Setiap kelompok yang terbentuk mempunyai jenis, tujuan, kelebihan, ciri dan daya tariknya, sehingga dengan mempelajarinya maka akan diketahui dinamika kelompok itu sendiri.

### **10.1 Konsep Dasar Dinamika Kelompok Agribisnis**

Dinamika berasal dari kata dynamics Bahasa Yunani yang bermakna kekuatan atau force. Beberapa pengertian dinamika menurut para ahli antara lain Rahmi Widyanti, R (2019) mengemukakan bahwa dinamika adalah sesuatu yang bersifat kekuasaan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat disesuaikan dengan keadaan. Motivasi juga berarti interaksi dan saling ketergantungan antara anggota kelompok dan

kelompok secara keseluruhan. Momentum juga dapat diartikan sebagai pergerakan atau kekuatan sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang dapat membawa perubahan dalam cara hidup masyarakat yang bersangkutan.

Ibrahim (2019) memberikan pengertian tentang dinamika, khususnya kekuatan-kekuatan dalam suatu kelompok yang dapat menentukan perilaku kelompok berdasarkan perilaku seluruh anggota kelompok. Menurut Munir (2001: 16), motivasi adalah suatu sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor tersebut. Jika salah satu elemen sistem diubah, maka akan menyebabkan perubahan pada elemen lainnya. Dalam berbagai definisi di atas, motivasi mengandung banyak makna seperti tenaga, gaya, unsur-unsur yang saling berinteraksi, bergerak dan berkembang ke arah yang mengubah unsur-unsur lainnya.

Kelompok adalah perkumpulan lebih dari dua orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nasir, N (2008) menjelaskan bahwa kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara terus menerus secara fisik dan psikis dalam jangka waktu tertentu. Zulkarnain, (2013) memberikan pengertian tentang kelompok adalah sebagai sekelompok individu yang mempunyai tujuan yang sama, yang bertemu secara langsung maupun tidak langsung dan saling melakukan pameran secara interaktif sehingga membentuk suatu kelompok tertentu. Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, tim adalah sekelompok individu yang berkumpul dalam suatu lingkungan dengan tujuan yang sama.

Terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga melibatkan penyediaan program pertanian, termasuk pengembangan pertanian atau agribisnis yang bernilai

ekonomi tinggi. Agribisnis mencakup struktur individu pertanian, yaitu pertanian, dan bisnis, yaitu bisnis.

Istilah “agribisnis” pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1955, ketika John H. Davis menggunakannya dalam makalah yang dipresentasikan pada “Boston Distributor Meeting.” Pemahaman umum tentang pertanian sebagai sebuah industri berubah secara dramatis setelah Davis dan Golberg menerbitkan *The Concept of Agribusiness* pada tahun 1957. Karya mereka mengusulkan pendekatan baru dalam memandang dan bekerja dengan industri pertanian, sekaligus meletakkan dasar bagi pemahaman modern tentang agribisnis. Sejak saat itu, sektor ini dipandang sebagai perpaduan berbagai aktor dan organisasi yang bekerja sama untuk memproduksi dan memproduksi pangan dan serat, yaitu suatu sistem yang terintegrasi.

Dalam buku tersebut, Davis dan Golberg mendefinisikan agribisnis sebagai berikut: “Totalitas seluruh aktivitas yang terlibat dalam perakitan dan pengangkutan perlengkapan pertanian; penciptaan pertanian: proses dan penyimpanannya, penanganan, dan oleh karena itu, pertanian pangan adalah suatu kesatuan kegiatan produksi dan distribusi di bidang pertanian, yang meliputi: kegiatan produksi (pertanian), pengawetan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian atau hasil transformasinya.

Untuk melaksanakan usaha atau kegiatan dalam kerangka agroindustri diperlukan kerjasama yang terpadu. Dinamika kelompok mencakup berbagai aspek hubungan antar anggota kelompok, termasuk aspek sosial, emosional, dan kognitif, yang memungkinkan kelompok mencapai tujuan yang telah ditentukan, termasuk pengembangan ide-ide baru dan kohesi

Dinamika kelompok berawal dari keinginan individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. Setelah terbentuk kelompok tersebut, maka terjadilah interaksi dan trade yang terkadang diskusi biasa sampai dengan berdebat satu dengan lainnya, tetapi dalam setiap pertemuan atau diskusi selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi anggotanya

Dinamika kelompok merupakan sarana manajemen untuk menciptakan kerjasama kelompok yang ideal, sehingga pengelolaan organisasi menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Kesadaran seperti ini harus diciptakan karena suatu kelompok atau organisasi akan berfungsi secara efektif jika mempunyai tujuan, cara tertentu untuk mencapai tujuan tersebut diciptakan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh individu anggota tim sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan, antara lain: (1) Membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai; (2) Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain; (3) Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok (4) Menimbulkan adanya itikad yang baik diantara sesama anggota kelompok.

## **10.2 Lingkup Dinamika Kelompok Agribisnis**

### **1. Adaptasi Dalam Dinamika Kelompok**

Dalam kelompok sosial sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan atau beradaptasi dalam suatu kelompok dengan perkembangan zaman yang tidak terbatas. Adaptasi

adalah bentuk kemampuan masyarakat/ individu/seseorang dan kelompok dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial tertentu. Dinamika kelompok sebagai kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kelompok yang mampu mempengaruhi kelompok secara efektif agar dapat mencapai tujuannya.

Dinamika kelompok dapat tercapai jika semua komponen internal dan eksternal didalamnya terintegrasi dengan baik. Arifin (2015) memaparkan pentingnya mempelajari dinamika kelompok karena beberapa alasan sebagai berikut: 1) individu tidak mungkin hidup sendiri dalam masyarakat; 2) individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya; 3) masyarakat yang besar memerlukan pembagian kerja agar pekerjaan.

Adaptasi dalam dinamika kelompok perlu diperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat beradaptasi. Setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi yang baru. Setiap kelompok, tetap selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan hasil dinamika kelompok tersebut. Di samping itu proses adaptasi juga berjalan dengan baik yang ditandai dengan kelenturan setiap anggota untuk menerima ide, pandangan, norma dan kepercayaan anggota kelompok lain tanpa merasa integritasnya terganggu (Hadi, Sy. 2017)

## **2. Pencapaian Tujuan**

Terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat selalu didasarkan pada tercapainya maksud dan tujuan demi kebaikan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat, terdapat banyak hal yang berbeda-beda, antara lain kebutuhan individu dan kebutuhan bersama, kepentingan bersama, serta cara mencapai atau mencapai tujuan, pekerjaan, atau peluang. Dalam kelompok ini terjadi

interaksi atau kerjasama, sehingga menimbulkan dinamika sebagai proses terjalinnya ikatan kerja, hubungan yang saling mempengaruhi. Jika proses ini terus dilakukan secara berkala, maka akan terjadi pula perubahan pada seluruh elemen yang ada sehingga membawa kesuksesan.

Tujuan bersama akan tercapai dalam dinamika kelompok secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Individu memerlukan gotong royong (individu tidak dapat bertahan hidup sendirian dalam masyarakat); (2) Dinamika kelompok memudahkan kerja (dalam dinamika kelompok, terjalin rasa saling mendukung antar anggota); (3) Tugas-tugas yang memerlukan pemecahan masalah dapat diselesaikan secara berkelompok, sehingga mengurangi beban kerja dan membuat waktu penyelesaian tugas menjadi masuk akal, efektif, dan efisien (tugas-tugas berskala besar dapat diselesaikan secara berkelompok) dan (4) Untuk meningkatkan masyarakat demokratis, individu dapat saling berkontribusi dan berinteraksi untuk memainkan peran yang sama dalam masyarakat (Widyanti, R. 2019)

Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan, antara lain: 1) membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai, 2) menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain, 3) menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok, dan 4) menimbulkan adanya i'tikad yang baik diantara sesama anggota kelompok (Syamsul. H, 2017)

### **3. Interaksi Dalam Dinamika Kelompok**

Proses-proses yang terjadi dalam dinamika kelompok merupakan faktor yang memerlukan perhatian untuk memperlancar proses kepemimpinan kelompok. Hal ini terjadi

melalui berbagai bentuk interaksi yang dinamis dan non-dinamis dan biasanya dipengaruhi oleh situasi sosial yang kooperatif. Kajian tentang dinamika kelompok sosial erat kaitannya dengan pembentukan struktur sosial dalam kelompok, internalisasi norma-norma sosial, perasaan saling memiliki dan segala perwujudan norma-norma yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat.

Jenis pola interaksi yang terjadi dalam kelompok sosial/masyarakat adalah:

1. Tindakan, setiap kegiatan, interaksi, atau kampanye yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk meyakinkan pihak lain mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku (individu atau sekelompok orang). Misalnya pada masyarakat desa, setiap orang yang terlibat dalam perbaikan fasilitas desa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan bekerja sama (gotong royong) memperbaiki fasilitas desa agar pekerjaannya cepat selesai. Dalam hal ini tidak ada indikasi tidak ada upaya dari masing-masing individu untuk bekerja sama sesuai tugasnya. Dinamika ini didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai: meningkatkan kualitas layanan produk kepada pengguna.
2. Aksi bersama, berarti kerja sama yang erat antar individu dalam suatu kelompok untuk mencapai/ mewujudkan suatu tujuan, misalnya memenangkan suatu kompetisi. Semua pemain dalam tim permainan harus kompak/solidaritas. Anda tidak bisa sendirian. Misalnya dua orang pemuda hendak membawa bersama-sama sebuah batang pohon yang besar, maka harus ada kerjasama yang baik di antara mereka ketika membawa kayu tersebut. Dinamika yang terjadi merupakan proses

interaksi anggota menuju tujuan pembelajaran berdasarkan perintah ketua kelompok.

3. Berinteraksi, beberapa kelompok bekerja sama dalam pola kerja yang sama, misalnya memperbaiki jembatan yang menghubungkan dua desa secara lurus. Rencana kerja disusun dengan mempertimbangkan sikap dan perlakuan yang adil/adil terhadap kelompok desa. Kekompakan dalam bekerja sedikit demi sedikit mulai diuji. Kerja sama tersebut memerlukan rasa persatuan, solidaritas, dan rasa kesamaan nasib di antara anggota kelompok. Dalam bentuk interaksi, diperlukan seorang pemimpin yang dapat menyatukan seluruh anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan.
4. Melawan, yaitu persaingan mengacu pada persaingan antar anggota suatu kelompok untuk bertindak atas nama kelompok. Proses interaksi ini juga mencakup tujuan anggota kelompok untuk mencapai keberhasilan dengan mengembangkan anggota terpilih menjadi perwakilan kelompok. Penanggulangan ini dapat dilakukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Misalnya saja berdasarkan semangat kerja kelompok, agen pembangunan (pelaku perubahan) dapat berkembang melalui pendekatan "kompetisi" antara kelompok yang relatif maju dan kelompok yang tertinggal karena tidak mau mengejar ketertinggalan secara psikologis menciptakan motivasi untuk mengejar ketertinggalan. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain mempunyai kedudukan yang sama, sehingga kelompok tersebut maju dalam waktu yang relatif singkat.

#### **4. Komunikasi Dalam Dinamika Kelompok**

Komunikasi adalah dasar dari semua interaksi manusia dan berfungsinya semua kelompok. Setiap kelompok harus

menerima informasi dan menggunakannya untuk berkomunikasi. Komunikasi kelompok ini nantinya akan mengarah pada pengkomunikasian ide dan pemikiran berdasarkan kebutuhan bersama. Syamsul, H (2017) menjelaskan komunikasi adalah proses penyampaian informasi (pesan, ide) dari satu pihak ke pihak lain. Umumnya komunikasi dilakukan secara verbal atau lisan agar kedua belah pihak dapat memahami. Cara ini disebut komunikasi nonverbal karena meskipun tidak ada bahasa yang dipahami kedua belah pihak, komunikasi dapat dilakukan dengan menunjukkan gerakan tubuh atau postur tertentu, seperti tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu.

Selain itu, Suprpto (2011) memberikan tiga batasan umum komunikasi, yaitu: 1) Secara etimologis atau asal usulnya, istilah komunikasi berasal dari kata Latin *communicationatio*, yang berasal dari kata *Communis* yang mempunyai arti yang sama. Kata-kata tersebut memiliki arti yang sama: komunikasi, yang berarti berbagi atau bertukar pikiran tentang pengetahuan, informasi, atau pengalaman seseorang. 2) Secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan dari satu orang ke orang lain. 3) Komunikasi yang biasanya mengikuti suatu pola, mempunyai tujuan tertentu, dan mempunyai pola komunikasi yang benar-benar menyampaikan informasi, menyampaikan pikiran dan perasaan, serta mengubah pendapat.

Arifin (1984) dalam Syamsul H, (2017) mengemukakan bahwa komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil”, misalnya dalam suatu pertemuan, perkumpulan, atau konferensi. Michael Burgoon mendefinisikannya dalam Wiryanto (2005). Komunikasi kelompok adalah interaksi pribadi antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang

diketahui, seperti: berbagi informasi, perawatan diri, dan pemecahan masalah. Anggota dapat mengingat secara akurat karakteristik pribadi anggota lain. Terdapat kesamaan antara kedua definisi di atas. Artinya, adanya komunikasi tatap muka dan struktur rencana kerja yang konkrit untuk mencapai tujuan kelompok.

Burgoon dan Ruffner (1993) dalam Syamsul H (2017) menyebutkan unsur-unsur yang termasuk dalam komunikasi kelompok, yaitu: Untuk mengembangkan karakteristik pribadi anggota lainnya. 2) Bahasa personal artinya setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota yang lain serta mampu mengatur umpan balik verbal dan nonverbal dari masing-masing anggota. 3) Tujuan atau sasaran mewakili beberapa jenis identitas kelompok. Kelompok dengan tujuan mempertahankan diri biasanya memusatkan perhatiannya pada anggota kelompok atau struktur kelompok itu sendiri. Kelompok biasanya melibatkan beberapa pengambilan keputusan untuk meringankan kesulitan yang dihadapi. 4) kemampuan anggota kelompok mengembangkan secara akurat ciri-ciri pribadi anggota lainnya; Artinya setiap anggota kelompok secara tidak langsung berhubungan satu sama lain dan tujuan/sasaran kelompok sudah jelas. Selain itu, identifikasi masing-masing anggota dengan kelompoknya relatif stabil dan tahan lama.

Faktor yang mempengaruhi komunikasi antara lain faktor latar belakang budaya. Penafsiran suatu pesan terbentuk dari cara berpikir seseorang melalui kebiasaan. Semakin cocok latar belakang budaya pengirim dan penerima, komunikasi akan semakin efektif. Selain itu, terdapat faktor penggandengan grup atau grup, yang mana nilai grup mempunyai dampak signifikan terhadap cara pengamatan pesan. Demikian pula faktor ekspektasi juga mempengaruhi

penerimaan pesan, sehingga orang menerima pesan sesuai harapan. Ini bukan pengecualian. Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi komunikasi. Semakin tinggi pendidikannya, semakin kompleks cara pandang terhadap isi pesan yang disampaikan. Demikian pula faktor situasional atau lingkungan dapat menentukan perilaku manusia.

Ada beberapa pengaruh terhadap efektivitas komunikasi kelompok. Itu adalah: norma kelompok yang tidak defensif karena dapat membuat seseorang merasa terancam; dampak fisik yaitu suasana lingkungan yang terlalu panas, terlalu dingin, atau terlalu ramai sehingga dapat menyebabkan komunikasi dapat terganggu, dan pengaturan tempat duduk secara tatap muka dinilai lebih efisien bagi dalam menyampaikan pendapat, serta humor yang diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan membuat peserta merasa nyaman.

Burgoon. M dan Ruffner (1993) menyatakan bahwa komunikasi kelompok memiliki empat fungsi. 1) Hubungan Sosial Kelompok dapat dibentuk untuk memelihara hubungan sosial. Perkembangan hubungan sosial merupakan bidang penting dalam masyarakat. 2) Pendidikan: Kelompok berupaya untuk bertukar pengetahuan baik secara formal maupun informal. Pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan kelompok. 3) Keyakinan Seringkali tidak mudah memisahkan makna pendidikan dari keyakinan. Pendidikan dan persuasi sering kali membingungkan, namun keduanya memerlukan perubahan sikap dan perilaku sebagai respons terhadap keinginan komunikator. 4) Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kedua fungsi merupakan dua fungsi yang terpisah dan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Pemecahan masalah adalah menemukan beberapa pilihan keputusan, sedangkan

pengambilan keputusan adalah memilih jalan untuk memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah menciptakan dasar untuk pengambilan keputusan.

Michael Burgoon (2005) dalam Wiryanto. (2008) mengemukakan unsur-unsur komunikasi kelompok adalah: komunikator (orang yang menyampaikan pesan dalam komunikasi), gema (presentasi), pesan, media, komunikan (orang yang menerima pesan dalam komunikasi), reaksi dan umpan balik. Komunikasi kelompok dicirikan oleh norma dan peran. Norma adalah peraturan atau ketentuan yang mengikat yang berfungsi sebagai arahan, ketertiban, dan kendali atas perilaku yang diterapkannya. Dalam komunikasi kelompok, norma yang diterapkan terdiri dari norma sosial, norma prosedur, dan norma tugas. Peran kini menjadi bagian dinamis dari jabatan (status). Peran dalam komunikasi kelompok penting karena peran menentukan status seseorang. Peran terdiri dari peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Ada fungsi komunikasi kelompok.

Fungsi komunikasi kelompok meliputi fungsi hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta fungsi terapeutik. Proses komunikasi suatu kelompok harus mampu menembus seluruh aspek dalam kelompok agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Komunikasi kelompok memerlukan melalui beberapa proses agar komunikasi menjadi lebih efektif. Proses ini melewati empat fase: pembentukan, penyerbuan, norma, dan pertunjukan. Dalam komunikasi kelompok, ide dan gagasan dihasilkan berdasarkan umpan balik satu sama lain. Kesalahpahaman ini dapat diselesaikan melalui komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi ketika anggota kelompok secara kolektif dapat menerima, mengirim,

mencatat, menanggapi, memutuskan, dan memberikan umpan balik terhadap pesan yang dikirim selama komunikasi.

### **5. Konflik Dalam Dinamika Kelompok**

Dalam suatu kelompok yang terdiri dari banyak anggota dengan pemikiran, kepribadian, dan tentunya karakteristik yang berbeda-beda, sering kali terjadi konflik di dalam kelompok tersebut. Harmoni dan dinamisme mungkin sulit dicapai, mengingat betapa sulitnya memadukan ide-ide yang berbeda dari pemikiran yang berbeda, yang masing-masing memiliki isi kompleksnya sendiri. Tentu saja, ketika pendapat berbeda, harga diri masing-masing individu dapat melebihi logika dan emosi, sehingga mengikis dinamika dalam kelompok.

Ekawarna, H. (2018) mengemukakan konflik sering diartikan sebagai saling bertentangan, saling berbantahan, atau saling cekcok. Situasi konflik tersebut dianggap sebagai situasi yang abnormal dan tidak diharapkan, karena konflik sering dianggap sebagai pengganggu stabilitas yang tidak boleh ada atau jika sudah muncul harus cepat-cepat diselesaikan. Konflik terkadang dianggap sebagai gangguan yang disebabkan oleh tingkah laku orang-orang yang antikemampuan, antisosial, paranoia, senang membuat keributan, dan lain-lain. Selain itu, konflik juga dapat terjadi karena kegagalan berkomunikasi antarpihak sehingga terjadi perbedaan dalam memahami suatu hal.

Konflik dan perbedaan pendapat yang terus berlanjut dapat menyebabkan runtuhnya kelompok itu sendiri. Agar semua anggota kelompok menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, dan bagi anggota kelompok yang berbeda pendapat untuk mengesampingkan egonya dan mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat agar tetap

terjaga keharmonisan. Dalam mempertahankan grup. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik itu sendiri?

Menurut Hammer dan Hogan konflik adalah segala jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok yang bermusuhan. Berdasarkan pengertian Hammer dan Hogan, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik adalah suatu perselisihan atau perkelahian yang terjadi dalam suatu komunitas manusia, antar individu atau kelompok, yang terjadi dalam ruang negatif.

Ketika konflik terjadi maka dapat menimbulkan kerusakan dalam kelompok. Lalu apa saja tanda-tanda awal terjadinya konflik intrakelompok yang perlu diwaspadai untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan dalam kelompok. Chan (1999) menjelaskan beberapa karakteristik sinyal konflik awal dalam suatu kelompok adalah sebagai berikut:

1. Emosi muncul ketika setiap anggota kelompok mengutarakan pendapat atau sarannya. Kemunculan ciri pertama ini bisa dianggap sebagai sumber konflik yang sepele namun berbahaya. Emosi adalah pembakar yang efektif. Jika suatu emosi datang dari satu orang, anggota kelompok yang lain mungkin juga terangsang oleh emosi tersebut, dan konflik mungkin tidak dapat dihindari.
2. Adanya anggota kelompok yang menyela atau menyela anggota kelompok yang lain ketika menyampaikan pendapatnya. Sunat dapat menimbulkan konflik dalam suatu kelompok jika orang yang disunat atau pendapat orang yang disunat sedang dalam keadaan ego yang tinggi. Akibatnya, mereka merasa dirinyalah yang paling benar dan tidak mau mendengarkan alasan dan pendapat orang lain sehingga menimbulkan konflik dalam kelompok.

3. Adanya adegan anggota kelompok saling menyalahkan. Kegiatan saling menyalahkan dapat menimbulkan konflik dalam kelompok, karena anggota kelompok merasa sakit hati dan rusak harga dirinya ketika berada pada posisi penuduh, serta timbul emosi untuk melindungi diri. Sebaliknya, bagi penuduh, hal ini terjadi karena hilangnya kepercayaan dan berujung pada menyalahkan anggota kelompok lainnya.
4. Adanya situasi di mana anggota kelompok menolak untuk berkompromi dan menyerang anggota lain secara pribadi. Dinamika kelompok dapat terjadi ketika seluruh anggota kelompok didorong untuk berkompromi. Dinamika seperti apa yang muncul dalam suatu kelompok jika ada anggota yang menolak untuk berkompromi. Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam kelompok. Apabila terjadi konflik dalam suatu kelompok sebagaimana, maka setiap anggota kelompok harus memahami cara menyelesaikan konflik dalam kelompok tersebut.

Menurut Stevenin, Handoko (2001) menyebutkan ada lima langkah untuk mencapai perdamaian dalam konflik. Terlepas dari penyebab masalahnya, lima langkah berikut merupakan hal mendasar untuk mengatasi kesulitan tersebut.

- a). pengenalan. Kesenjangan antara situasi yang ada atau teridentifikasi dengan situasi sebagaimana mestinya. Satu-satunya bahaya adalah kegagalan deteksi (tidak memperhitungkan masalah, atau berasumsi ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).
- b). diagnosa. Ini adalah langkah yang paling penting. Metode “siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana” telah teruji dan benar. Fokus pada masalah besar, bukan hal sepele.
- c). Setuju dengan solusinya. Mengumpulkan masukan mengenai kemungkinan solusi dari para pemangku kepentingan. Hilangkan solusi yang tidak

dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan akhiri dengan cara yang tidak menyenangkan. Carilah yang terbaik. d). Ingatlah bahwa selalu ada untung dan rugi. Namun, berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pertimbangan-pertimbangan ini terlalu memengaruhi keputusan atau arahan kelompok tertentu. e). evaluasi. Solusinya sendiri dapat menimbulkan banyak masalah baru. Jika menurut Anda solusinya tidak berhasil, kembali ke langkah sebelumnya dan coba lagi.

### **10.3 Penerapan Dinamika Kelompok Agribisnis**

Berbagai penelitian mengenai penerapan dinamika kelompok pada berbagai aktivitas masyarakat di sektor pertanian, termasuk yang dilakukan oleh Sriyati dkk. (2019), melakukan penelitian tentang dinamika kelompok dan partisipasi petani dalam program pengembangan sektor pertanian pedesaan di Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Tujuan penelitian adalah mengukur tingkat dinamisme kelompok tani, mengukur tingkat partisipasi petani dalam program PUAP; dan menganalisis hubungan dinamika kelompok dengan partisipasi petani dalam program PUAP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dinamisme kelompok tani di Kecamatan Sematang Borang tergolong tinggi. Faktor: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi misi dan efektivitas kelompok semuanya termasuk kriteria tinggi. Tingkat partisipasi petani yang tergabung dalam kelompok tani dalam program PUAP tergolong tinggi. Untuk setiap tahapan partisipasi seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penggunaan hasil, semuanya termasuk dalam kriteria tinggi. Tingkat motivasi kelompok berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi petani dalam program PUAP di

Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dengan nilai koefisien korelasi sangat kuat.

Selanjutnya Acep Hariri dkk. (2017) mempelajari perkembangan kelompok tani yang dinamis dalam pengembangan pertanian hortikultura di kota Batu, tujuan penelitian untuk mengetahui peran kelompok tani yang dinamis dalam pengembangan pertanian hortikultura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbisnis melalui kelompok tani membawa banyak manfaat mulai dari sarana produksi, pelaksanaan operasional hingga pemasaran hasil. Kelompok dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan agribisnis dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Banyak struktur tim yang dibentuk dengan mengatur anggota sesuai dengan keahliannya. Fungsi kelompok sebagai sarana pembelajaran, kolaborasi, dan produksi begitu dinamis sehingga melaksanakan kegiatan menjadi lebih mudah dan hemat biaya.

Peningkatan produktivitas pertanian dapat didukung dengan penyediaan sarana produksi dan partisipasi anggota kelompok tani, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridah et al., (2022) tentang dinamika kelompok penelitian di Kelompok Tani Paguyuban Bumi Mandiri dan Kelompok Tani Kabupaten Sri Tanggulun Di Subang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi kelompok tani padi organik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dinamika kelompok berada pada tipe yang sesuai. Subsistem kekompakan tim memperoleh indeks rata-rata tertinggi dengan kategori baik. Subsistem kekompakan kelompok dalam kelompok produksi beras organik di Kabupaten Subang melalui keikutsertaan setiap anggota dalam seluruh acara

operasional yang diselenggarakan oleh ketua kelompok, serta ketika timbul permasalahan dalam kelompok, anggota sering kali mencari solusi atas ketegangan yang berkembang dalam kelompok. Kelompok tersebut memperoleh skor rata-rata terkecil dengan kategori yang lebih sedikit. Ketegangan dalam kelompok produsen beras organik antara lain konflik internal dan persaingan dengan kelompok lain.

Penelitian lebih lanjut mengenai jaringan komunikasi dan dinamika kelompok dengan kapasitas petani pada industri pertanian padi organik dilakukan oleh Sriwahyuni et al. (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas petani dalam mengidentifikasi potensi sektor pertanian dan mempertahankan produksi beras organik lebih dipengaruhi oleh dinamika kelompok, terutama melalui kejelasan tujuan, fungsi kelompok dan suasana yang mendukung dalam kelompok. Demikian pula kemampuan petani dalam mengatasi permasalahan agribisnis lebih ditentukan oleh dinamika kelompok, terutama fungsi kelompok, kohesi kelompok, dan tekanan arahan kelompok.

Hubungan antara motivasi kelompok tani dengan tingkat adopsi teknologi pada usahatani padi di delta merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pondaag, et. al., (2022) Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kedinamisan kelompok tani dalam usahatani padi basah, mengetahui tingkat adopsi dalam usahatani padi basah dan menganalisis hubungan motivasi kelompok tani dengan penerapan teknologi dalam budidaya padi basah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok relatif tinggi yang menunjukkan bahwa tujuan, struktur, fungsi, tugas, suasana, aktivitas, dan kekompakan kelompok setiap anggota kelompok meningkat sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.

efektif. Tingkat adopsi teknologi usahatani padi gogo oleh setiap anggota kelompok tani relatif tinggi. Motivasi kelompok tani dengan penerapan teknologi mempunyai hubungan yang erat dan signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%, artinya jika motivasi kelompok meningkat maka partisipasi kelompok dalam penerapan teknologi padi juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariri, A (2017) tentang kemandirian kelompok tani berdasarkan motivasi dan kinerja kelompok dalam mengembangkan sektor pertanian hortikultura di kota Batu. Tujuan penelitian adalah untuk memahami proses dinamika kelompok tani, menganalisis kinerja dan kemandirian kelompok tani dalam proses pengembangan sektor pertanian, menganalisis model pembangunan, kinerja dan tim internal dan eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dinamika kelompok dimulai dari pengembangan kelompok, peran struktur kelompok, proses pembelajaran, proses kerjasama dan unit produksi. Grup yang banyak digunakan sebagai unit bisnis menarik banyak orang dan sebaiknya menggunakan saham agar anggota baru dapat bergabung. Kinerja kelompok tani tergolong sedang, artinya kelompok kadang-kadang saling bekerja sama. Kemandirian kelompok tani berada pada tingkat rata-rata, artinya kelompok tersebut masih belum mampu menjamin permintaan pasar secara kualitas dan kuantitas secara berkelanjutan.

Kelompok tani masih belum siap menerima risiko, namun kelompok tani mempunyai kemampuan mengembangkan pertanian dan memenuhi fungsi dan struktur kelompok dengan baik. Independensi tim dipengaruhi langsung oleh kinerja tim. Mengembangkan kemandirian kelompok merupakan proses yang diawali dengan aktivitas kelompok yang dinamis. Proses dinamika

kelompok dipengaruhi oleh dinamika kelompok dan lingkungan. Motivasi kelompok adalah keinginan nyata untuk berkembang dan lingkungan yang selalu mendukung menjadikan kelompok lebih dinamis. Proses dinamika kelompok yang teratur akan meningkatkan kinerja kelompok secara signifikan dan pada akhirnya menjadikan kelompok mampu mengembangkan industri pertanian dan pengembangan kelompok.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelompok memegang peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian, baik di bidang pertanian maupun di bidang peternakan dan perikanan. Semakin baik dinamika kelompok maka semakin baik pula aktivitas dalam kelompok, hal ini berarti dalam dinamika kelompok akan terjadi pengaruh, motivasi dan saling berbagi pengetahuan, teknologi atau kebutuhan dalam suatu kelompok.

### DAFTAR PUSTAKA

- Acep Hariri, Sinta D. Andaru, dan Agus Suliyanto. (2017). Pengembangan Kelompok Tani Yang Dinamis Dalam Pengembangan Agribisnis Hortikultura Di Kota Batu. *Jurnal Agriekstensia* Vol. 16 No. 2 Desember 2017.
- Arifin BS. 2015. *Dinamika Kelompok*. Pustaka Setia. Bandung
- Burgoon, M. dan Ruffner. M. 1993. *Human Communication: A Revision of Approaching Speech or Communcation*, 3rd edition. Holt Rinehart and Winston.
- Chang, Richard Y. 1999. *Membangun Tim yang Dinamis*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Ekawarna, H. 2018. *Manajemen Konflik Dan Stres*. PT Bumi Aksar. Jakarta Timur
- Faridah Evi Rostanti Meliyani, Tuhpawana P. Sendjaja, A. Choibar Tridakusumah. (2023) *Dinamika Kelompok Studi Pada Kelompok Tani Paguyuban Bumi Mandiri Dan Kelompok Tani Sri Tanggulun Di Kabupaten Subang*. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* Januari 9(1): 369-394
- Hadi, Suamsil. 2017. *Dinamika Kelompok (Sebuah Tinjauan Terhadap Perspektif Pembangunan Masyarakat Petani)*. LPPM – UM Press. Jember
- Handoko T. Tani. 2001. *Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia*. Edisi 2 Universitas Gajah Mada Press. Yoqyakarta.
- Hariri Acep. (2017). *Kemandirian Kelompok Tani Berbasis Dinamika Dan Kinerja Kelompok Dalam Pengembangan Agribisnis Hortikultura Di Kota Batu*. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Ibrahim, S. (2019). *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Munir, B. 2001. *Dinamika Kelompok, Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Nazsir, Nasrullah. (2008). *Sosiologi: Kajian Lengkap Konsep dan Teori Sosiologi Sebagai Ilmu Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran

- Pondaag, R., Asda Rauf, dan Ramlan Mustafa, (2023). Hubungan Antara Dinamika Kelompok Tani dengan Tingkat Adopsi Teknologi Pada Usahatani Padi Sawah Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmiah Agrinesia*: 97-105. Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Samsul Arifin, Bambang (2015). *Dinamika Kelompok*. Pustaka Setia, Bandung
- Sriati1, Henny Malini, Stela Wuland. (2019). Dinamika Kelompok dan Partisipasi Petani dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Di Kecamatan Sematang Borang Palembang. *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 16 (01) 2020
- Sunarto dan Bambang Priyanto. (2019). *Ekonomi Agribisnis*. Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Suprpto, T. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi, dan Peran Manajemen dalam Komunikasi*, Buku Seru. Jakarta
- Widyanti, Rahmi. 2019. *Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep)* Jilid-1 Penerbit Uniska MAB. Banjarmasin
- Wiryanto. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Grasindo. Jakarta
- Zulkarnain, W. (2013). *Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara



## **BAB 11**

### **KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT AGRIBISNIS**

Ir. Endah Wahyuning Asih, M.Sc  
[endah.wa68@gmail.com](mailto:endah.wa68@gmail.com)

#### **11.1 Latar Belakang**

Globalisasi yang terjadi tidak terelakan lagi, maka masyarakat agribisnis di Indonesia dituntut menumbuhkan keunggulan daya saing global bagi produk-produk yang dihasilkan baik untuk pasar tradisional domestik dan pasar internasional, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. (Tamara et al., 2021)

Apabila masyarakat agribisnis ingin produknya berhasil dipasarkan harus memperbesar akses pasar di negara-negara lain, dengan mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada pasar global, meningkatkan sumberdaya manusia, memahami budaya, kelembagaan, sistem nilai tukar, tarif, peraturan-peraturan, hambatan hambatan perdagangan, kebutuhan kebutuhan konsumen baru dan preferensi yang berbeda serta tatacara melakukan bisnis di berbagai negara (Tewal et al., (2017)

#### **11.2 Agribisnis**

Menurut Desmond & Siebert (2009). Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan sektor ekonomi yang mencakup kegiatan pertanian mulai dari produksi yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan pengolahan, pengelolaan, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian Secara tradisional, oleh (Firdaus &

Suharyon, 2019) agribisnis diartikan sebagai aktivitas-aktivitas di luar pintu gerbang usahatani (*beyond the farm gate, off-farm*) yang meliputi kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi usahatani, kegiatan industri yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan beserta perdagangannya, dan kegiatan yang menyediakan jasa yang dibutuhkan seperti misalnya perbankan, angkutan, asuransi atau penyimpanan.

Agribisnis memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan masa depan, pertanian berkelanjutan dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi, agribisnis dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga lingkungan, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Peran agribisnis dalam masyarakat merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, menghidupi jutaan petani, pekerja, dan pengusaha. Selain itu, agribisnis juga memainkan peran penting dalam penyediaan pangan, bahan baku industri, dan sumber pendapatan ekspor bagi banyak negara. Berhasil tidaknya produk agribisnis Indonesia untuk bersaing pada tataran global sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat agribisnis mampu sebagai aktor pengembang agribisnis (Asmarantaka, 2022).

### 11.3 Masyarakat

Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Awal dari masyarakat berasal dari hubungan antar-individu, kemudian menjadi kelompok yang lebih besar (Tampubolon, P. 2018).

Berdasarkan buku oleh Soekarso, I.P. (2015). Ciri-ciri dan fungsi fungsi masyarakat sebagai berikut:

Ciri-ciri masyarakat menunjukkan hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, terdapat interaksi antar anggota, mengalami perubahan, adanya pemimpin, dan memiliki stratifikasi sosial

Fungsi-fungsi masyarakat terdiri dari :

1. Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisik organik.
2. Fungsi integrasi mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem.
3. Fungsi mempertahankan berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat. Karena diorientasikan pada realita yang terakhir.
4. Fungsi pencapaian tujuan menyangkut hubungan antar-masyarakat sebagai sistem sosial sub-sistem aksi kepribadian untuk memiliki stratifikasi sosial. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan.

#### **11.4 Kepemimpinan**

Tidaklah mengherankan apabila minat untuk mempelajari model kepemimpinan dan profil pemimpin

sebagai elemen-elemen kunci dalam pengembangan sumberdaya manusia di sektor agribisnis meningkat akhir-akhir ini. Kepemimpinan dalam masyarakat agribisnis sangat penting untuk menghadapi masalah yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat (Fallo, 2021)

Kepemimpinan (*leadership*) adalah suatu perilaku dalam proses kontrol sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan lain, kekuatan dalam mempengaruhi perilaku orang lain untuk mengarahkan dalam ketercapaian tujuan tertentu (Mustapa & Maryadi, 2017).

Kepemimpinan dalam masyarakat agribisnis adalah sebuah proses dimana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada masyarakat agribisnis dalam upaya mencapai tujuan (Tampubolon, 2018).

Kepemimpinan dalam masyarakat agribisnis menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan masyarakat agribisnis. Kepemimpinan tentu saja mengkaitkan aspek individual seorang pemimpin dengan konteks situasi dimana pemimpin tersebut menerapkan kepemimpinan. Kepemimpinan juga memiliki sifat kolektif dalam arti segala perilaku yang di terapkan seorang pemimpin akan memiliki dampak luas bukan bagi dirinya sendiri melainkan seluruh masyarakat agribisnis. Masyarakat agribisnis harus memiliki pemimpin agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya pemimpin tentu sangat sulit dan tidak mudah dalam menjalankan semua elemen dan komponen yang ada dalam masyarakat tersebut. Seorang pemimpin tidak begitu saja dipilih dan ditentukan. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki olehnya. (Tabrani, 2018).

Pemimpin sebagai orang yang memiliki kualitas kepribadian dan watak tertentu, yang sesuai dengan situasi umum, didukung pengetahuan teknis dan pengalaman yang

relevan, yang mampu menyediakan fungsi yang diperlukan untuk menuntun kelompok guna mencapai tujuan, serta pada waktu yang sama memelihara dan membangun persatuan tim. Semua itu dilakukan berdasarkan rasio dan proporsi yang tepat dengan bantuan anggota tim lain (Utami, 2021). ).

Pemimpin dalam masyarakat agribisnis adalah orang yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas proses kegiatan agribisnis yang ada di lingkungan masyarakat agribisnis dan pemimpin yang baik dapat mengatur sasaran yang optimis sambil mengarahkan pada tujuan melalui strategi yang efektif. Segenap kemampuan dalam berpikir dan berbuat menjadi pertimbangan yang sangat urgen diperhatikan (Utami, 2021).

Menurut Marayasa et al., 2020, Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru . Untuk itu, Syarat-syarat Pemimpin yang Baik dan Benar.

### **1. Syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin**

Pengembangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan umum yang luas.
2. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalist yang baik juga.
3. Kemampuan berkembang secara mental
4. Ingin tahu
5. Kemampuan analistis
6. Memiliki daya ingat yang kuat
7. Mempunyai kapasitas integrative
8. Keterampilan berkomunikasi
9. Keterampilan mendidik
10. Personalitas dan objektivitas
11. Pragmatismo
12. Mempunyai naluri untuk prioritas
13. Berani
14. Tegas dan sebagainya

## **2. Beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin**

1. Kemampuan analitis (analytical skills) yakni kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi masyarakat dalam melaksanakan usaha.
2. Kemampuan untuk fleksibel (flexibility atau adaptability skills) yaitu kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi.
3. Kemampuan berkomunikasi (communication skills) yakni kemampuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang perubahan gaya kepemimpinan yang kita terapkan.

Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Maka jika ingin

menjadi pemimpin yang baik jangan pikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri dulu Tidak akan bisa mengubah orang lain dengan efektif sebelum merubah diri sendiri. Bangunan akan bagus, kokoh, megah, karena ada pondasinya. Maka sibuk memikirkan membangun umat, membangun masyarakat, merubah dunia akan menjadi omong kosong jika tidak diawali dengan diri sendiri. Merubah orang lain tanpa merubah diri sendiri adalah mimpi mengendalikan orang lain tanpa mengendalikan diri. (Indryani, 2020).

### **3. Fungsi Pemimpin dalam masyarakat agribisnis**

Tugas pokok seorang pemimpin pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi (Simarmata et al., 2021). Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pimpinan seorang diri, tetapi dengan menggerakkan masyarakat agribisnis yang dipimpinnya. Agar masyarakat agribisnis yang dipimpin mau bekerja secara efektif seorang pemimpin di samping harus memiliki inisiatif dan kreatif harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang pemimpin pada masyarakat agribisnis meliputi: pengambilan keputusan, menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menempatkan sesuai tugas pokok fungsinya juga kemampuan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan atasan) maupun secara horisontal (antar bagian atau unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

#### 4. Fungsi Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan (Marayasa et al., 2020)

Salah satu fungsi pemimpin dalam manajemen adalah mengambil keputusan secara efektif. Keberadaan sumber-sumber, biaya, bahan, keahlian, tenaga, pengetahuan, waktu dan ruang sangat terbatas, oleh karena itu timbulah pengambilan keputusan. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan mutlak ada pada pemimpin.

Fungsi kepemimpinan pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Fungsi yang berkaitan dengan tugas yang disebut fungsi pemecahan masalah
2. Fungsi pemeliharaan kelompok yang disebut fungsi sosial

Langkah pengambilan keputusan bervariasi, meskipun demikian secara umum meliputi:

1. Merumuskan masalah
2. Merumuskan hasil yang diharapkan
3. Mengembangkan pilihan penyelesaian
4. Mengetahui apa yang harus dilaksanakan setelah keputusan diambil.

Ada beberapa **sikap kepemimpinan** dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, diantaranya:

1. Menjalin kedekatan dengan masyarakat. Kepemimpinan dalam masyarakat akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari masyarakat. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan anda.
2. Memberikan semangat dan motivasi Kepemimpinan dalam masyarakat bukan melulu soal pangkat dan

jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil yang dilakukan.

3. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab  
Kepemimpinan dalam masyarakat adalah tentang kepercayaan. Berikan masyarakat kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah feedback agar ke depannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan.

#### **5. Tugas utama pemimpin**

Pendekatan ini mengharuskan pemimpin untuk memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan masyarakat agribisnis (Simarmata et al., 2021). Oleh karena itu, tugas utama pemimpin, khususnya dalam sistem masyarakat agribisnis, adalah

1. Bagaimana ia mengelola sistem agribisnis sehingga berhasil
2. Bagaimana merancang dalam membangun ulang sistem agribisnis agar berhasil
3. Harus mampu membangun sistem agribisnis dan agroindustri yang memiliki nilai (values), arah yang jelas, struktur
4. Mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memiliki daya saing yang tinggi.
5. Memahami berbagai aspek yang terkait dengan semua subsistem dari sistem agribisnis dan agroindustri pada berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan
6. Strategi-strategi yang relevan harus dielaborasi untuk memudahkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

## **6. Peranan Kepemimpinan**

Peran kepemimpinan terdiri dari peran sebagai tokoh, peran sebagai pemimpin, peran sebagai penghubung, peran sebagai monitor, peran sebagai penyebar informasi, peran sebagai juru bicara, peran sebagai wirausaha, peran sebagai pengendali gangguan, peran sebagai pengalokasi sumber daya, peran sebagai penegosiasi dan peran kepemimpinan dalam konflik masyarakat agribisnis. Ada juga Gaya kepemimpinan suportif dan partisipatif yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pemimpin. (Tamara et al., 2021)

### **1. Peranan Penghubung Antar Perorangan**

#### **a. Peran Sebagai Tokoh**

Peran pemimpin dianggap sebagai perwakilan organisasi dalam setiap kegiatan formalnya menyatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang bisa mempengaruhi dan memimpin pengikutnya dalam membawa ke arah tujuan bersama. (Arifien 2021)

#### **b. Peran Sebagai Pemimpin**

Peran ini berkaitan dengan pengerahan dan pemberian pengarahan atau bisa dikatakan seperti memberikan motivasi dan dorongan pengikutnya untuk bekerja. Menurut Tewal et al., (2017) menyatakan bahwa arti pemimpin adalah individu yang bisa mempengaruhi anggota kelompok sedangkan kepemimpinan adalah suatu sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota ke anggota lain untuk mendorong kelompok dalam mencapai kebutuhan anggotanya

#### **c. Peran Sebagai Penghubung**

Peran ini berkaitan dengan seorang pemimpin diharuskan untuk melakukan interaksi dengan pihak luar untuk mendapat dan mencari informasi. Menurut Goffee dan Jones (2005) (dalam Tamara et al., 2021) pemimpin harus menjalin

hubungan yang baik dengan orang lain, yang dapat berarti menekankan aspek yang berbeda dari diri dengan kelompok yang berbeda. Peran sebagai penghubung dapat dilihat dari jalinan relasi mitra untuk bekerja sama dengan masyarakat agribisnis.

#### **d. Peran Sebagai Monitor**

Peran ini menjelaskan bahwa pemimpin secara berkelanjutan memonitor lingkungan organisasinya untuk mendapatkan informasi bisa berupa kasus, gosip, atau spekulasi yang masih membutuhkan verifikasi (Hasanah *et al.*, n.d.). Myres (1987) (dalam Fenanlampir, 2020) mengemukakan bahwa komunikasi itu penting dan merupakan sentral dari kehidupan organisasi. Komunikasi itu konsep yang sederhana tetapi vital untuk menyalurkan informasi. Peran sebagai monitor dapat dilihat dari terselenggaranya RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dipimpin oleh pemimpin.

#### **e. Peran Sebagai Penyebar Informasi**

Menurut Lubis & Jaya (2021) pengarahan atasan pada hakikatnya memberi kejelasan dan mengurangi ketidakpastian, sekaligus merupakan bagian dari perhatian atasan terhadap kepentingan bawahan. Pada dasarnya pemimpin akan melakukan peran sebagai pembagi informasi kepada anggotanya yang bertujuan agar informasi yang dibutuhkan dapat diketahui oleh anggota. Seperti menyelesaikan adanya isu-isu

#### **f. Peran Sebagai Juru Bicara**

Menurut Handiman et al. (2022) efektivitas kepemimpinan seringkali melekat dengan kemampuan seorang pemimpin melakukan pengaruh interpersonal melalui komunikasi dengan setiap pihak mengenai tujuan organisasi. Peran sebagai juru bicara sering digunakan pemimpin dalam

mewakili organisasi untuk menyampaikan informasi lingkungan organisasi yang dipimpin oleh pemimpin. Semisal adanya kesepakatan mengenai kerjasama dalam pelaksanaan program

#### **g. Peran Sebagai Wirausaha**

Denison dan Mishra (1995) (dalam Handiman et al., 2022) menyatakan bahwa pentingnya seorang pemimpin yang efektif memastikan anggota perusahaan dapat mengidentifikasi lingkungan bisnis yang dihadapi dan perlunya fokus strategi tertentu. Pemimpin selayaknya memiliki jiwa berwirausaha dalam mengembang organisasinya.

#### **h. Peran Sebagai Pengendali Gangguan**

Handiman et al. (2022) mengemukakan pemimpin organisasi memiliki kemampuan pemecahan masalah yang efektif sehingga mereka mengantisipasi masalah sebelum terjadi dan bertahan sampai masalah terpecahkan.

#### **i. Peran Sebagai Pengalokasian Sumber Daya**

Sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya yang akan dimanfaatkan untuk organisasi. Menurut Handiman et al. (2022) kepemimpinan yang mendasarkan kepada relasi *partnership*, memungkinkan pemimpin bersama sumberdaya keahlian yang dimiliki menghadapi berbagai perubahan di luar organisasi.

#### **j. Peran Sebagai Penegosiasi**

Dari waktu ke waktu pemimpin pastinya akan terlibat negosiasi dengan pihak dalam maupun luar organisasi. Pemimpin yang baik perlu menyusun strategi yang menguntungkan bagi organisasinya. Menurut Hakiem (2003) (dalam Lubis & Jaya, 2021) pemimpin harus mampu

mengambil keputusan, harus pandai, cakap, dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

#### **k. Peran Kepemimpinan Dalam Konflik Masyarakat Agribisnis**

Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para Pimimpin, penyelesaian konflik bukanlah menilai mana yang benar atau yang salah, tetapi untuk membawa pihak-pihak yang terlibat agar melihat apa yang menjadi inti permasalahan secara lebih obyektif. Disini seorang pemimpin dituntut untuk melihat permasalahan secara dingin, tetapi dalam menghadapi pihak-pihak yang terlibat konflik harus secara hangat. Dalam penyelesaian konflik pada masyarakat agribisnis, pemimpin dituntut untuk mempunyai sikap empati dan adil, bukannya netral. Karena kalau netral berarti tidak tahu apa-apa. Empati artinya bahwa seolah-olah kita menghayati atau mengetahui apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terolibat, tetapi bukan berarti setuju. Sedangkan adil artinya bahwa tak ada pihak yang merasa direndahkan atau diabaikan. Mencari temuan-temuan fakta, penelusuran bersama sejauh mungkin dan pemecahan masalah yang masuk di akal sehingga membuka pintu menuju hal-hal yang konstruktif. Hakiem (2003) (dalam Lubis & Jaya, 2021)

## **2. Gaya Kepemimpinan**

### **a. Kepemimpinan Suportif**

Lubis & Jaya (2021) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan seperti ini biasanya identik dengan pemimpin yang selalu bersedia menjelaskan segala permasalahan kepada anggota organisasi, mudah untuk didekati, dan selalu memuaskan hati para anggotanya. Sikap pemimpin dalam tipe ini biasanya menunjukkan sikap yang

ramah dan peduli terhadap bawahannya dan menciptakan kesejahteraan. Gaya suportif seperti mengarahkan cara pihak atas memperlakukan perannya kepada pihak bawahannya.

### **b. Kepemimpinan Partisipatif**

Putra et al. (2013) menyatakan gaya kepemimpinan ini identik dengan meminta dan menggunakan saran-saran bawahan dalam rangka mengambil keputusan. Gaya partisipatif seperti mengarahkan cara pihak bawah menyampaikan aspirasinya kepada pihak atasnya.

### **c. Pengembangan Kinerja**

Menurut Soekarso (2015) bahwa indikator dalam organisasi kepemimpinan yang efektif kinerjanya ditunjukkan melalui 1) terjadinya produktivitas organisasi yang tinggi, 2) ada kepuasan kerja anggota meningkat, dan 3) terjadinya kontribusi nilai tambah bagi berkembangnya lingkungan. Jika berdasarkan SK Kementrian Pertanian No. 41/Kpts/OT.210/1992 salah satu yang menjadi tolak ukur penentuan kinerja kelompok tani adalah kemampuan untuk merencanakan kegiatan dalam meningkatkan produktivitas usahatani (termasuk analisis usahatani dan pasca panen) dengan mengimplementasikan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan SDA secara optimal (Firdaus & Suharyon, 2019).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berpengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajuan suatu kelompok masyarakat sangat tergantung pada komitmen pimpinannya. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan organisasi, akan selalu berupaya dan mencari masukan untuk melakukan berbagai inovasi. Sosok pemimpin yang baik dan berhasil yaitu pemimpin perubahan yang mampu

mentransformasikan keadilan sosial, keadilan ekonomi, kestabilan politik, penegakkan hukum, dan pemersatu dalam kebhinekaan. Dalam hal penegakkan keadilan dalam sistem dan usaha agribisnis, pemimpin juga memiliki andil yang sangat besar dalam membuat aturan dan kebijakan. Jadi apabila terjadi kesalahan atau ketidakadilan dari perjalanan kegiatan suatu kelompok masyarakat maka yang bertanggung jawab dalam keadaan tersebut adalah pemimpin Soekarso (2015)

Kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan dan menelaraskan pertumbuhan subsistem-subsistem dari sistem agribisnis serta mengintegrasikannya sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh sehingga mampu menghadapi dan mengantisipasi dinamika perubahan lingkungannya (Hakiem, 2003)

Tulisan ini membahas tentang berbagai model kepemimpinan dalam masyarakat agribisnis dan profil pemimpin masyarakat agribisnis yang dibutuhkan di masa depan.

## DAFTAR PUTAKA

- Arifien, S. (2021). *Kepemimpinan Syariah*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Asmarantaka, Ratna (2022). *Manajemen Agribisnis (Edisi 3)* (PDF). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 5. ISBN 9786234806496.
- Bass, B.M. 1995, *Leadership and Performance beyond Expektations*. New York: Free Press. Bass, B.M. 1996, *Form Transactional to Transformational Leadership*:

- Learning to Share Vision. Burns, J.M. 1978, Leadership. New York: Harper & Row.
- Desmond; Siebert, John W. (2009). "Toward Better Defining the Field of Agribusiness Management" (PDF). International Food and Agribusiness Management Review. **12** (4)
- Fallo, A. R. (2021). Kualitas Pemimpin dalam Organisasi serta Implementasinya Secara Empiris di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 58.71.
- Fenanlampir, A. (2020). Komunikasi Persuasif dalam Dakwah Konteks Indonesia. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Firdaus, F. & Suharyon, S. (2019). Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usahatani Padi Lahan Rawa Dan Metode Pemberdayaannya: Studi Kasus Pada Kegiatan Padi Sawah Di Lahan Sub Optimal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi |JIITUJ|*, 3(2): 162–169.
- Handiman, U.T., Faridi, A., Prasetya, A.B., Hasibuan, A., Ismail, M., Dharma, E., Purba, S., Hidayatulloh, A.N., Purba, B., Mustapa, J., Gandasari, D., Agusta, R., Sudarmi, J. & Simarmata (2022). Komunikasi dan Kepemimpinan Organisasi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Handiman, U. T., Faridi, A., Prasetya, A. B., Hasibuan, A., Ismail, M., Dharma, E., Purba, S., Hidayatulloh, A. N., Purba, B., & Mustapa, J. (2022). Komunikasi dan Kepemimpinan Organisasi. Sleman: Yayasan Kita Menulis.

- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI.
- Hasanah, A., Karuniawan, D.A. & Pratama, N.P. n.d. Tugas kepemimpinan. (125030400111059).
- Indryani, D. (2020). *Strategis Komunikasi Pemimpin Buram (Manajemen Kemandirian Moral)*. Sadharananikarana: *Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu*, 2(2), 348.368.
- Lubis, J. & Jaya, I. (2021). *Komitmen Membangun Pendidikan (Tinjauan Krisis Hingga Perbaikan Menurut Teori)*. Medan: Pusdikra Mitra Jawa.
- Marayasa, I. N., Yuangga, K. D., Ahidin, U., Sugiarti, E., & Kencana, P. N. (2020). *Pelatihan Dasar Kepemimpinan Taman Belajar Kreatif Mekarsari Kabupaten Bogor Jawa Barat*. *BAKTIMAS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 53.56. <https://doi.org/10.32672/btm.v2i1.2103>.
- Marlina, L. (2013). *Tipe-tipe kepemimpinan dalam manajemen pendidikan*. *Ta.dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(02), 215.227. <https://doi.org/10.19109/td.v18i02.47>.
- Mustapa, Z. & Maryadi (2017). *Kepemimpinan Pelayan (Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan)*. Jakarta: Celebes Media Perkasa.
- Putra, C.B., Utami, H.N. & Hakam, M.S. (2013). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Direktif, Suportif, Dan Partisipatif Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Astra Internasional Tbk. Daihatsu Malang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2): 11–20. Tersedia di <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/93>.

- Simarmata, H. M. P., Hidayatulloh, A. N., Revida, E., Hasibuan, A., Komariyah, I., Kuswandi, S., Hutabarat, M. L. P., Purba, S., Firdaus, E., & Tjiptadi, D. D. (2021). *Organisasi: Manajemen dan Kepemimpinan*. Sleman: Yayasan Kita Menulis.
- Soekarso, I.P. (2015). *Kepemimpinan Kajian Teoritis dan Praktis*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Tabrani, M. D. (2018). Metode Kepemimpinan. *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 86.100. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v3i2.4476>.
- Tamara, D., Afandi, F.A., Machmud, M., Tarigan, N.P., Heriyati, P. & Santosa, W. (2021). *Keberlanjutan dalam Perspektif Bisnis dan Inklusifitas*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Tampubolon, P. (2018). Pengorganisasian dan Kepemimpinan Kajian terhadap Fungsi-fungsi Manajemen Organisasi dalam Upaya untuk Mencapai Tujuan Organisasi. *Jurnal STINDO Profesional*, 4(3), 22.35.
- Tewal, B., Adolfina, Pandowo, M.H.C. & Tawas, H.N. (2017). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Patra Media Grafindo.
- Utami, I. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Palopo. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

## **BAB 12**

### **KELEMBAGAAN AGRIBISNIS**

Dr. Fitri Dian Perwitasari, S.Pt. M.Si.

[fitri.dian@umc.ac.id](mailto:fitri.dian@umc.ac.id)

#### **12.1 Pengertian Kelembagaan Agribisnis**

Konsep yang umum digunakan tidak sama dengan konsep sosiologis, lembaga tidak terdiri dari bangunan, kelompok orang, atau organisasi, lembaga adalah suatu sistem yang baku untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat, atau secara formal seperangkat kebiasaan dan tata kelakuan yang berkaitan dengan aktivitas dasar manusia, lembaga adalah proses yang diatur untuk melakukan berbagai tugas tertentu. Sebuah institusi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga memiliki fungsi. Lembaga juga merupakan sebuah konsep yang terintegrasi dengan struktur, melibatkan pola-pola aktivitas yang lahir dari aspek sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pola-pola organisasi untuk melaksanakannya (Tedjaningsih & Nuryaman, 2018).

Lembaga adalah aturan atau peraturan yang mengatur, diikuti atau ditaati oleh masyarakat. Aturan membantu anggota masyarakat menentukan hak dan kewajiban mereka dan menetapkan cara mereka bekerja sama dan bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya. Meskipun lembaga tidak memiliki anggota, mereka memiliki pengikut. Meskipun perbedaan antara anggota dan pengikut sangat sederhana, namun penting untuk diingat. Lembaga selalu merupakan sistem ide dan tindakan yang terorganisir. Setiap lembaga memiliki asosiasi sendiri, yang menjalankan aturan-aturan lembaga. Lembaga terdiri dari dua kata: lembaga dan nilai

atau norma. Lembaga memiliki nilai dan norma yang mengatur kegiatannya. Agribisnis, di sisi lain, adalah bisnis pertanian dari hulu ke hilir yang mencakup semua kegiatan pertanian, seperti produksi, penyimpanan, pemasaran, pengolahan bahan dasar pertanian, serta penyediaan input dan penyuluhan, penelitian, dan layanan kebijakan (Ratna et al., 2023).

Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan nilai-nilai dan prosedur umum tertentu, dan prosedur umum adalah pola perilaku standar yang diikuti, dan sistem hubungan adalah jaringan peran dan status yang menjadi sarana untuk menjalankan perilaku tersebut. Kehidupan sosial yang tidak terencana menghasilkan institusi. Orang mencari cara-cara praktis untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka menemukan beberapa pola yang dapat digunakan yang menjadi kebiasaan karena diulang secara teratur. Ketika praktik tersebut terus berkembang dan berubah, orang-orang dapat bergabung untuk mengkodifikasi dan melegalkannya dari waktu ke waktu. Kelembagaan adalah masalah yang kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kelembagaan. Kelembagaan dapat dilihat dari sudut pandang internal dan eksternal, yang mempengaruhi kegiatan kelembagaan. Oleh karena itu, penganalisisan kelembagaan sangat penting untuk mengetahui kondisi saat ini secara menyeluruh dan menemukan solusi untuk masalah yang masih ada (Kusnandar et al., 2013).

Kelembagaan menetapkan standar yang jelas yang menentukan status dan peran seseorang. Kelembagaan adalah penggantian perilaku spontan atau eksperimental dengan perilaku yang diharapkan, diterima, teratur, dan dapat

diprediksi. Kelembagaan terjadi ketika suatu sistem status dan peran yang teratur dan sistem harapan status dan peran telah diterima secara luas oleh masyarakat. Lembaga-lembaga pada sistem Agribisnis termasuk pada subsistem jasa penunjang, dimana mereka harus dapat membantu kegiatan pada subsistem pengadaan sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran. Sebagai konsumen dari jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga penunjang agribisnis tersebut, petani merupakan subjek utama dalam pengembangan agribisnis.

Banyak kelembagaan yang terlibat dalam lingkup agribisnis yang luas. Termasuk di dalamnya adalah perbankan, perdagangan, industri, transportasi, pergudangan, lembaga pendidikan, penelitian, dan kelompok swadaya lainnya. Secara umum, bisnis pertanian harus dilakukan secara terpadu. Ruang lingkup agribisnis mencakup banyak kelembagaan dan mencakup semua jenis bisnis, mulai dari pengadaan dan penyediaan sarana produksi hingga pemasaran produk yang dibuat oleh perusahaan pertanian atau produk lainnya (Wahyuningsih, 2007). Terlepas dari peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga agribisnis di daerah pedesaan, petani melakukan kegiatan bisnis pertanian. Kelembagaan agribisnis tersebut dapat berupa input pertanian, tenaga kerja pertanian, alat dan mesin pertanian, pemasaran hasil pertanian, permodalan, kelompok tani, dan penyuluhan. Semua kelembagaan agribisnis tersebut akan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian petani melalui berbagai mekanisme. Kelembagaan sarana produksi akan mempengaruhi keputusan petani untuk mengusahakan komoditas pertanian tertentu melalui pengaruhnya terhadap kemudahan petani dalam memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan. Pengorganisasian permodalan juga akan

mempengaruhi keputusan petani untuk mengusahakan komoditas pertanian tertentu melalui pengaruhnya terhadap kemudahan petani dalam memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan. Sementara itu, bagaimana petani menggunakan teknologi pertanian akan dipengaruhi oleh kelompok tani dan organisasi penyuluhan (Irawan & Suhartini, 2008).

## **12.2 Jenis kelembagaan**

Jenis kelembagaan terdiri dari enam variabel kelembagaan agribisnis: sarana produksi, pembiayaan, pemasaran, kelompok tani, informasi dan teknologi, dan pengadaan alat pertanian dan mesin (alsintan) (Agustin et al., 2019).

### **Lembaga sarana produksi,**

Lembaga sarana produksi adalah kelembagaan yang membantu petani mendapatkan sarana produksi seperti benih, bibit, pupuk, dan pestisida disebut organisasi pengadaan sarana produksi (Agustin et al., 2019). Lembaga sarana produksi pertanian misalnya pedagang benih dan bibit, pedagang pupuk, pedagang pestisida dan herbisida, dan pedagang input pertanian lainnya (Wahyuningsih, 2007). Lembaga sarana produksi adalah lembaga ekonomi yang terlibat dalam produksi, penyediaan dan distribusi sarana produksi seperti: BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES), Koperasi Unit Desa (KUD) dan perusahaan manufaktur. Lembaga-lembaga ini biasanya terlibat dalam produksi, perdagangan dan pemasaran sarana produksi seperti pupuk, pestisida dan benih/bibit yang dibutuhkan petani (Selvi et al., 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan subsistem praproduksi pada usaha penggemukan sapi potong rakyat di

Jawa Tengah termasuk dalam kategori kurang baik. Kondisi ini antara lain disebabkan karena struktur pasar untuk produk-produk seperti bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, dan lainnya merupakan struktur pasar oligopoli. Pasar oligopoli berarti konsumen input, yaitu petani, cenderung bertindak sebagai penerima harga, sementara penyedia input, biasanya produsen, cenderung bertindak sebagai penentu harga.

### **Lembaga Pembiayaan,**

Lembaga pembiayaan adalah lembaga yang menyediakan dana atau modal dikenal sebagai lembaga pembiayaan. Petani menggunakan modal mereka untuk menyediakan sarana produksi, alsintan, membayar upah tenaga kerja, dan hal-hal lainnya (Agustin et al., 2019). Lembaga-lembaga kredit atau pembiayaan harus memberikan dukungan modal untuk pertumbuhan agribisnis. Kurangnya modal atau perbankan investasi adalah masalah umum bagi perusahaan agribisnis. Pengembangan agribisnis sangat bergantung pada investasi ini (Wahyuningsih, 2007).

Permodal adalah masalah serius. Kebijakan penyediaan modal usaha yang selama ini, sering dilaksanakan dan bersifat langsung (dalam bentuk bantuan modal), dalam jangka panjang jangka panjang dapat mengakibatkan ketergantungan petani kepada pemerintah. ketergantungan petani kepada pemerintah. Petani pada era ini era ini seharusnya tidak dipandang sebagai sebagai objek, tetapi harus diperankan sebagai subjek pembangunan yang diberi kebebasan untuk mandiri. Fokus kebijakan seharusnya ditujukan untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai sumber modal bagi petani kecil. Pada prinsipnya lembaga keuangan yang dapat berperan dalam dalam pemenuhan permodalan bagi petani

adalah lembaga keuangan formal (bank pemerintah dan pemerintah dan swasta), lembaga keuangan non formal (rentenir tengkulak, bank keliling), dan lembaga non-keuangan (BUMN, laba yang disimpan). (badan usaha milik negara, laba yang disimpan) (Prasetyo & Ekowati, 2013).

Perbankan sebagai lembaga keuangan perlu mengembangkan skema kredit dengan jenis, jumlah, dan persyaratan yang sesuai dengan dengan kebutuhan dan tahapan usaha yang dilakukan oleh petani. Penyediaan kredit bagi petani harus diupayakan diupayakan dengan prosedur yang sederhana, dengan tingkat suku bunga yang kondusif, dengan agunan yang yang dapat disediakan oleh petani, dan tetap didasarkan pada kelayakan usaha bagi petani sebagai calon debitur. Skema kredit yang saat ini cukup populer adalah adalah KUPS (kredit usaha pembibitan sapi), KKPE (kredit ketahanan pangan dan energi), KUR (kredit usaha rakyat) (Prasetyo & Ekowati, 2013).

### **Lembaga pemasaran,**

Kelembagaan pemasaran adalah badan-badan usaha (koperasi) yang mengirimkan produk pertanian dari produsen ke konsumen (Agustin et al., 2019). Peran koperasi untuk memberdayakan petani juga dipandang sebagai hal yang realistis dan realistis dan memiliki peran yang positif. Esensi dari pemberdayaan ekonomi petani, adalah bagaimana petani dapat meraih nilai tambah di hilir agribisnis, serta mampu memperkuat usahanya. memperkuat usaha mereka. Hal ini dikarenakan karena petani umumnya relatif kecil dan lemah dalam berbagai aspek kecil dan lemah dalam berbagai aspek, sehingga secara individu tidak akan mampu secara individual tidak akan mampu meraih nilai tambah (Prasetyo & Ekowati, 2013).

Lembaga pemasaran dalam agribisnis memiliki posisi yang sangat penting, karena dengan adanya kelembagaan tersebut aliran komoditas, produk dan barang berupa hasil pertanian dari pedagang atau distributor dapat sampai ke tangan konsumen (Selvi et al., 2022). Beberapa ketentuan termasuk dalam sistem lembaga pemasaran: (a) pendaftaran eksportir dan importir; (b) barang yang dilarang ekspor; (c) barang yang diatur perdagangannya; (d) barang yang diawasi ekspornya; (e) harga patokan; (f) barang yang dilarang impornya; (g) negara yang dilarang ekspornya; (h) syarat dan ketentuan kontrak penjualan; (i) standar produk; (j) sertifikat terkini (Wahyuningsih, 2007). Produk pertanian idealnya harus dijual dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Gunakan rantai pemasaran yang pendek, karena rantai pemasaran yang lebih pendek lebih memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan bagi produsen dan konsumen. 2. Menggunakan penanganan produk yang dapat dilakukan untuk membuat produk menarik bagi pembeli. 3. Menggunakan organisasi kelembagaan petani, seperti gapoktan, kelompok tani, atau koperasi, untuk menjaga agar produk tetap terjual. Selain itu, sudah saatnya lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang pemasaran diaktifkan. Hal ini didasari oleh keragaman sosial dan budaya yang tentunya juga menunjukkan keragaman preferensi konsumen terhadap produk pertanian. Untuk membuat produk bernilai, penelitian dan pengembangan harus mengeksplorasi berbagai preferensi konsumen di pasar lokal dan regional (Prasetyo & Ekowati, 2013).

### **Lembaga kelompok tani,**

Lembaga kelompok tani adalah wadah bagi petani untuk mendapatkan informasi dan teknologi, dan pengadaan alat

pertanian dan mesin (alsintan) (Agustin et al., 2019). Organisasi kelompok tani termasuk dalam sistem penerimaan atau sistem yang menerima dan menerapkan inovasi teknologi yang diintroduksikan, sedangkan kelembagaan penyuluhan termasuk dalam sistem penyampaian yang berfungsi menyalurkan inovasi teknologi kepada penggunanya (Irawan & Suhartini, 2008). Penyuluh pertanian memainkan peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada petani mengenai pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan karena mereka membantu, mendorong, dan mendukung upaya petani (Azizah, 2022).

Kelompok tani merupakan bagian dari subsistem hulu pada sistem agribisnis, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pengadaan dan distribusi sarana produksi, yang menjamin terlaksananya usaha tani dan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal. Benih, pupuk, obat-obatan (seperti pestisida), alat-alat pertanian, dan informasi pertanian merupakan bagian dari subsistem agribisnis hulu. Untuk mendukung keberlanjutan pertanian, kelembagaan petani harus memberikan masukan dan pertimbangan bagi para pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal (Azizah, 2022).

Kelembagaan di tingkat petani adalah organisasi yang dibentuk oleh, untuk, dan dari petani. Kelembagaan di tingkat petani meliputi asosiasi dan dewan komoditas pertanian, gabungan kelompok tani (gapoktan) atau kelompok tani (poktan), dan memiliki fungsi utama untuk memperjuangkan kepentingan petani. Karena perannya yang penting dalam mendukung pembangunan pertanian, mereka harus diprioritaskan dan dikelola dengan baik (Handayani, 2020). Kelembagaan petani terdiri dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Keberadaan kelompok tani

diperlukan dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai pengolahan hasil sampai pada kegiatan pemasaran hasil pertanian (Azizah, 2022).

### **12.3 Peran kelembagaan**

Peran dan fungsi kelembagaan sangat penting dalam pengembangan usaha ekonomi produktif karena kelembagaan terbukti mampu mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan, seperti kemiskinan. Kelembagaan juga menjadi faktor pendorong yang mendorong pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing (Oktaviani & Lidyana, 2023). Peningkatan produktivitas pertanian tidak serta merta menjamin kesejahteraan petani. Pemerataan pendapatan antara petani yang bergerak di sub-sistem on-farm dengan pelaku agribisnis di sub-sektor hulu dan hilir hanya dapat dicapai dengan mensejahterakan petani. Dengan menyatukan kekuatan dalam sebuah lembaga yang dapat memenuhi keinginan petani, posisi tawar petani dapat ditingkatkan. Jika petani berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan organisasi, maka organisasi tersebut dapat berfungsi dan berperan secara optimal (Nasrul, 2012).

Program intensifikasi dan peningkatan produksi pangan yang diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek dengan membangun kelembagaan menunjukkan peran kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian lebih mungkin terjadi jika inisiatif pembangunan pertanian dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga di mana orang-orang yang memiliki semangat berorganisasi menggabungkan pengetahuan mereka dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan inisiatif tersebut

(Nasrul, 2012). Untuk meningkatkan posisi tawar petani, kolektivisasi produksi dan pemasaran produk dapat dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam skala yang lebih besar dan menggabungkan kemudahan pengelolaan faktor produksi untuk menekan biaya produksi. Tujuan dari kolektivisasi pemasaran adalah untuk menghilangkan tengkulak dan meningkatkan efisiensi distribusi dengan cara mengurangi rantai tata niaga yang merugikan petani (Akhmad, 2007; Nasrul, 2012).

Kelembagaan dibentuk untuk memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kualitas kelembagaan yang baik akan berdampak pada kemampuan dalam mengelola usaha agribisnis (Herdiansah & Randi, 2016). Kelembagaan petani memainkan peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat petani. Kelembagaan petani merupakan bagian dari lembaga sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam masyarakat. Kelembagaan tani memiliki peran strategis dalam menggerakkan sistem agribisnis, khususnya di pedesaan. Memenuhi kebutuhan petani dan mengembangkan fungsi kontrol kelembagaan yang mendukung sistem agribisnis merupakan komponen penting dalam organisasi pertanian (Prasetyo & Ekowati, 2013).

#### **12.4 Kendala kelembagaan**

Kelembagaan pertanian yang kurang berperan dalam mendukung pengelolaan sumberdaya pertanian menyebabkan kegiatan pertanian sulit mencapai kondisi optimal. Untuk dapat mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal, dalam menjalankan usahanya petani harus bekerja sama secara kolektif, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang

kelembagaan khususnya di tingkat petani. Perubahan jaman dan tantangannya menuntut suatu lembaga yang lebih sesuai dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat petani serta mendukung pembangunan pertanian (Anantanyu, 2011).

Dalam hal koordinasi produksi, petani biasanya menghadapi masalah, mulai dari masalah input, produksi, dan produk hingga masalah pendapatan pertanian. Masalah-masalah tersebut menunjukkan ketidakmampuan petani dalam menegosiasikan harga produk dan input. Petani tidak dapat memperoleh akses ke pasar, informasi pasar, dan modal usaha karena posisi tawar yang lemah, sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatannya (Prasetyo & Ekowati, 2013). Input masih harus melalui rantai pemasaran yang panjang dan tidak efektif untuk sampai ke tangan petani. Harga input di tingkat petani seringkali berfluktuasi dan cenderung lebih tinggi daripada harga di tingkat Perusahaan (Prasetyo & Ekowati, 2013).

## **12.5 Strategis kelembagaan**

Karena persaingan dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang mendukung usahatani berbahaya bagi keberlangsungan kelembagaan itu sendiri, diperlukan penguatan kerjasama antar lembaga dalam kelembagaan agribisnis, menepis persaingan, memperkuat posisi kelembagaan agribisnis, dan melakukan upaya pemberdayaan kepada petani, perempuan tani, dan petani (Akbar *et al.*, 2022).

Untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab organisasi kelembagaan petani (seperti kelompok tani, gapoktan, koperasi), serta pemerintah daerah (dinas teknis terkait) dalam menetapkan aturan atau regulasi sistem pengadaan input pertanian. Selain itu, dapat meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman petani dan pelaku (Akbar et al., 2022) usaha tani melalui pelatihan di tempat kerja. Di sisi lain, pemerintah harus membantu terobosan riset dan inovasi teknologi, terutama untuk menghindari ketergantungan pada sumber daya eksternal untuk input pertanian. Bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal akan menjadi tantangan di masa depan dalam membangun sistem agribisnis yang berdaya saing (Prasetyo & Ekowati, 2013). Inovasi dan kemajuan teknologi pertanian memungkinkan peningkatan dan pertumbuhan organisasi agribisnis, karena hal ini memungkinkan berkembangnya sumber pengetahuan dan inovasi pertanian dan banyak pihak yang terlibat dari hulu ke hilir dalam bisnis pertanian sayuran dan buah-buahan (Prain et al., 2020). Kemajuan ini juga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi (Akbar et al., 2022).

Kelembagaan petani harus memenuhi empat kriteria agar kuat dan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (i) kelembagaan tersebut harus berasal dari pemikiran petani sendiri, (ii) pengurusnya harus dipilih secara teratur oleh petani, (iii) memiliki kekuatan kelembagaan yang formal, dan (iv) harus partisipatif. Manfaat utama pembentukan kelembagaan petani adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagian kehidupan sosial masyarakat dan berfungsi sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya sesuai dengan keinginan masyarakat (Prasetyo et al., 2012).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kelembagaan pertanian agar berdaya guna dan berkelanjutan adalah:

1. Prinsip-prinsip otonomi-termasuk otonomi individu dan desa-untuk membuat kelembagaan pertanian menjadi efektif dan berkelanjutan Pertama, otonomi individu mengacu pada individu sebagai perwujudan dari

- keinginan untuk bebas, yang merupakan anugerah yang paling berharga dari Sang Pencipta bagi setiap manusia. Ketika mereka menjadi individu yang otonom, mereka akan membentuk komunitas yang otonom. Kedua, konsep "desa otonom" atau "lokalitas spesifik" berarti desa dapat membangun kelembagaan petani sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pada umumnya, wilayah pedesaan memiliki sejarah yang panjang dan beragam, serta sistem, nilai, dan budaya yang berbeda. Kelembagaan pertanian, termasuk organisasi, hukum, dan sistem harus diadaptasi dan mempertimbangkan komponen-komponen yang ada.
2. Prinsip pemberdayaan: Gagasan tentang bagaimana seseorang, kelompok, atau komunitas berusaha untuk mengambil kembali kendali atas kehidupan mereka dan menciptakan masa depan yang mereka inginkan. Kemandirian adalah tujuan akhir dari pemberdayaan. Ada dua prinsip utama yang membentuk proses pemberdayaan yang harus dipahami. Pertama adalah memberikan ruang atau kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan dengan cara yang mereka pilih sendiri; yang kedua adalah memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan ruang atau kesempatan yang tercipta. Salah satu contohnya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar. Di masa depan, pemberdayaan kelembagaan harus berfokus pada: (i) usaha komoditas yang menguntungkan-pangan atau nonpangan; (ii) skala ekonomi dan teknologi padat karya; (iii) kerja sama yang menguntungkan dengan kemitraan koleial; dan (iv) pembentukan saling ketergantungan hulu-hilir. (v) meningkatkan permodalan dan kredit dari lembaga-

- lembaga seperti bank, koperasi, petani, dan sebagainya; (vi) menciptakan sistem informasi bisnis yang transparan, kompetitif, dan kooperatif; (vii) memanfaatkan peluang-peluang yang ada di setiap subsistem agribisnis; dan (viii) mendukung sumber daya manusia yang terdidik, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif.
3. Gagasan kemandirian lokal Pendekatan kemandirian lokal dalam pembangunan menyiratkan bahwa setiap tahapan proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Cara ini akan menciptakan kondisi yang otonom dimana setiap elemen akan tetap eksis dengan keberagamannya. Salah satu alasan mengapa lembaga-lembaga lokal di pedesaan terabaikan adalah karena mereka dianggap tidak memiliki semangat ekonomi yang memadai. Akibatnya, mereka gagal membangun kelembagaan petani selama ini. Pada masyarakat tradisional, kelembagaan melekat pada kekerabatan dan komunitas untuk kegiatan ekonomi, dengan sedikit lembaga namun banyak fungsi. Hal ini berbeda dengan masyarakat modern yang ditandai dengan munculnya banyak lembaga dengan tugas-tugas yang spesifik.

Alternatif strategi kelembagaan lokal menurut (Akbar et al., 2022), 1) peningkatan sumber daya manusia secara terus menerus dan pelibatan pemuda tani dalam struktur kepengurusan lembaga agribisnis. 2) struktur kepengurusan lembaga agribisnis, pelatihan pengelolaan administrasi lembaga berbasis digital, 3) Peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan dan pemanfaatan dukungan pemerintah secara maksimal. 4) Lembaga keuangan dan pemanfaatan dukungan pemerintah secara maksimal, 5) Maksimalisasi peran dan fungsi lembaga dan pengurus lembaga serta

peningkatan kesadaran berorganisasi bagi seluruh anggota serta peningkatan pelayanan. maksimalisasi peran dan fungsi lembaga dan pengurus lembaga dan peningkatan kesadaran berorganisasi bagi seluruh anggota serta peningkatan pelayanan kepada anggota. 6) kesadaran bagi seluruh anggota dan peningkatan pelayanan kepada seluruh anggota kelompok dan konsumen.

Pengembangan kelembagaan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan anggota. Hal ini berarti, secara sosial ekonomi lembaga tersebut: (a) memiliki kemampuan untuk mempertahankan mempertahankan kelangsungan hidupnya; (b) sejauh mana inovatif lingkungannya sebagai memiliki nilai intrinsik, yang dapat diukur secara operasional dengan lingkungannya sebagai memiliki nilai intrinsik, yang secara operasional dapat diukur dengan indeks-indeks seperti tingkat otonomi dan pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga lain; dan (c) sejauh mana pola inovatif dalam organisasi baru organisasi baru menjadi normatif bagi lembaga-lembaga sosial lainnya. sosial lainnya dalam sistem sosial yang lebih besar (Anantanyu, 2011).

Berdasarkan studi (Anantanyu, 2011), langkah-langkah tindakan strategis untuk strategis dalam mengembangkan kelembagaan petani dapat dilakukan sebagai berikut

1. Peningkatan dukungan penyuluhan pertanian, terdiri dari:
  - a. Peningkatan kompetensi penyuluh dalam memfasilitasi petani, meliputi: penguasaan materi, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap sasaran, dan komitmen terhadap profesi; Penggunaan pendekatan penyuluhan yang tepat, pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan karakteristik sasaran, meliputi: kesesuaian informasi, ketepatan metode, penggunaan berbagai

- teknik penyuluhan dan penggunaan media dalam penyuluhan.
- b. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, meliputi: ketersediaan program penyuluhan, kemudahan akses, dukungan fasilitas yang diperlukan dan pelaksanaan program.
2. Meningkatkan peran pihak eksternal
    - a. Memfasilitasi dukungan kepemimpinan lokal.
    - b. Menjembatani peran pihak eksternal (pemerintah, swasta dan lembaga lainnya).
  3. Meningkatkan dinamika kelompok sebagai melalui:
    - a. Peningkatan pemahaman terhadap tujuan kelompok.
    - b. Mengembangkan struktur.
    - c. Mengembangkan fungsi-fungsi tugas.
    - d. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelompok.
    - e. Meningkatkan kohesivitas kelompok.
    - f. Mendorong kondusifitas suasana kelompok.
    - g. Menciptakan ketegangan kelompok.
    - h. Mendorong efektivitas kelompok.
  4. Peningkatan kapasitas petani, dilakukan melalui:
    - a. Peningkatan pendidikan, baik formal maupun nonformal, bagi petani yang mendukung usaha tani atau agribisnis.
    - b. Memfasilitasi berbagai kegiatan agribisnis.
    - c. Mendorong kemampuan berusaha untuk meningkatkan pendapatan.
    - d. Memfasilitasi penyediaan sarana kegiatan agribisnis bagi petani.
    - e. Menyediakan sumber belajar termasuk informasi yang dibutuhkan petani.

5. Peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan petani. Partisipasi anggota dalam kelembagaan diartikan sebagai pilihan anggota masyarakat secara aktif untuk berperan dalam aktualisasi diri dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Upaya peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan dilakukan dengan proses bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kelembagaan petani, yang meliputi
  - a. Peningkatan kesadaran, meliputi: pengembangan pemahaman tentang masalah-masalah tertentu, Penyediaan fasilitas sosial, menumbuhkan kepemimpinan lokal, menumbuhkan kerjasama, membangun wawasan kehidupan bersama, menciptakan komitmen terhadap kehidupan bersama, menciptakan komitmen kebersamaan, dan meningkatkan kemampuan kebersamaan, dan meningkatkan kemampuan bertani dan bersosialisasi. keterampilan bertani dan keterampilan sosial.
  - b. Pengorganisasian, meliputi: peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya, peningkatan kemampuan pengambilan keputusan bersama, pengembangan kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan pengambilan keputusan bersama, pengembangan kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan sarana dan prasarana kelembagaan
  - c. Pemantapan, antara lain: pemantapan visi kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan membangun jejaring dan kerjasama antar lembaga. kewirausahaan, dan membangun jejaring dan kerjasama antar lembaga.

Hasil penelitian (Azizah, 2022) mengatakan bahwa untuk mengembangkan agribisnis cengkeh, perlu dilakukan beberapa langkah berikut ini: 1). Pemerintah perlu mendukung dan mendorong kelembagaan petani untuk meningkatkan peran kelompok tani sebagai unit usaha. Dengan demikian, petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam perdagangan cengkeh. 2) Diperlukan penyuluhan tentang cara bercocok tanam, peremajaan pohon cengkeh, dan pengolahan cengkeh agar petani dapat meningkatkan produksi dan nilai jual cengkeh. 3) Perlu adanya pengembangan dan penguatan Perumda Aman Mandiri yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pembelian produk cengkeh. Dengan demikian, pemasaran cengkeh dapat meningkatkan stabilitas harga jual dan memberikan harga jual yang layak bagi petani.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T., Suyudi, & Nuryaman, H. (2019). Kinerja Kelembagaan Agribisnis Pepaya California Agribusiness Institution Performance Pepaya California. *Jurnal Agristan*, 1(2), 106–116.
- Akbar, Syarif, A., Ikmal, M. I., & Jumiati. (2022). Penguatan Kelembagaan Lokal Dalam Pengembangan Agribisnis Hortikultura Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng Strengthening Local Institutions In The Development Of Horticultural Agribusiness In Uluere District, Bantaeng Regency. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 159–174. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *Sepa*, 7(2), 102–109.

- Azizah, N. H. (2022). Identifikasi Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Cengkeh Di Kota Tidore Kepulauan (Identification Of Institutional Role In Development Clove Agribusiness In The City Of Tidore Islands). *Jurnal Agribisnisikanan*, 15(2), 668–682. <https://doi.org/10.52046/agrikan.V15i2.668-682>
- Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.24198/jsg.V1i1.11185>
- Irawan, B., & Suhartini, H. S. (2008). Kelembagaan Agribisnis Pada Berbagai Tipe Desa. *Panel Petani Nasional: Mobilisasi Sumber Daya Dan Penguatan Kelembagaan Pertanian*, 320–338.
- Kusnandar, Padmaningrum, D., Rahayu, W., & Agung, W. (2013). Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 92–101.
- Oktaviani, D. A., & Lidyana, N. (2023). Peran Dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis Sebagai Upaya Pembangunan Pertanian Serta Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (Jisa) Issn*, 23(2), 101–107.
- Prain, G., Wheatley, C., Odsey, C., Verzola, L., Bertuso, A., Roa, J., & Naziri, D. (2020). Research-Development Partnerships For Scaling Complex Innovation: Lessons From The Farmer Business School In Ifad-Supported Loan-Grant Collaborations In Asia. *Agricultural Systems*, 182(C), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.102834>

- Prasetyo, E., & Ekowati, T. (2013). Kelembagaan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis Pangan (Agriculture Institutions Based On The Local Wisdom To Support Food Agribusiness Development). *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis*, 423–432.
- Prasetyo, E., Santosa, P. B., & Rianto, E. (2012). The Influence Of Agribusiness Subsystem On Beef Cattle Fattening Farm's Profit In Central Java. *Indonesian Tropical Animal Agriculture*, 37(2), 121–126.
- Ratna, Fattah, M. A., & Hasriani. (2023). Peran Kelembagaan Petani Dalam Pengembangan Usaha Tani Kentang Berbasis Agribisnis. *Wiratani*, 6(1), 27–33.
- Selvi, S., Alwi, L. O., & Arif, L. O. K. (2022). Peran Kelembagaan Agribisnis Usaha Tanaman Hias Di Kota Kendari. *Jia (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(4), 120. <https://doi.org/10.37149/jia.v7i4.24400>
- Tedjaningsih, T., & Nuryaman, H. (2018). *Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Mendong Institutional Role In The Development Of Mendong Agribusiness* (Vol. 4, Issue 2).
- Wahyuningsih, S. (2007). Pengembangan Agribisnis Ditinjau Dari Kelembagaan. *Mediagro*, 3(1), 9–20.

## **BAB 13**

### **KEMITRAAN AGRIBISNIS**

**Dr. Ir. Tatang Mulyana, M. M.**  
[tatangraksadinata@gmail.com](mailto:tatangraksadinata@gmail.com)

#### **13.1 Pendahuluan**

Salah satu upaya menjaga keberlanjutan dan perkembangan usaha adalah dengan menghadirkan inovasi. Inovasi berkaitan dengan nilai kebaruan, pembeda, atau keunggulan yang dimiliki serta dapat ditawarkan pada pelanggan atau konsumen. Melakukan inovasi tidak bisa secara instan tetapi melalui uji coba secara terus menerus. Memetakan dan memahami sumberdaya yang dimiliki dan dibutuhkan merupakan langkah utama untuk melakukan inovasi. Selanjutnya upaya untuk memenuhi sumberdaya yang tidak dimiliki dan dibutuhkan menjadi dasar perlunya suatu usaha melakukan kemitraan (Purnomo et al.,2021). Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya kemitraan yaitu kompleksitas industri pertanian, globalisasi, keterbatasan sumber daya, risiko pertanian, dan peningkatan kesadaran akan keberlanjutan.

Kompleksitas industri pertanian yang melibatkan banyak pihak sering kali melibatkan Kompleksitas industri pertanian yang melibatkan banyak pihak sering kali melibatkan rantai pasok yang kompleks, dari subsistem produksi hingga distribusi dan pemasaran. Kemitraan dapat membantu mengelola kompleksitas ini dengan mengintegrasikan berbagai tahap proses dalam satu kerangka kerja. Sebagai contoh pihak yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan salah satu dari rantai pasok seperti pasokan input sarana produksi, modal, teknologi, dan pemasaran dapat

bermitra dengan pihak yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan sebagian atau keseluruhan tahapan rantai pasok.

Petani sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal modal, teknologi, dan pengetahuan. Kemitraan dengan pihak swasta, pemerintah, atau lembaga lain dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Dalam era globalisasi, pasar pertanian menjadi semakin terhubung dan kompetitif. Kemitraan dapat membantu petani atau produsen lokal untuk meningkatkan daya saing mereka dengan memperluas jangkauan pasar dan mengadopsi praktik pertanian terbaik dalam manajemen produksi dan pemasaran.

Pertanian rentan terhadap berbagai risiko seperti perubahan cuaca, penyakit tanaman, atau fluktuasi harga pasar, karena berhubungan dengan alam yang sulit untuk dikendalikan dan diprediksi. Kemitraan dapat membantu dalam pembagian risiko antara berbagai pihak yang terlibat, serta dalam pengembangan strategi mitigasi risiko.

Para penggiat di bidang pertanian semakin sadar akan kelestarian lingkungan yang akan mendukung pertanian. Penerapan kemitraan selanjutnya yang bertujuan untuk mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik atau praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan.

## **13.2 Definisi dan Karakter Kemitraan Agribisnis**

### **A. Definisi Kemitraan Agribisnis**

Sebelum membicarakan kemitraan agribisnis ada baiknya membahas pengertian kemitraan. Kemitraan adalah bentuk kerjasama diantara dua atau lebih pihak yang sepakat untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam kemitraan setiap pihak biasanya menyumbangkan sumberdaya, modal, keahlian atau pengalaman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemitraan dapat terjadi dalam berbagai konteks mulai dari bisnis dan industri hingga organisasi nirlaba dan kerjasama antar negara. Sementara menurut (Hafsah, 2000), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan adalah kolaborasi bisnis antara bisnis, organisasi nirlaba, dan pemerintah dimana resiko, sumberdaya dan keterampilan dibagi dalam proyek yang menguntungkan masing-masing mitra serta masyarakat.

Kemitraan agribisnis adalah bentuk kerjasama antara petani atau produsen dengan pihak swasta, pemerintah, atau organisasi lainnya dalam mengelola usaha pertanian atau agribisnis. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, dengan membagi tanggung jawab, risiko, serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati (Widodo & Nursyamsi, 2018).

### **B. Karakteristik Kemitraan Agribisnis**

Karakteristik kemitraan agribisnis dicirikan seperti berikut ini (Kirsten & Sartorius, 2002):

1. Keterlibatan Petani: Kemitraan agribisnis melibatkan petani atau kelompok tani sebagai mitra utama. Mereka biasanya memiliki lahan, sumber daya alam, dan pengetahuan lokal yang penting untuk produksi pertanian.
2. Kesepakatan Kontrak: Kemitraan agribisnis sering kali didasarkan pada kesepakatan kontrak antara petani dan perusahaan atau institusi yang terlibat. Kontrak ini mencakup berbagai aspek seperti harga, volume produksi,

kualitas produk, bagi hasil, bantuan teknis, dan pembiayaan.

3. **Transfer Teknologi:** Salah satu tujuan utama kemitraan agribisnis adalah transfer teknologi dari perusahaan ke petani. Teknologi ini mencakup praktik pertanian yang lebih efisien, penggunaan benih unggul, pengendalian hama dan penyakit, dan pengelolaan sumber daya alam.
4. **Bantuan Keuangan:** Kemitraan agribisnis sering kali menyertakan bantuan keuangan kepada petani untuk meningkatkan produksi. Bantuan ini bisa berupa modal awal, pembiayaan input pertanian seperti benih dan pupuk, pestisida atau bantuan dalam hal pemasaran.
5. **Pelatihan dan Pendampingan:** Perusahaan atau institusi biasanya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bercocok tanam dan manajemen usaha pertanian.
6. **Partisipasi Pemerintah:** Pemerintah sering terlibat dalam pengembangan kemitraan agribisnis dengan memberikan kebijakan, insentif, dan dukungan infrastruktur untuk memfasilitasi kerja sama antara petani dan perusahaan.
7. **Resiko Bersama:** Kemitraan agribisnis juga menciptakan kesadaran akan risiko bersama antara petani dan perusahaan. Baik kegagalan panen, fluktuasi harga, maupun masalah lainnya menjadi tanggung jawab bersama dan dicari solusinya secara bersama-sama.

### **C. Tujuan dan Manfaat Kemitraan Agribisnis**

Salah satu tujuan utama kemitraan agribisnis adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi, manajemen yang lebih baik, dan akses terhadap sumber daya yang lebih besar. Kemitraan memungkinkan pembagian risiko antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok pertanian, sehingga mengurangi dampak dari

perubahan cuaca, penyakit tanaman, atau fluktuasi harga. Melalui kemitraan, petani dan produsen dapat memperluas jangkauan pasar mereka dengan mendapatkan akses ke jaringan distribusi yang lebih luas, baik di pasar lokal maupun internasional.

Kemitraan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani dan produsen untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam manajemen pertanian, teknologi, dan praktik keberlanjutan. Hal ini difasilitasi oleh mitra perusahaan baik pemerintah, ataupun swasta, serta koperasi, lembaga keuangan, serta lembaga lain yang terlibat. Kemitraan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide antara berbagai pihak yang terlibat, dan pada akhirnya mendorong inovasi dalam praktik pertanian, teknologi, dan produk.

### **13.3 Model Kemitraan Agribisnis**

Model kemitraan agribisnis mengacu kepada berbagai bentuk kerjasama pada berbagai bentuk kerjasama antara petani, perusahaan agribisnis dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sektor agribisnis. Berikut adalah beberapa model kemitraan agribisnis yang umum diterapkan: (Sumardjo et al., 2004)

1. Model Inti-plasma. Dalam model ini perusahaan agribisnis besar bekerja sama dengan kelompok tani (plasma). Perusahaan inti menyediakan bantuan teknis, input pertanian dan akses pasar, sementara petani plasma menyediakan lahan dan tenaga kerja. Hasil produksi biasanya dibagi sesuai kesepakatan (Hafsah, 2000).
2. Model *Contract Farming* (Kontrak Pertanian). Eaton & Andrew,( 2001) mendefinisikan *contract farming* sebagai

suatu kerjasama antara petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran untuk menghasilkan atau memasok produk pertanian yang diikuti dengan suatu persetujuan yang memuat ketentuan dan syarat yang berkaitan dengan harga dan produksi misalnya dalam hal penyediaan input, bantuan teknologi, kuantitas produk dan kualitas produk.

3. Model Koperasi. Petani membentuk koperasi yang sebagai perantara antara mereka dengan perusahaan agribisnis. Koperasi mengkoordinasikan produksi, pengumpulan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian, serta memberikan keuntungan ekonomi dengan skala dan daya tawar yang lebih tinggi bagi petani. Koperasi mewakili petani dalam berhubungan dengan pihak perusahaan terutama yang berkaitan dengan aspek finansial, karena koperasi merupakan lembaga atau organisasi resmi yang memiliki aturan yang jelas dan berbadan hukum.
4. Model Integrasi Vertikal. Perusahaan agribisnis mengintegrasikan model kerja sama berbagai tahap produksi dan pemasaran dalam satu rantai nilai. Ini bisa mencakup produksi bahan baku, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk akhir. Petani menjadi bagian dari rantai nilai ini melalui kontrak atau kemitraan.

### **13.4 Kelembagaan Kemitraan Agribisnis**

Kelembagaan adalah aturan-aturan baik formal ataupun informal yang mengatur interaksi antar individu dan membentuk struktur insentif dalam suatu masyarakat. Institusi formal mencakup hukum, regulasi dan aturan tertulis lainnya, sementara institusi informal mencakup norma, adat istiadat dan kebiasaan (North, 1990). Kelembagaan kemitraan agribisnis adalah rangkaian aturan dan mekanisme yang

mengatur hubungan dan interaksi antara petani dan perusahaan agribisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, akses pasar, dan keberlanjutan agribisnis (Royer, 1999).

Kelembagaan menawarkan berbagai manfaat bagi semua pihak yang terlibat seperti petani, perusahaan agribisnis, pemerintah serta masyarakat luas. Misalnya penggunaan varietas benih unggul dan teknologi irigasi unggul. Petani memiliki kepastian pasar karena perusahaan agribisnis berkomitmen membeli panen mereka. Akses ke pasar dan jaminan pembelian oleh perusahaan agribisnis atas hasil panen. Bagi perusahaan agribisnis akan memperoleh kepasian pasokan bahan baku. Contohnya perusahaan pengolahan kelapa sawit akan mendapat pasokan tandan buah segar teratur dari petani plasma. Bagi masyarakat dan pemerintah daerah, kelembagaan kemitraan akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah akan memperoleh manfaat atas pembangunan jalan dan fasilitas irigasi yang dibangun oleh perusahaan agribisnis.

Dalam kelembagaan kemitraan agribisnis banyak pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa setiap sistem akan berfungsi secara efisien dan efektif. Jumlah lembaga yang terlibat tergantung dari model kemitraan yang terbentuk dalam bermitra. Secara umum mencakup lembaga-lembaga utama seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga yang didanai pemerintah, badan-badan sektor sukarela, masyarakat lokal (kelompok atau individu), dan sektor swasta, namun dapat juga mencakup individu-individu yang 'penting' (McQuaid, 2000). Berikut pihak yang terlibat dalam kelembagaan kemitraan agribisnis dan perannya masing-masing: (Saragih et al., 2011).

1. Petani dan Produsen: Menghasilkan produk agribisnis baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perikanan.
2. Perusahaan Agribisnis (inti): Menyediakan input pertanian seperti benih, pupuk, pestisida; memberikan pendampingan teknis; membeli dan memproses hasil panen dari petani.
3. Koperasi dan Kelompok Tani: Mengorganisasikan petani, memberikan pelatihan, mengelola input pertanian, dan memfasilitasi akses pasar.
4. Lembaga Keuangan: Menyediakan pembiayaan dan kredit untuk petani dan perusahaan agribisnis, asuransi pertanian. Contoh: Bank Pemerintah/Swasta, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Asuransi.
5. Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, serta diseminasi hasil penelitian, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani. Contoh: Perguruan tinggi negeri/swasta, Lembaga Penelitian
6. Organisasi Non Pemerintah (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Memberikan bantuan teknis, dukungan finansial, advokasi kebijakandan pelatihan kepada petani. Contoh: LSM pertanian Bina Swadaya memberikan pelatihan kepada petani.

### **13.5 Kasus Kemitraan Agribisnis**

Secara praktik kemitraan agribisnis telah berlangsung cukup lama antara petani dengan perusahaan inti dengan berbagai model kemitraan atau pola hubungan seperti inti-plasma, kontrak/sub-kontrak, integrasi verikal dan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh kasus kemitraan agribisnis yang diperoleh dari berbagai jurnal.

Kasus Kemitraan Inti-Plasma. Kemitraan terjadi antara PTPN VII Kebun Kelapa Sawit Unit Bekri dengan Petani Kelapa Sawit Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah (Pasaribu et al., 2013). Model kemitraan ini dikenal dengan pola hubungan inti-plasma, PT Perkebunan Negara sebagai inti dan petani/kelompok tani sebagai kelompok mitra yang bermitra usaha. Pola hubungan sudah diatur dan disepakati oleh kedua lembaga kemitraan agribisnis ini. Kewajiban PTPN VII sebagai inti adalah memberikan pinjaman modal berupa bibit kelapa sawit siap tanam dan melakukan pembinaan teknis budidaya sampai dengan panen. petani sebagai plasma merawat tanaman kelapa sawitnya dengan baik serta memberikan bahan baku TBS (tandan buah segar). Dalam model inti-plasma ini menggunakan sistem kelembagaan kemitraan menurut Pakpahan, (1989), mengungkapkan bahwa ciri-ciri kelembagaan antara lain: 1) batas yurisdiksi, 2) *property rights* (hak kepemilikan), dan 3) aturan representasi. Hak pemilikan atas hasil produksi yang berupa tandan buah segar seperti tertulis pada surat perjanjian pinjaman bibit kelapa sawit antara PTPN VII dengan kelompok tani Bangun Jaya yang berada di desa Tanjung Jaya, kecamatan Bangun Rejo, kabupaten Lampung Tengah. Hak kepemilikan tanah masing-masing petani mitra kelapa sawit adalah kepemilikan lahan pribadi yang menjadi salah satu syarat dalam mengikuti kegiatan kemitraan dengan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri

Kasus kemitraan Contract Farming. Kemitraan *contract farming* berlangsung antara PT.PAS (Putra Agro Sejati) dengan petani hortikultura di Kabupaten Karo Sumatera Utara (Erfit, 2011). Bentuk hubungan kemitraan yang dijalankan yaitu pihak perusahaan mitra dalam hal ini PT PAS memberikan bantuan modal berupa bibit dan pupuk dalam bentuk suatu

paket kredit serta bantuan teknis kepada para petani mitranya. Paket kredit yang diberikan oleh pihak PT PAS harus dilunasi oleh petani pada saat panen dilakukan. Petani sebagai petani mitra diwajibkan untuk menjual hasil produksinya kepada pihak perusahaan, dengan harga dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Sementara pihak PT PAS sebagai perusahaan mitra diwajibkan pula untuk membeli hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani mitra. Secara terperinci bentuk hubungan kerjasama dari kemitraan usaha yang dijalankan oleh petani dengan PT PAS ini antara lain meliputi: 1) Kerjasama di bidang permodalan dalam bentuk bantuan modal yang diberikan oleh PT PAS kepada petani, dimana pihak petani mitra mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk bantuan bibit, pupuk dan pestisida dari PT PAS. 2) Kerjasama dibidang pemasaran, dimana pihak PT PAS diwajibkan untuk membeli hasil produksi yang dihasil oleh petani mitra sesuai dengan harga dan ketentuan lain yang ditetapkan, sementara itu petani diwajibkan menjual hasil pertaniannya kepada PT PAS. 3) Bantuan teknis, dimana PT PAS memberikan penyuluhan kepada petani mitra melalui petugas lapangan perusahaan. Aturan main dalam menjalankan kemitraan berkaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam kemitraan yang dijalankan baik formal atau tertulis maupun tidak tertulis. Jika dilihat aturan main yang digunakan dalam menjalankan kemitraan antara petani dengan PT PAS, maka sebagai suatu kemitraan dalam bentuk *contract farming* maka hubungan kerjasama yang dilakukan adalah bersifat formal dimana kemitraan yang dilakukan oleh PT PAS dengan petani diatur dengan aturan-aturan yang bersifat tertulis dengan menggunakan kontrak tertulis yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama (SPK). Didalam SPK yang dibuat oleh PT PAS pada

dasarnya dicantumkan beberapa hal berkaitan dengan kerjasama usaha yang dilakukan diantaranya hak dan kewajiban dari perusahaan mitra, hak dan kewajiban petani serta sanksi yang diterima oleh petani terhadap pelanggaran yang dilakukan dari kesepakatan yang ada.

### **13.6 Etika Kemitraan Agribisnis**

Hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis adalah etika. Demikian pula dalam kemitraan diperlukan etika karena menyangkut kerjasama antara pihak yang bermitra dengan mitranya. Hal ini penting untuk keberlanjutan kerjasama yang akan dibangun bersama. Etika kemitraan agribisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kemitraan agribisnis seperti petani produsen, distributor dan konsumen. Ini meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap keberlanjutan lingkungan (Fujita & Suwa-Eisenman, 2016). Pertama adalah kejujuran yang merupakan ketulusan hati dan merupakan sifat mendasar yang harfiah dimiliki manusia. Kerjasama tidak akan berlangsung dengan baik, tanpa dilandasi kejujuran. Berikutnya etika transparansi yaitu merupakan sifat atau kondisi dari suatu sistem, proses kegiatan yang dapat dipahami, diamati dengan jelas oleh pihak yang terlibat. Ini melibatkan adanya keterbukaan, kejelasan dan aksesibilitas informasi yang diperlukan. Contohnya pada pola kemitraan inti-plasma, pihak perusahaan inti yang tidak transparan dalam penetapan harga saat membeli produk dari petani plasma dalam kemitraan maka akan merugikan pihak petani. Selanjutnya etika yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab sosial yaitu

tanggung jawab berkaitan dengan keuntungan atau kerugian, tanggungjawab hukum atau mematuhi hukum, tanggung jawab etis melakukan hal yang benar dan adil dan tanggung jawab filantropi yaitu etika mengenai kontribusi pada masyarakat.. Tidak kalah penting yakni etika keberlanjutan lingkungan. Pihak-pihak yang bekerjasama dalam kemitraan agribisnis harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan praktik yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan ekosistem alam dengan cara mengelola alam secara hati-hati, mengurangi polusi dan menjaga keseimbangan ekologi (WCED, 1987).

### DAFTAR PUSTAKA

- Eaton, & Andrew, W. (2001). *Contract Farming Partnership For Growth. FAO Bulletin 145.*
- Erfit. (2011). Model Kemitraan Contract Farming Pada Agribisnis Hortikultura. *Jurnal Embrio*, 4(1), 6–17.
- Fujita, T., & Suwa-Eisenman, A. (2016). *Sustainable Agribusiness Management*. Publising: Springer.
- Hafsah, M. J. (2000). *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Bumi Aksara.
- Kirsten, J., & Sartorius, K. (2002). Linking agribusiness and small-scale farmers in developing countries: Is there a new role for contract farming? *Development Southern Africa* , 19(4).
- McQuaid, R. W. (2000). The Theory of Partnership - Why have Partnership", . In *Managing public-private partnership for public services: an international perspective* (pp. 9–35). Routledge .

- North, Douglas. C. (1990). *Institution, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Pakpahan. (1989). Perspektif Ekonomi Institusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 37(4):464(4), 445–464.
- Pasaribu, A. I., Hasanudin, T., & Nurmayasari, I. (2013). Pola Kemitraan dan Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usahatani Kelapa Sawit Antara PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra Di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 1(4), 358–367.
- Purnomo, D., Febbyanto, B. B., Sawitri, I., Miftachuddin, Zulkarami, M., & Sembiring, A. (2021). *Modul Pembelajaran Program Aktivasi Coworking Space Kota Bandung 2021*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Royer, J. S. (1999). Co-operative Organizational Strategies: A Neo-Institutional Digest . *Journal Of Cooperatives*, 14(1), 44–67.
- Saragih, B., Sipayung, T., Saragih, Jeff. R., & Dabukke, Frans. D. M. (2011). *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. IPB Press.
- Sumardjo, Sulaksana, J., & Darmono, W. A. (2004). *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya Jakarta.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.

Widodo, T., & Nursyamsi, D. (2018). *Kemitraan Agribisnis: Strategi Pengembangan Pertanian Berkelanjutan*. (1st ed.). Penebar Swadaya.

## **BAB 14**

### **KOMUNIKASI SOSIAL DAN PENYEBARAN INOVASI AGRIBISNIS**

**Dr. Arissaryadin, S.ST.,S.Pt.,M.Si**  
[ariessaryadin@gmail.com](mailto:ariessaryadin@gmail.com)

#### **14.1 Pendahuluan**

Inovasi dalam agribisnis memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Namun, inovasi tersebut memerlukan penyebaran yang efektif agar dapat diadopsi oleh para petani dan pelaku agribisnis lainnya. Dalam hal ini, komunikasi sosial menjadi elemen kunci yang menghubungkan inovasi dengan penerapan praktis di lapangan. Komunikasi sosial dalam agribisnis melibatkan berbagai aktor, mulai dari petani, penyuluh pertanian, hingga pembuat kebijakan, dan mencakup interaksi yang terjadi dalam jaringan sosial yang kompleks (Rogers, 2003).

Untuk memahami bagaimana komunikasi sosial memengaruhi penyebaran inovasi agribisnis, penting untuk melihatnya melalui tiga perspektif: ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Berger & Luckmann, 1991). Perspektif ontologi membantu kita memahami realitas sosial yang mendasari interaksi antar aktor dalam agribisnis, sementara epistemologi mengeksplorasi bagaimana pengetahuan tentang inovasi diperoleh dan disebarkan. Aksiologi, di sisi lain, menekankan pentingnya nilai-nilai dan etika dalam komunikasi sosial dan adopsi inovasi.

Bab ini akan menjelaskan bagaimana ketiga perspektif tersebut dapat diterapkan dalam konteks komunikasi sosial di agribisnis, dengan fokus khusus pada penyebaran inovasi.

Selain itu, bab ini juga akan menyajikan studi kasus dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tujuannya untuk memberikan gambaran konkret tentang bagaimana teori-teori ini diterapkan di lapangan dan bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya lokal mempengaruhi proses penyebaran inovasi.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi sosial dan penyebaran inovasi agribisnis, diharapkan para pelaku agribisnis, penyuluh, dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan adopsi inovasi yang lebih luas dan berkelanjutan di kalangan petani.

## **14.2 Ontologi Komunikasi Sosial dalam Agribisnis**

Ontologi dalam konteks komunikasi sosial agribisnis berkaitan dengan pemahaman tentang realitas sosial yang membentuk interaksi antar aktor dalam sistem agribisnis (Berger & Luckmann, 1991). Realitas sosial ini mencakup berbagai elemen seperti struktur sosial, relasi kekuasaan, dan norma-norma budaya yang ada di dalam masyarakat agribisnis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Di sini, ontologi membantu kita memahami bagaimana aktor-aktor dalam agribisnis memandang dan berinteraksi dengan inovasi yang diperkenalkan.

Dalam banyak kasus, struktur sosial dalam agribisnis dapat sangat menentukan bagaimana inovasi disebar dan diterima (Berger & Luckmann, 1991). Misalnya, dalam masyarakat agraris tradisional, posisi sosial seorang petani dalam komunitas dapat memengaruhi aksesnya terhadap informasi dan teknologi baru.. Petani yang lebih terintegrasi dalam jaringan sosial lokal, seperti mereka yang terlibat dalam kelompok tani atau memiliki hubungan dekat dengan

penyuluh, cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap inovasi (Slamet, 2009).

Realitas sosial juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antara berbagai aktor dalam sistem agribisnis. Misalnya, perusahaan besar yang memiliki kendali atas pasar input pertanian atau produk hasil pertanian dapat memengaruhi jenis inovasi yang diperkenalkan dan bagaimana inovasi tersebut dipromosikan. Petani kecil yang memiliki sedikit kendali atas sumber daya ekonomi mungkin kurang berdaya untuk menolak atau memodifikasi inovasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka (Slamet, 2009).

Selain itu, norma-norma budaya lokal juga memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial agribisnis. Di beberapa komunitas, nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan solidaritas dapat mendukung adopsi inovasi yang bersifat kolektif, tetapi bisa juga menjadi penghalang bagi inovasi yang dianggap mengancam tatanan sosial yang ada (Effendi, 1993). Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mempertimbangkan norma-norma budaya ini ketika memperkenalkan inovasi baru.

Dengan demikian, pemahaman ontologis tentang komunikasi sosial dalam agribisnis memungkinkan kita untuk melihat di balik permukaan interaksi sosial dan mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi penyebaran inovasi (Barrow & Woods, 2006). Hal ini penting untuk merancang strategi komunikasi yang tidak hanya efektif tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang ada.

### **14.3 Epistemologi Komunikasi Sosial dalam Agribisnis**

Epistemologi dalam komunikasi sosial agribisnis membahas bagaimana pengetahuan tentang inovasi diperoleh,

disebarkan, dan diinternalisasi oleh para aktor agribisnis (Barrow & Woods, 2006). Pengetahuan dalam agribisnis tidak hanya berasal dari penelitian ilmiah dan penyuluhan formal, tetapi juga dari pengalaman praktis, kearifan lokal, dan interaksi sehari-hari di antara petani (Mardikanto, 2010).

Salah satu aspek penting dalam epistemologi komunikasi sosial adalah sumber pengetahuan (Yayuk & Arissaryadin, 2021). Pengetahuan agribisnis dapat bersumber dari berbagai entitas, termasuk lembaga penelitian, universitas, penyuluh, dan petani itu sendiri (Mardikanto, 2010). Namun, cara pengetahuan ini disebarakan sering kali menentukan tingkat keberhasilannya dalam diadopsi (Effendi, 1993). Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman praktis atau pembelajaran sosial di antara petani cenderung lebih mudah diadopsi karena dianggap lebih relevan dan dapat diandalkan (Rogers, 2003).

Proses pembelajaran sosial memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan agribisnis (Vygotsky, 1978). Pembelajaran sosial terjadi ketika petani saling berbagi pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi langsung, seperti dalam kelompok tani, atau melalui observasi dan imitasi (Bandura, 1977). Pembelajaran sosial ini sering kali lebih efektif dibandingkan dengan metode penyuluhan formal, terutama dalam konteks di mana petani lebih percaya pada pengetahuan yang diperoleh dari sesama petani daripada dari pihak luar (Bandura, 1977).

Selain itu, teknologi komunikasi modern juga semakin memainkan peran dalam menyebarkan pengetahuan agribisnis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Internet, media sosial, dan aplikasi pertanian berbasis teknologi menjadi sarana penting bagi penyuluh dan petani untuk berbagi informasi (Effendi, 1993). Namun, adopsi teknologi ini tidak merata,

terutama di daerah pedesaan yang memiliki infrastruktur teknologi yang terbatas (Rogers, 2003). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aksesibilitas dan literasi digital dalam merancang strategi komunikasi berbasis teknologi.

Epistemologi komunikasi sosial dalam agribisnis membantu kita memahami tidak hanya bagaimana pengetahuan disebarkan tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut dipahami dan diinternalisasi oleh petani (Barrow & Woods, 2006). Ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang disebarkan melalui komunikasi sosial benar-benar bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh petani dalam praktik sehari-hari mereka (Effendi, 1993).

#### **14.4 Aksiologi Komunikasi Sosial dalam Agribisnis**

Aksiologi dalam komunikasi sosial agribisnis berfokus pada nilai-nilai dan etika yang mendasari proses penyebaran inovasi (Yayuk & Arissaryadin, 2021). Nilai-nilai ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, aksiologi membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi keputusan petani untuk mengadopsi atau menolak inovasi tertentu (Rogers, 2003).

Keberlanjutan lingkungan sering kali menjadi nilai penting dalam adopsi inovasi agribisnis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Petani yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan cenderung lebih selektif dalam memilih inovasi yang akan mereka adopsi (Effendi, 1993). Inovasi yang dianggap merusak lingkungan, seperti penggunaan pestisida berlebihan atau teknologi yang tidak ramah lingkungan, mungkin ditolak oleh petani yang memiliki kesadaran ekologis yang tinggi (Slamet, 2003). Oleh karena itu, penyuluh

harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam menyampaikan informasi tentang inovasi (Rogers, 2003).

Keadilan sosial juga merupakan nilai yang signifikan dalam penyebaran inovasi agribisnis (Berger & Luckmann, 1991). Inovasi yang hanya menguntungkan segelintir petani atau yang meningkatkan kesenjangan sosial dalam komunitas dapat menimbulkan resistensi (Effendi, 1993). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa inovasi yang diperkenalkan bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan petani miskin (Slamet, 2003). Pendekatan inklusif ini tidak hanya meningkatkan adopsi inovasi tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata (Rogers, 2003).

Etika dalam komunikasi sosial juga memegang peranan penting dalam proses penyebaran inovasi (Effendi, 1993). Penyuluh dan pemangku kepentingan lainnya harus beretika dalam menyampaikan informasi, dengan tidak memaksakan inovasi yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi lokal atau yang tidak dipahami sepenuhnya oleh petani (Slamet, 2003). Etika komunikasi ini penting untuk membangun kepercayaan antara penyuluh dan petani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas penyebaran inovasi (Rogers, 2003).

Dengan demikian, aksiologi memberikan kerangka nilai yang membantu dalam menilai dan mengarahkan proses komunikasi sosial dan penyebaran inovasi agribisnis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Nilai-nilai ini tidak hanya mempengaruhi apakah inovasi akan diadopsi tetapi juga bagaimana inovasi tersebut diterima dan diintegrasikan ke dalam praktik pertanian sehari-hari (Effendi, 1993).

## **14.5 Studi Kasus Penyebaran Inovasi Pertanian di NTB**

NTB adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pertanian di daerah ini masih didominasi oleh metode tradisional yang berorientasi pada subsistensi. Meskipun demikian, beberapa program inovasi pertanian, seperti pengenalan varietas padi unggul, teknik irigasi modern, dan penggunaan pupuk organik, telah diperkenalkan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah.

Namun, adopsi inovasi ini tidak merata di seluruh wilayah NTB. Dalam beberapa kasus, inovasi yang diperkenalkan oleh penyuluh atau program pemerintah tidak sepenuhnya diterima oleh petani lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana komunikasi sosial berperan dalam penyebaran inovasi dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan adopsi inovasi di daerah tersebut.

### **A. Analisis Ontologi dalam Studi Kasus**

Dari perspektif ontologi, realitas sosial di NTB dipengaruhi oleh struktur sosial yang kuat, di mana hubungan antara petani, tokoh masyarakat, dan penyuluh memainkan peran penting dalam penyebaran inovasi. Petani yang lebih dekat dengan penyuluh atau yang memiliki hubungan baik dengan tokoh masyarakat cenderung lebih cepat menerima inovasi. Selain itu, norma-norma budaya seperti gotong royong dan hierarki sosial mempengaruhi cara petani berinteraksi dengan inovasi.

Misalnya, dalam beberapa komunitas di NTB, keputusan untuk mengadopsi inovasi sering kali dibuat secara kolektif, setelah mendapatkan persetujuan dari para tokoh adat atau pemimpin komunitas. Jika inovasi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal atau dapat mengganggu tatanan sosial, inovasi tersebut mungkin akan ditolak. Dengan memahami

realitas sosial ini, penyuluh dan pihak terkait dapat merancang strategi komunikasi yang lebih sensitif terhadap budaya lokal dan struktur sosial yang ada.

### **B. Analisis Epistemologi dalam Studi Kasus**

Dari perspektif epistemologi, pengetahuan tentang inovasi di NTB sering kali diperoleh melalui interaksi langsung antara petani dan penyuluh. Namun, pengetahuan lokal dan pengalaman praktis juga memainkan peran penting dalam penyebaran inovasi. Petani yang telah mencoba dan berhasil menggunakan teknik baru biasanya menjadi sumber pengetahuan yang lebih dipercaya oleh petani lain dibandingkan dengan penyuluh yang datang dari luar.

Sebagai contoh, dalam pengenalan varietas padi unggul di salah satu desa di NTB, petani yang pertama kali mencoba varietas baru ini kemudian menjadi 'agen perubahan' di komunitas mereka. Melalui interaksi sosial dan diskusi kelompok, pengetahuan tentang cara penanaman dan perawatan padi unggul ini disebarluaskan kepada petani lain. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh secara lokal dan melalui pengalaman praktis memiliki nilai yang tinggi dalam proses adopsi inovasi.

### **C. Analisis Aksiologi dalam Studi Kasus**

Dari perspektif aksiologi, nilai-nilai dan etika lokal sangat mempengaruhi adopsi inovasi di NTB. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, kesejahteraan komunitas, dan keadilan sosial sering kali menjadi pertimbangan utama dalam keputusan petani untuk mengadopsi inovasi. Jika inovasi dianggap dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh anggota komunitas, inovasi tersebut lebih mungkin diadopsi.

Sebagai contoh, penggunaan pupuk organik yang diperkenalkan melalui program penyuluhan di salah satu desa di NTB berhasil diadopsi secara luas karena dianggap lebih

ramah lingkungan dan sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan yang dijunjung tinggi oleh komunitas setempat. Selain itu, inovasi ini juga dianggap lebih adil karena dapat diakses oleh semua petani, terlepas dari tingkat ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai dan etika lokal dalam penyebaran inovasi.

#### **D. Implikasi dan Pelajaran dari Studi Kasus**

Studi kasus penyebaran inovasi di NTB menunjukkan bahwa keberhasilan penyebaran inovasi sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai budaya. Para penyuluh dan pemangku kepentingan lainnya perlu lebih sensitif terhadap konteks lokal dan merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang ada. Selain itu, melibatkan petani sebagai agen perubahan dan memanfaatkan pengetahuan lokal dapat meningkatkan keberhasilan adopsi inovasi.

Dengan demikian, studi kasus ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana komunikasi sosial yang efektif dapat memfasilitasi penyebaran inovasi agribisnis di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan budaya yang unik seperti NTB.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bandura, A. 1977. *Social Learning Theory*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Barrow, R., & Woods, R. 2006. *An Introduction to Philosophy of Education 4th Edition*. New York: Routledge
- Berger, P. L., & Luckman, T. 1991. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

- England: Penguin Books Ltd.
- Effendy, O.U. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardikanto, T. 2010, Sistem Penyuluhan Pertanian, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Nonaka, I & Takeuchi, H. 1995. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
- Rogers, E. 2003. Diffusion of Innovation 5th Edition. New York: Free Press.
- Slamet, M. 2009, Perkembangan Penyuluhan Teori dan Praktek. Bogor: Progam Mayor Penyuluhan Pembangunan Departemen Komunikasi & Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Vygotsky, L.S. (1978) Mind of Society: Development of Higher Psychological Processes, Cambridge: Harvard University Press.
- Yayuk, Y & Arissaryadin.. 2021. Praksis filsafat ilmu untuk sosiologi pertanian. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

## **BAB 15**

# **PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT AGRIBISNIS**

**Meki Herlon, S.P., M.Si.**

[mekiheron@lecturer.unri.ac.id](mailto:mekiheron@lecturer.unri.ac.id)

### **15.1 Apa itu Perubahan Sosial pada Masyarakat Agribisnis**

Indonesia adalah negara yang berbasis agraris, dimana mayoritas warganya menggantungkan hidup pada sektor pertanian (petani). Secara umum manusia dilahirkan seorang diri dan memiliki naluri untuk hidup dengan manusia-manusia lain (sosial). Dalam Masyarakat pertanian / agribisnis merupakan orang, kelompok orang, kelompok petani yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi (fungsi penyediaan sarana produksi, fungsi produksi, fungsi pengolahan, fungsi pemasaran dan fungsi penunjang) dalam sektor pertanian secara umum. Dalam perjalanan kehidupan dimasyarakat pasti akan terjadi perubahan, baik perubahan dalam skala terbatas, perubahan skala luas, perubahan lambat maupun perubahan yang terjadi sangat cepat. Dilihat dari etimologi, asal kata perubahan sosial terdiri dari dua kata, yang pertama kata perubahan, dimana kata ini memiliki arti peristiwa yang terkait dalam perubahan pergeseran posisi unsur dalam suatu tatanan sistem sehingga berdampak terjadinya perubahan pada struktur sistem. Sedangkan kata sosial bermakna terdapat hubungan seorang petani dengan petani lainnya. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan cara sosial dalam masyarakat pertanian.

Beberapa transformasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat tani adalah perubahan nilai sosial dalam lingkungan petani, norma sosial dalam lingkungan petani, pola perilaku petani, susunan kelembagaan petani, lapisan masyarakat petani, wewenang dan kekuasaan petani dan interaksi sosial yang terdapat di lingkungan petani. Transformasi budaya agribisnis dicirikan dengan bentuk perubahan dalam beberapa aspek seperti aspek pasar yang berorientasi nilai ekonomi, penggunaan jenis teknologi, kualitas mutu tenaga kerja yang digunakan dan sumber energi yang digunakan, sumber modal / keuangan, susunan manajemen, semangat usahatani yang menggerakkan, bentuk keorganisasian usahatani, pelayanan usaha (Pranadji & Hastuti, (2004).

Menurut Sembel *et al.*, (2015) Perubahan sosial adalah perubahan kehidupan dalam masyarakat secara kontinuitas dan akan berlangsung tiada henti. Soekanto & Sulistyowati, (2017) mengatakan perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang telah dijalani, baik karena perubahan-perubahan kondisi lingkungan geografis, lingkungan kebudayaan, susunan penduduk, ideologi, adanya difusi dalam masyarakat. Perubahan sosial memberikan perubahan signifikan pola pikir antara dua generasi, seperti cara petani berinteraksi dan mendidik anak-anak. Bagi generasi petani lebih fokus pada peran gender sebagai yang saling melengkapi, praktek dan pewarisan pertanian. Sedangkan anak petani lebih muda telah mengadopsi teknik pertanian dari orang tua yang secara tidak langsung berdampak kepada praktik pertanian yang lebih intensif dan serta menerima inovasi pertanian (Brandth, 2019).

## **15.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Sosial**

Perubahan tidak terjadi secara sendirinya namun muncul dari interaksi sehari-hari antara orang-orang. Menurut pemikiran Dahrendorf, keberadaan unsur dominasi seringkali menjadi pemicu perubahan tersebut. Banyak faktor yang bisa memicu perubahan sosial, yang paling sering adalah faktor yang bersumber dari internal Masyarakat dan faktor eksternal dari luar Masyarakat. Serta, penting juga untuk mempertimbangkan siapa aktor dibalik terjadinya perubahan sosial tersebut. Umumnya, sumber perubahan sosial dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama: endogen, yang bersumber dari internal dan eksogen, yang berasal dari eksternal (Patty, 2005).

### **a. Faktor yang berasal dari dalam**

#### **1). Bertambah dan Berkurangnya Penduduk**

Perubahan dalam jumlah penduduk, seperti peningkatan akibat transmigrasi, bisa menyebabkan transformasi dalam struktur masyarakat, khususnya pada lembaga-lembaga sosial. Transmigrasi bisa memberikan dampak yang positif dan menguntungkan, terutama jika para transmigran tersebut memiliki keterampilan kerja yang relevan. Dalam konteks masyarakat yang berbasis agribisnis, transmigrasi berperan vital dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian melalui pengenalan dan penerapan inovasi teknologi pertanian.

#### **2). Penemuan-Penemuan Baru**

Inovasi baru dalam kebudayaan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dampak dari penemuan ini seringkali saling terkait dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh, dalam bidang pertanian, pengembangan pertanian presisi telah menyebabkan

perubahan sosial yang besar. Teknologi ini memanfaatkan analisis data besar untuk mengambil keputusan pertanian yang lebih akurat dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan.

### 3). Pertentangan atau Konflik

Konflik adalah bagian integral dari interaksi sosial dan tidak bisa dieliminasi, hanya dapat dikelola. Ketika sumber daya yang memenuhi kebutuhan menjadi terbatas, persaingan meningkat dan bisa berujung pada konflik. Konflik ini sering kali menghasilkan rasa kecewa dan ketidakstabilan sosial, maka dari itu akan membuat individu lebih terbuka terhadap perubahan. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, konflik penggunaan lahan antara perusahaan pertanian besar dan masyarakat adat atau petani kecil menunjukkan bagaimana pertentangan dapat memicu perubahan sosial. Konflik ini tidak hanya muncul dari perbedaan metode atau tujuan dalam bertani, tetapi juga dari persaingan untuk mengakses tanah dan sumber daya alam.

### **b. Faktor yang berasal dari luar**

#### 1) Lingkungan Alam

Kondisi lingkungan alam memiliki peran penting dalam mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan perilaku masyarakat di sekitarnya. Variasi dalam lingkungan alam menyebabkan perbedaan dalam jenis mata pencaharian masyarakat. Misalnya, kehidupan sosial di daerah pedesaan sering berbeda dengan kehidupan di daerah perkotaan, di mana masyarakat pedesaan umumnya berprofesi sebagai petani.

#### 2). Peperangan

Konflik bersenjata antara dua atau lebih negara menghasilkan perubahan, di mana negara yang kalah terpaksa

mematuhi kehendak negara pemenang, termasuk dalam aspek ekonomi, kebudayaan, dan perilaku.

### 3). Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Penerimaan dan penerapan kebudayaan asing menyebabkan perubahan dalam sistem sosial akibat globalisasi informasi, transparansi, dan ekonomi. Kebudayaan asing ini mengubah struktur kehidupan dan perilaku masyarakat, termasuk pola konsumsi dan gaya hidup mereka. Dalam bidang pertanian, pengaruh dari kebudayaan lain seringkali memacu perubahan sosial, membawa inovasi, serta mengadopsi teknologi dan kebiasaan baru. Perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan, seperti hilangnya kebudayaan pertanian tradisional atau tekanan pada sumber daya lokal. Efeknya terhadap masyarakat dapat sangat beragam, tergantung pada cara adopsi dan integrasi ke dalam praktik lokal mereka.

Selain itu, dalam perubahan sosial terdapat faktor-faktor yang menghambat ataupun fakto-faktor yang mempercepat. Faktor pendorong berfungsi seperti dinamo yang mempercepat proses perubahan. Salah satu faktor sosial yang mendorong perubahan sosial adalah keadaan dan kondisi sosial yang berkaitan dengan sistem sosial masyarakat. Sistem sosial ini mencakup sejauh mana masyarakat terbuka terhadap perubahan. Masyarakat dengan sistem yang lebih terbuka cenderung mengalami perubahan lebih cepat daripada masyarakat dengan sistem yang lebih tertutup. Hal ini terlihat jelas pada masyarakat perkotaan yang umumnya lebih fleksibel dalam menerima nilai-nilai baru dari pendatang dibandingkan dengan masyarakat yang lebih tertutup. Selain sistem sosial, kepribadian individu juga memainkan peran penting dalam menentukan perubahan sosial. Individu yang

kreatif dan terbuka terhadap modernitas dapat mempengaruhi orang lain dan berkontribusi pada dinamika perubahan. Ini juga terkait dengan individu atau aktor yang memiliki kekuatan untuk memicu perubahan. Dalam proses ini, interaksi antara agen dan struktur menambah nuansa dalam mendorong perubahan di masyarakat. Aktor yang berpengaruh memiliki potensi dalam mengubah struktur sosial yang sudah terbentuk. Sebagai contoh, seorang ketua kelompok tani akan memiliki lebih banyak pengaruh dibandingkan dengan petani yang tidak aktif. Faktor lain yang mendorong perubahan sosial adalah faktor budaya. Budaya atau tradisi yang cepat beradaptasi dengan perubahan baru memfasilitasi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Beberapa faktor pendorong dalam perubahan sosial adalah:

- a) Terdapat Interaksi dengan kebudayaan dari luar
- b) Adanya kemajuan dalam pendidikan formal yang terus terjadi perkembangan
- c) Penghargaan terhadap kreativitas individu dan aspirasi untuk berkembang
- d) Adanya tingkat toleransi kepada perilaku yang menyimpang
- e) Sistem stratifikasi sosial yang fleksibel
- f) Keanekaragaman populasi
- g) Terdapat sikap ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap aspek tertentu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat
- h) berorientasi kepada masa akan datang
- i) Adanya keyakinan manusia dalam memperbaiki kondisi kehidupan

Dilihat dari sisi faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial, termasuk faktor sosial, psikologis, dan budaya. Masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup cenderung sulit menerima perubahan sosial. Sebagai

contoh, dalam masyarakat yang masih menerapkan sistem kasta, perubahan sosial tidak akan mudah terjadi. Dalam memilih pasangan hidup, keluarga cenderung memilih pasangan dari kasta yang sama untuk menjaga status sosial. Mereka enggan menikahkan anggota keluarga dengan seseorang dari kasta yang lebih rendah karena hal itu dapat menurunkan status sosial atau merusak kedudukan kelas atas keluarga mereka di generasi selanjutnya. Oleh karena itu, masyarakat dengan sistem stratifikasi yang tertutup sering mengalami hambatan dalam menerima perubahan sosial. Contoh pada sektor pertanian dahulu tuan tanah / toke / pedagang pengumpul akan memiliki status social lebih baik jika di bandingkan dengan petani. Akan hal ini pada masa sekarang sudah mulai terhapus dikarenakan petani bisa memiliki lahan yang cukup dan mandiri dalam pengelolaan usahanya, Pratiwi & Bahri (2016) menemukan bahwa status sosial petani saat ini telah mengalami peningkatan dibanding masa lalu.

Faktor psikologis dapat menjadi penghambat perubahan sosial, terutama jika terkait dengan pengalaman negatif atau trauma. Trauma atau pengalaman buruk yang dialami oleh masyarakat, seperti perubahan yang mengubah kehidupan mereka secara signifikan, dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap perubahan lebih lanjut. Sebagai contoh, dalam pemahaman gender, sebagian masyarakat mungkin merasa bahwa perubahan peran gender mengancam norma dan struktur sosial yang ada. Dalam situasi seperti ini, pendekatan persuasif sangat penting untuk mengedukasi dan memfasilitasi pemahaman tentang gender dalam masyarakat. Selain itu, ketidakterbukaan masyarakat terhadap kebudayaan baru juga dapat menghambat perubahan. Resistensi ini seringkali disebabkan oleh persepsi bahwa budaya baru dapat

merusak atau mengubah tatanan kehidupan tradisional. Misalnya, masyarakat suku di daerah terpencil yang jarang berinteraksi dengan dunia luar cenderung mengalami kesulitan dalam menerima perubahan, sehingga perubahan sosial di lingkungan mereka cenderung menghadapi hambatan. Berikut faktor penghambat lainnya:

- a) Terbatasnya hubungan dengan masyarakat luar
- b) Adanya keterlambatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan
- c) Sikap dan perilaku masyarakat yang masih tradisional
- d) Terdapat kepentingan yang telah diyakini dengan kuat (*vested interest*)
- e) Kecemasan yang tinggi akan terjadi integrasi kebudayaan
- f) Adanya sifat dan sikap tertutup kepada sesuatu yang baru
- g) Kendala yang bersifat pemahaman kepada ideologis
- h) Kebiasaan dalam Adat
- i) Keyakinan bahwa kehidupan pada dasarnya adalah penuh kesulitan dan tidak dapat diperbaiki.

## **15.3 Bentuk Perubahan Sosial**

### **1. Perubahan Evolusi dan Revolusi**

Perubahan evolusi merujuk pada perubahan sosial yang berlangsung secara perlahan dan bertahap, terjadi tanpa disengaja oleh masyarakat yang mengalaminya. Perubahan ini muncul dari upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang muncul seiring berkembangnya masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan yang terjadi di sektor pertanian adalah adanya penggunaan teknologi, baik teknologi modernisasi alat-alat pertanian maupun teknologi digital. Masa peralihan penggunaan teknologi di sektor pertanian memerlukan waktu yang cukup panjang. Manfaat penggunaan teknologi digital yang dirasakan oleh petani

adalah 1). Memudahkan pelaku sektor pertanian dalam memutuskan, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, 2). Meningkatkan pengetahuan teknis petani; tepat waktu tanam, tepat penggunaan bibit unggul, tepat penggunaan pupuk, tepat pengendalian hama / penyakit, dan cepat menerima keterbaruan informasi kondisi pasar (Center for Indonesian Policy Studies, 2021).

Sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat, yang bisa tidak direncanakan atau yang direncanakan. Revolusi sering kali dipicu oleh konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Syarat terjadinya revolusi didalam sosiologi diantaranya: 1). Terdapat keinginan secara umum untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan ini di dorong oleh adanya rasa ketidak puasan terhadap kondisi yang dihadapi dan adanya kemauan dalam mencapai kondisi lebih baik. 2). Terdapat seorang pemimpin atau kelompok yang dianggap memiliki kapasitas untuk memimpin. 3). Pemimpin harus mampu membuat perubahan yang konkrit dan dapat dibuktikan. 4). Terdapat momentum dalam memulai suatu perubahan. Sebagai contoh, Revolusi Hijau yang terjadi di pertengahan abad ke 20 telah mengubah dunia pertanian secara signifikan. Seperti adopsi teknologi pertanian modern seperti irigasi otomatis, penggunaan drone sebagai alat bantu teknis pertanian baik dalam pengendalian hama penyakit, pemupukan sehingga lebih tepat dan efisien (Schwab, 2019). Penggunaan teknologi ini berdampak kepada pengurangan penggunaan tenaga kerja dan jam kerja pekerja (Ibrahim, 2019), Sejalan dengan dampak negative modernisasi pertanian seperti traktor, pompa air, dan mesin pengering jagung memungkinkan penggantian tenaga manusia dan hewan (Djoh, 2018).

## **2. Perubahan yang Dikehendaki dan Tidak Dikehendaki**

Perubahan yang dikehendaki merupakan teknik sosial sebagai proses perintah dan larangan. Perubahan dikehendaki muncul sebagai reaksi kepada perubahan sosial yang sudah terjadi sebelumnya. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang terjadi berdasarkan proyeksi dari pihak yang menginginkan perubahan, seperti agen perubahan. Titik berat agen perubahan adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan diminta menjadi pemimpin masyarakat dalam mengerakkan perubahan sistem sosial. Dalam proses pelaksanaan perubahan, harus berada dalam pengendalian dan pengawasan agen perubahan. Setiap tahapan perubahan harus dapat memengaruhi masyarakat dengan cara yang teratur dan terencana (rekayasa sosial / perencanaan sosial). Contoh dari ini adalah perubahan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui peraturan dan undang-undang dalam sektor pertanian, seperti: 1). Pengalokasian lahan untuk pertanian pangan secara abadi sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di masa depan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan ini dikuatkan adalah untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2P). 2). Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa adanya kesengajaan dan tidak ada pengawasan oleh masyarakat, seringkali mengakibatkan konsekuensi negatif kepada masyarakat, seperti penggunaan traktor di pertanian, yang secara tidak langsung mengakibatkan hilangnya tenaga kerja buruh tani akibat penggunaan mesin. Selain itu, pengaruh lain dari penggunaan mesin ini adalah berkurangnya nilai kebersamaan dan kerja

sama dalam mengerjakan lahan pertanian. Jika perubahan yang tidak dikehendaki terjadi diwaktu yang sejalan dengan perubahan yang dikendaki, dan perubahan tidak dikehendaki memberikan pengaruh yang besar kepada perubahan yang dikendaki. Kondisi yang dialami tidak mungkin diubah dengan adanya halangan masyarakat. Pendekatan dan Langkah dalam menyikapi perubahan yang dikehendaki dilakukan dengan mengadakan perbaikan atau pembentukan kepada lembaga sosial Masyarakat.

### **3. Perubahan Kecil dan Besar**

Ukuran perubahan sosial, baik kecil maupun besar, sangat relatif. Perubahan kecil biasanya terkait dengan elemen struktural dalam masyarakat yang tidak memiliki dampak langsung atau signifikan. Sebaliknya, perubahan besar terjadi pada elemen-elemen struktural yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan mesin seperti traktor dalam pengelolaan pertanian di masyarakat agraris adalah perubahan besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Brandth, B. (2019). Farmers Framing Fatherhood: Everyday Life and Rural Change. *Agriculture and Human Values*, 36(1), 49–59. <https://doi.org/10.1007/s10460-018-9887-z>
- Center for Indonesian Policy Studies. (2021). *Pemanfaatan Digital di Pertanian*. Kontan.Co.Id. <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-pemanfaatan-digital-di-pertanian?lang=id>
- Djoh, D. A. (2018). Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Kambata Tana

- Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 2(4), 332–339.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.04.8>
- Ibrahim, J. T. (2019). *Sosiologi Pedesaan* (S. R & A. Riyantono (eds.); 3rd ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Patty, D. (2005). *Pengantar Sosiologi*. CV Kasih Indah.
- Pranadji, T., & Hastuti, E. L. (2004). Transformasi Sosio-Budaya dalam Pembangunan Pedesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 2(1), 77–92.
- Pratiwi, A., & Bahri, S. (2016). The Social Change Rubber Farmers in the Bongkal. *Jom Fisip*, 3(1), 1–14.
- Schwab, K. (2019). *Revolusi Industri Keempat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sembel, R. R., Sendow, M. M., Wangke, W. M., & Timban, J. F. . (2015). Perubahan Sosial pada Petani Kelapa (Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Senduk, Kecamatan Tombariri). *Agri-Sosio Ekonomi*, 11(2A), 22–46.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Rajawali Pers.

## BIODATA PENULIS



**Kausar, S.Sos., M.Si.**

Dosen Program Studi Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Riau

Penulis lahir di Dabo Singkep, Provinsi Kepulauan Riau 12 Juli 1974. Penulis adalah dosen tetap Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosiologi Fisip UNRI tahun 1999 dan S2 pada Pascasarjana Sosiologi UGM tahun 2004. Penulis pernah menjadi Sekretaris Prodi Agribisnis, Sekretaris Jurusan dan Ketua Jurusan Agribisnis Faperta Unri. Penulis menekuni menulis dalam bidang Sosiologi Pertanian, konflik dan resolusi konflik agraria dan perkebunan. Penulis telah menulis beberapa buku antara lain: Sosiologi Pertanian, Konflik Perkebunan di Provinsi Riau dan Alternatif Penyelesaiannya, Pengembangan Model Agroekowisata untuk Pemberdayaan dan Kemandirian Petani Holtikultura di Provinsi Riau, Kajian Etnografi Kebudayaan dan Etnobotani terhadap Praktek Pengobatan Tradisional di Provinsi Riau. Penulis aktif sebagai tenaga ahli sosial ekonomi budaya di beberapa instansi pemerintah dan perusahaan swasta di Provinsi Riau dan sebagai tenaga ahli penyusunan UKL UPL dan Amdal.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:  
[kausar@lecturer.unri.ac.id](mailto:kausar@lecturer.unri.ac.id)

## BIODATA PENULIS



### **Siti Masithoh, S.Pt., M.Si.**

Dosen Program Studi Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Djuanda

Penulis lahir di Magetan, Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Djuanda sejak Tahun 2009 sampai sekarang. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Sosial Ekonomi Industri Peternakan Fakultas Peternakan IPB lulus tahun 2002. Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Sosiologi Pedesaan di IPB lulus tahun 2009. Sejak tahun 2002 Penulis aktif sebagai Dosen Luar Biasa Program Diploma Fakultas Peternakan IPB, dilanjutkan juga menjadi dosen tidak tetap sejak tahun 2005 sampai sekarang di Program Keahlian MAB (Manajemen Agribisnis) Sekolah Vokasi IPB. Email saya adalah [sitimasitoh@unida.ac.id](mailto:sitimasitoh@unida.ac.id) dan no. HP/WA 0817404974

## BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, SPT., M.Si., IPU.,  
ASEAN  
Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan  
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

Penulis lahir di Kabupaten Barru tanggal 21 April 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin sejak tahun 1997 sampai sekarang dan juga dosen homebase di Prodi Agribisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin, lulus tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Ekonomi Sumberdaya Universitas Hasanuddin pada tahun 2002. Kemudian S3 Program Studi Ilmu Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2010. Perolehan Guru Besar pada tahun 2019. Sekarang ini penulis adalah Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat periode 2024-2028. Penulis sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional akreditasi nasional sinta-2, 3, 4, 5 dan beberapa jurnal internasional. Penulis juga sebagai Asesor Nasional BKD. Penulis telah menulis beberapa

buku ajar antara lain: 1. Biosecurity. Persepsi dan Aplikasinya di Peternakan Rakyat.2. Program dan kebijakan pembangunan peternakan di Indonesia.3. Integrated Farming System-Sistem Integrasi SiJagal (Sapi-Jagung-Gamal). Email saya adalah sittinurani81@gmail.com dan no. HP/WA 081389654334

## BIODATA PENULIS



### **Ulfah Nurdiani, S.P., M.Sc.**

Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian  
Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED).

Penulis saat ini merupakan dosen aktif pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Sebelumnya menempuh Pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNSOED lulus pada tahun 2011 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) lulus pada tahun 2011. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian Masyarakat. Mata kuliah yang diampu meliputi komunikasi dan penyuluhan pertanian, pemberdayaan Masyarakat, Sosiologi Pertanian, Pembangunan pertanian dan ekonomi pertanian. Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus organisasi PERHEPI Komda Purwokerto, serta staff Pusat Inkubator Bisnis UNSOED. Email : [ulfah.nurdiani@unsoed.ac.id](mailto:ulfah.nurdiani@unsoed.ac.id)

## BIODATA PENULIS



**Dr. Tintin Febrianti, S.P.,M.P**

Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Garut

Penulis lahir di Garut Jawa Barat pada 21 Februari 1978. Pendidikan mulai sekolah dasar sampai dengan menengah atas di Garut yaitu di SDN 2/6 Tarogong Garut, SMPN 2 Garut dan SMAN 1 Garut. Penulis melanjutkan studi sarjana S1 di Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dari tahun 1996 sampai tahun 2021. Pendidikan pascasarjana S2 dan S3 di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Pengalaman karir penulis dimulai dari mulai tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai guru mata kuliah Manajemen Agribisnis di SPMA Negeri Kabupaten Garut, guru mata kuliah Dasar- dasar Ekonomi di SMA PGRI Garut, asisten dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Garut dan diangkat sebagai dosen tetap Yayasan di Fakultas Pertanian Universitas Garut tahun 2001 sampai dengan sekarang. Semenjak tahun 2019 seiring dengan dibukanya prodi baru di Faperta UNIGA, penulis bertugas di Prodi Agribisnis sampai sekarang.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Ir. Charles R. Ngangi, MS.**

Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado  
(Unsrat)

Penulis juga sebagai dosen program Pascasarjana Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendidikan Doktoral pada Program Studi Ilmu Sosial, Universitas Merdeka Malang. Sejak 2010 s/d 2014 Penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Unsrat dan 2015 s/d 2019 sebagai Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Program Pascasarjana Unsrat. Penulis sebagai reviewer penelitian dan pengabdian di LPPM Unsrat, reviewer buku ajar/ebook LP3 Unsrat, asesor/auditor Fakultas Pertanian Unsrat, Staf Ahli BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dan Staf Ahli Pemerintah Sulawesi Utara untuk Penanggulangan Kemiskinan. Penulis telah menulis beberapa buku antara lain: Modal Sosial, Metode Penelitian, Perubahan Sosial, Sosiologi Pertanian, dan Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Email Penulis [charlesr.ngangi@gmail.com](mailto:charlesr.ngangi@gmail.com)

## BIODATA PENULIS



**Dr. Irmayani, S.P., M.Si.**

Dosen Program Studi Agribisnis  
Program Pascasarjana UM Parepare

Penulis Lahir di Bule (Enrekang), 19 Juli 1979. Jabatan Struktural penulis pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sejak 2016 sampai 2020 dan saat ini sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Pascasarjana di UM Parepare. Pada tahun 2014 penulis pernah mengikuti Program Sandwich Like Dikti sebagai Researcher di Saga University-Japan. Mata kuliah yang diampu meliputi Manajemen Agribisnis, Analisis Kelayakan Agribisnis, Sosiologi Pertanian, Manajemen Produksi Agribisnis, Sosiologi Pembangunan Masyarakat Tani, Ilmu Sosial Dasar, Kearifan lokal dan Statistik non Parametrik. Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh yaitu S-1 program studi Agronomi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (1998-2002), menyelesaikan S-2 program studi Agribisnis di Universitas Hasanuddin (2004-2007) dan melanjutkan studi S-3 program studi Ilmu-Ilmu Pertanian minat Sosiologi Pedesaan di Universitas Hasanuddin (2011-2016). Beberapa

buku yang telah diterbitkan adalah Teori-Teori Sosiologi Modern dan Existensi Nilai-Nilai Lokal Pertanian. Penulis juga pernah meraih penghargaan dari Kemristek Dikti sebagai Peneliti terbaik Kelompok Bidang Sosial Ekonomi. Penulis pernah sebagai nara sumber dalam kegiatan Kuliah Pakar dalam program Visiting Professor di UMM Malang pada Juli 2022.

## BIODATA PENULIS



### **Dr. Ir. Rosnita, M.Si**

Dosen Jurusan Agribisnis dan Magister Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Riau

Penulis dilahirkan di Tanjung Balai Karimun Tanggal 02 Juli 1962. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian sejak Tahun 1988 sampai sekarang. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (SOSEK) Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 1981 dan lulus tahun 1986. Pendidikan S2 dijalani pada Tahun 1998 pada Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) lulus tahun 2001. Kemudian Tahun 2006 melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi Ilmu Pertanian Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan lulus pada Tahun 2011. Tertarik melakukan riset terkait Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Kelembagaan Pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat, Peranan Wanita dan Gender di bidang pertanian khususnya masyarakat kelapa sawit, karet, sagu, yang pendanaan

bersumber dari DIPA UNRI, DRTPM, BPDPKS, dan Balitbang Daerah. Pernah menjabat selaku Ketua Jurusan Agribisnis dan Ketua Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Sejak tahun 2020 hingga saat ini Penulis aktif sebagai Editor pada Jurnal Agribisnis UNISI (Sinta-3), sebagai Asesor BKD Dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri (UNISI) dan Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), serta Asesor Zona Integritas Universitas Riau. Penulis telah menulis beberapa buku seperti : Buku Ajar Gender dan Pembangunan (*Book chapter*), Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (*Book chapter*), Buku Referensi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Karet dalam Digitalisasi Pemasaran (Ketua Penulis), Potensi dan Tantangan Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau (Anggota Penulis). Penulis tergabung dalam Organisasi Profesi : PERHEPI Komda Pekanbaru (Pengurus 2011- sekarang), HA-IPB, PAPPI, dan IPSAGRI. e-mail: [rosnitamag@lecturer.unri.ac.id](mailto:rosnitamag@lecturer.unri.ac.id), dan Hp 08127601414.

## BIODATA PENULIS



### **Dr. Ir. Jane S. Tambas, M.Si**

Dosen Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi  
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

Penulis lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 12 Januari 1963. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, lulus tahun 1993. Pendidikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan (PSP), lulus pada tahun 2000. Pendidikan S3 di tempuh pada Program Doktor Ilmu Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang dan lulus tahun 2017. Penulis bertugas sebagai Dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis, sejak tahun 1997 sampai sekarang. Email penulis adalah [janesulinda@gmail.com](mailto:janesulinda@gmail.com) dan nomor HP/WA 081244459019.

## BIODATA PENULIS



### **Dr. Ir. Asda Rauf, M.Si.**

Dosen Jurusan Agribisnis dan Program Pasca Sarjana S2  
Fakultas Pertanian Agribisnis Universitas Negeri Gorontalo

Penulis Lahir di Gorontalo, 6 Juli 1962. Pendidikan S1 di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado, Pendidikan S2 PLH-KSDA (Pengelolaan Lingkungan Minat Konservasi Sumber Daya Alam) Program Pasca Sarjana UNHAS Makassar dan S3 Minat Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada Tahun 2012. menulis buku Capter pada Buku Produksi Pertanian dan Pangan Berbasis Kawasan dan Lingkungan Bab Konsep Penataan Lahan Berbasis DAS Menunjang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Penerbit Omar Niode Foundation, Jakarta. Tahun 2024 menulis Buku Capter Ilmu dan Analisis Usahatani Bab Perencanaan Usahatani yang diterbitkan oleh CV. Ayrada Mandiri. Penulis juga sebagai asesor BKD sejak Tahun 2022 Bertempat Tinggal Di Kota Gorontalo ([asdarauf@ung.ac.id](mailto:asdarauf@ung.ac.id))

## BIODATA PENULIS



### **Ir. Endah Wahyuning Asih, M.Sc**

Dosen jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Muhammdiyah Palu

Penulis Lahir di Indonesia Jawa Timur Kabupaten Malang, 10 September 1968 Jawa Timur, Jenjang Pendidikan S1 Ditempuh di Universitas Muhammadiyah Malang, Lulus tahun 1992. Pendidikan S2 Agriculture System AIT Bangkok, Lulus Tahun 1998, Sekarang beraktivitas sebagai Dosen di Universitas Muhammdiyah Palu Sulawesi Tengah.

Email : [endah.wa68@gmail.com](mailto:endah.wa68@gmail.com), HP/WA : 0852 4147 8787

## BIODATA PENULIS



### **Dr. Fitri Dian Perwitasari, S.Pt. M.Si.**

Dosen Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah  
Cirebon

Penulis lahir di Kota Semarang Jawa Tengah, tanggal 21 Juli 1982. Penulis adalah pengampu mata kuliah Sosial Ekonomi Peternakan antara lain: Kewirausahaan Islami, Sosiologi Pedesaan, Managemen Agribisnis, Penyuluhan dan Komunikasi, Tata Niaga Peternakan, dan Pengolahan Limbah. Pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro lulus tahun 2005, Pendidikan S2 di Prodi Magister Ilmu Ternak lulus tahun 2009. Pendidikan S3 di prodi Pasca Sarjana Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2023. Penulis pernah menjadi Ketua Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon dari tahun 2017 – 2019. Sejak tahun 2020 – sampai sekarang penulis sebagai editor Jurnal Kandang Prodi Peternakan Universitas Muhamammadiyah Cirebon dan Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdsoci di penerbit Ann Publisher. Penulis juga sudah menerbitkan beberapa buku antara lain buku ajar usaha peternakan dan buku ajar

kewirausahaan islami. Email saya adalah: [fitri.dian@umc.ac.id](mailto:fitri.dian@umc.ac.id)  
dan no HP : 081326101864.

## BIODATA PENULIS



### **Tatang Mulyana**

Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Winaya Mukti

Penulis lahir di Jakarta tanggal 3 Juni 1961. Pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1985. Pendidikan S2 pada Jurusan Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung, tahun 1999. Pendidikan S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran lulus tahun 2010. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen Politeknik Pertanian Negeri Lampung tahun 1990 - 2012 pada jurusan Tanaman Perkebunan dan Jurusan Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya mutasi ke Kopertis Wilayah 4 Bandung sebagai dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan dosen program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Terakhir sejak 2020 sebagai dosen S1 dan S2 program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti Bandung, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [tatangraksadinata@gmail.com](mailto:tatangraksadinata@gmail.com) dan No WA 085720218097.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Arissaryadin, S.ST.,S.Pt.,M.Si**

Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Kadiri

Penulis lahir di Bima tanggal 18 April 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kadiri. Menyelesaikan pendidikan D-IV pada Jurusan Penyuluhan Peternakan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang, melanjutkan S1 pada Jurusan Peternakan di Universitas Tribhuwana Tungadewi (UNITRI) Malang. Penulis melanjutkan pendidikan formal S2 pada Jurusan Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan menyelesaikan S3 di Jurusan Ilmu Pertanian dengan Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian di Universitas Brawijaya (UB). Penulis menekuni bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian, Psikologi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Filsafat Ilmu Pengetahuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [ariessaryadin@gmail.com](mailto:ariessaryadin@gmail.com)

## BIODATA PENULIS



### **Meki Herlon, S.P., M.Si.**

Dosen Program Studi Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Riau

Penulis lahir di Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada 22 Februari 1987. Penulis sejak tahun 2022 sampai sekarang. Jenjang Pendidikan Menengah Atas ditempuh di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Kota Pekanbaru lulus tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis Universitas Riau, lulus tahun 2010. Menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Manajemen Agribisnis dengan konsentrasi Ekonomi Pertanian Universitas Riau, lulus tahun 2017. Penulis telah menulis buku ajar antara lain: Manfaat Dana Desa Di Propinsi Riau, Penyuluhan Dan Kelembagaan Petani Karet Dalam Digitalisasi Pemasaran. Email saya adalah [mekiherlon@lecturer.unri.ac.id](mailto:mekiherlon@lecturer.unri.ac.id) dan no. HP/ WA 081371880066.

BUKU "SOSIOLOGI AGRIBISNIS" ADALAH SEBUAH KAJIAN KOMPREHENSIF TENTANG INTERAKSI SOSIAL DAN PROSES SOSIAL DALAM KONTEKS AGRIBISNIS, YANG MERUPAKAN CABANG BARU DARI ILMU SOSIOLOGI. BUKU INI MENGGABUNGAN KONSEP-KONSEP SOSIOLOGI DENGAN PRINSIP-PRINSIP AGRIBISNIS, YANG MENCAKUP PRODUKSI, PENGOLAHAN, DISTRIBUSI, DAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN. DENGAN MEMBEDAKAN ANTARA SOSIOLOGI AGRIBISNIS, SOSIOLOGI PERTANIAN, DAN SOSIOLOGI PEDESAAN, BUKU INI MENYOROTI BAGAIMANA MASYARAKAT AGRIBISNIS BERINTERAKSI DAN BERADAPTASI DALAM PERUBAHAN SOSIAL DAN TEKNOLOGI YANG TERUS BERKEMBANG.

PADA BAGIAN AWAL, BUKU INI MEMBAHAS KONSEP DASAR SOSIOLOGI AGRIBISNIS, YANG MENCAKUP DEFINISI DAN RUANG LINGKUP ILMUNYA. PENULIS MENJELASKAN BAGAIMANA SOSIOLOGI AGRIBISNIS MEMILIKI FOKUS UNIK PADA INTERAKSI SOSIAL YANG TERJADI DALAM BISNIS PERTANIAN. BUKU INI JUGA MENGUPAS DINAMIKA SOSIAL DALAM MASYARAKAT AGRIBISNIS, TERMASUK KELOMPOK SOSIAL, PELAPISAN SOSIAL, DAN STRUKTUR SOSIAL YANG MEMPENGARUHI POLA KEHIDUPAN SEHARI-HARI DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN. SETIAP KONSEP DIJELASKAN SECARA MENDETAIL, DISERTAI DENGAN STUDI KASUS DAN ANALISIS TEORI-TEORI KLASIK DAN MODERN

SELANJUTNYA, BUKU INI MEMBAHAS PERAN PENTING SOSIOLOGI AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN. PENULIS MENJELASKAN BERBAGAI KONTRIBUSI SOSIOLOGI AGRIBISNIS, SEPERTI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS, DAN PENINGKATAN MANAJEMEN RANTAI PASOKAN. DENGAN PENDEKATAN YANG HOLISTIK DAN ANALISIS MENDALAM, BUKU INI MEMBERIKAN PANDUAN BAGI PARA AKADEMISI, PRAKTISI, DAN PEMBUAT KEBIJAKAN UNTUK MEMAHAMI DAN MENGELOLA PERUBAHAN SOSIAL DI SEKTOR AGRIBISNIS SECARA EFEKTIF.



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

